



**AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER**

**BUKU III A
BORANG PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PADANG 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	8
STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU	23
STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN	43
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA	54
STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK	76
STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI	115
STANDAR 7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	135

BORANG PROGRAM MAGISTER
IDENTITAS PROGRAM MAGISTER

Program Studi (PS)	: Magister Ilmu Politik
Unit Pengelola Program Studi	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas
Nomor SK Pendirian PS (*)	: 350/E/O/2012
Tanggal SK Pendirian PS	: Oktober 2012
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PS	: Djoko Santoso (Dirjen Dikti Kemdikbud RI)
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS	: Februari 2013
Nomor SK Izin Operasional (*)	: 350/E/O/2012
Tanggal SK Izin Operasional	: Oktober 2012
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	: C
Nomor SK BAN-PT	: 343/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015
Alamat PS	: Program Magister Ilmu Politik, Gedung Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163
No. Telepon PS	: 0751-71266
No. Faksimili PS	: 0751-71266
Homepage dan e-mail PS	: fisip.unand.ac.id dan mipunand@gmail.com

(*) : Lampirkan fotokopi SK Terakhir

Bagi PS yang dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebutkan nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2012 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nama Dosen Tetap Program Magisiter Ilmu Politik

No	Nama Dosen Tetap	NIDN **	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sri Zul Chairiyah***	0020085307	20 Agustus 1953	Guru Besar	Prof. Dr. MA. Dra.	Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia Master Ilmu Politik, Universitas Indonesia Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia	S1 Ilmu Politik S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik
2	Afrizal ***	0020056206	20 Mei 1962	Guru Besar	Prof. Dr. MA. Drs.	Sarjana Sosiologi, Universitas Andalas Master of Art Sosiologi, University of Tasmania, Selandia Baru Doktor Sosiologi, Flinders University, Australia	S1 Sosiologi S2 Sosiologi S3 Sosiologi
3	Zainal Arifin***	0006106603	06 Oktober 1966	Lektor Kepala	Dr M.Hum Drs	Sarjana Antropologi Universitas Andalas	S1 Antropologi

						Master Antropologi Universitas Gadjah Mada Doktor Antropologi Universitas Gadjah Mada	S2 Antropologi S3 Antropolpogi
4	Asrinaldi***	0013097304	13 September 1973	Lektor Kepala	Dr. M.Si. S.Sos.	Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Magister Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Doktor Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia	S1 Ilmu Pemerintahan S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik
5	Aidinil Zetra***	0010027006	10 Februari 1970	Lektor	Dr. MA. S.IP.	Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Master of Art Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia Doktor (S3) Political Science Universiti Kebangsaan Malaysia	S1 Ilmu Pemerintahan S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik

6	Tengku Rika Valentina***	00018101	1 Januari 1981	Lektor Kepala	Dr. MA. S.IP.	Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas Master Ilmu Politik, Gajah Mada Doktor Ilmu Politik, Universitas Padjajaran	S1 Ilmu Politik S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik
---	-----------------------------	----------	----------------	---------------	---------------------	---	---

** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

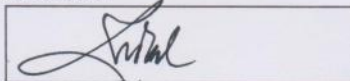
- 1 Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Guru : 2 orang
 Besar
- 2 Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor : 3 orang
 Kepala
- 3 Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor : 1 orang
4. Jumlah dosen dengan pendidikan strata Doktor : 6 orang
 (S3)
5. Jumlah dosen dengan Sertifikat Pendidik : 6 orang

IDENTITAS PENGISI BORANG PROGRAM MAGISTER

Nama : Dr. Asrinaldi, M.Si
 NIDN : 0013097304
 Jabatan : Koordinator Program Magister Ilmu Politik/Ketua Tim
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



Nama : Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA
 NIDN : 0010027006
 Jabatan : Anggota
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



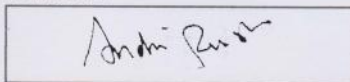
Nama : Drs. Bakaruddin, MS
 NIDN : 0008025503
 Jabatan : Anggota
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



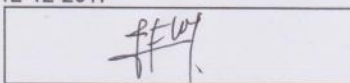
Nama : Drs. Syaiful, M.Si
 NIDN : 0028096602
 Jabatan : Anggota
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



Nama : Andri Rusta, S.IP, MPP
 NIDN : 0009108201
 Jabatan : Anggota
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



Nama : Zulfadli, SHI, MHI
 NIDN : 0007048402
 Jabatan : Anggota
 Tanggal Pengisian : 12-12-2017
 Tanda Tangan



STANDAR 1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program magister, serta pihak-pihak yang dilibatkan.

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program magister dilakukan melalui mekanisme konsultasi multi-*stakeholders* internal, eksternal dan penyelarasan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Andalas dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Adapun langkah-langkah penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program magister tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan visi, misi, dan tujuan program studi dirumuskan melalui mekanisme rapat program studi yang diadakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2014 dengan melibatkan dosen, pimpinan fakultas, Bapem FISIP, GKM Program Magister Ilmu Politik, dan tenaga kependidikan untuk menerima masukan dari *stakeholder* internal.
2. Disamping usulan rapat dosen, perumusan tersebut juga berdasarkan evaluasi program studi terhadap kondisi internal dan pemetaan situasi lingkungan eksternal program studi, hasil *tracer study*, serta masukan dari calon wisudawan pada saat acara pelepasan lulusan.
3. Tahap selanjutnya adalah mengadakan *workshop* dengan mengundang dan melibatkan pihak *stakeholders* (mahasiswa, alumni, dan *users*) guna memperoleh masukan atas draft visi, misi dan tujuan pendidikan. *Workshop* ini dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Januari 2015.
4. Hasil rumusan dari *workshop* tersebut, kemudian dibawa lagi ke rapat dosen pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 yang dihadiri oleh dosen, pimpinan program magister, pimpinan fakultas, Bapem fakultas, GKM Program Magister Magister Ilmu Politik untuk dilakukan penyelarasan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas dan fakultas serta penyempurnaan redaksional serta selanjutnya ditetapkan sebagai visi, misi dan tujuan pendidikan program studi.

Adapun visi Universitas Andalas adalah "Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat", dan misi Universitas Andalas adalah sebagai berikut: 1). Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan berkesinambungan; 2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI; 3) Mendarmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat; 4) Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 5) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tatakelola yang baik (*good university governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis; 6) Mengembangkan usaha-usaha baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan *core business* Universitas Andalas yang dapat meningkatkan *revenue*.

Sementara itu, visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas adalah "Menjadi fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 di bidang sosial politik dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui

proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Sementara misinya adalah; 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang memiliki kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik; 2) Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah berstandar internasional di bidang Sosiologi, Antropologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Komunikasi yang mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat; 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi yang berguna bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial; 4) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good faculty governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis; 5) Menjalinkan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Visi Program Magister Ilmu Politik

Visi Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dirumuskan sebagai berikut:

”Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu di Indonesia pada tahun 2024”.

Untuk memperjelas makna dan rumusan visi tersebut, maka dipaparkan pengertian beberapa kata kunci sebagai berikut:

Bermartabat, ditunjukkan dengan karakter unggul warga dan lulusan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand. Karakter unggul tersebut, dibangun dari elemen spritual, ilmu, amal, dan sosial. Keempat elemen tersebut menjadi kepribadian lulusan, dan dapat membawa lulusan mempunyai harkat dan harga diri. Kondisi bermartabat ini nantinya akan dicirikan dengan:

- a. Karakter unggul yaitu Sabar, Empati, Jujur, Adil, Tanggung Jawab, dan Ikhlas akan terinternalisasi dalam diri semua warga FISIP Unand, terlihat dalam cara berfikir, cara bersikap maupun cara bertindak sehingga tergambar dalam tiga elemen, yakni Ilmu, Amal dan Sosial.
- b. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki taraf hidup yang layak dari segi sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- c. Civitas akademika memiliki keberanian dalam kebebasan mimbar dan kebebasan berpendapat untuk kepentingan bangsa.
- d. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand memiliki program pengembangan yang berkesinambungan, tidak terganggu oleh pergantian kepemimpinan fakultas.
- e. Pengelolaan prodi bersih dari praktek-praktek kotor, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f. Pimpinan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand peduli kepada semua anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan dimana manajemen yang dijalankan menjamin kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Lulusan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand mampu menunjukkan jati diri kebangsaannya di dunia internasional, terutama kebudayaan dan karakter

kebangsaan yangdibanggakan. Lulusan yang jika sudah lebur dengan budaya asing tidakmerendahkan jati diri kebangsaan sendiri.

Civitas akademika dan tenaga kependidikan selalu berpegang teguh pada etiket dan moral, baik dalam interaksi internalnya dengan sesama warga Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand maupun dalam berhubungan dengan pihak lain. Dengan etika dan moral yang kuat, maka warga Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand akan disegani oleh pihak lain.

Terkemuka, ditunjukkan dengan reputasi yang dimiliki Program Magister Ilmu Politik FISIP Unanddi tingkat nasional dan internasional. Kondisi terkemuka ini nantinya akan dicirikan dengan:

- a. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand akan memiliki staf pengajar yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki karakter yang unggul.
- b. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unandakan memiliki lulusan yang berdayasaing tinggi di tingkat nasional dan internasional dibuktikan dengan terserapnya lulusan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unanddi dunia kerja di tingkat nasional dan mampu bekerja di luar negeri
- c. Dosen dan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand akan memiliki sejumlah artikel ilmiah yang berkualitas yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dengan berbasis pada sumber daya dan kearifan sosial serta budaya lokal. Area kekuatan ini akan meliputi bidang-bidang yang terkait dengan kekuatan sosial, budaya, politik lokal yang unik yang menjadi modal dan kontribusi besar untuk kemandirian bangsa.
- d. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Unandakan dimanfaatkan oleh masyarakat, organisasi politik, organisasi swasta dan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa.
- e. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand akan memiliki jaringan kerjasama luas dan menjalin kerjasama dengan Magister Ilmu Politik di perguruan tinggi lain di wilayah Indonesia bagian Barat, sekaligus menjadi partner peneliti internasional untuk bidang-bidang unggulan Magister Ilmu Politik FISIP Unand.
- f. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand akan menjadi alternatif destinasi bagi calon-calon mahasiswa asing yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan serta Timur Tengah dan sekitarnya yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas, sehingga pada Tahun 2028 proporsi mahasiswa asing akan melebihi 15% dari total populasi mahasiswa.
- g. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand menggunakan saranateknologi informasi dan komunikasi meliputi seluruh proses organisasi utama, baik dalam administrasi, pelayanan dan pembelajaran serta menjadi pendukung utama bagipengambilan keputusan.

Misi program magister

Dengan Visi tersebut maka Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan Magister Ilmu Politik yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Politik baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam kajian demokrasi, politik lokal, otonomi daerah dan politik kebijakan;

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Ilmu Politik;
4. Mengembangkan institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola program studi yang baik (*gooddepartment governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional dalam pengembangan demokrasi, politik lokal, otonomi daerah dan politik kebijakan.

Tujuan Strategis Program Magister

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sumberdaya manusia Ilmu Politik yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, kritis, memiliki kepekaan, disiplin dan etos kerja, dan profesional yang tangguh dan memiliki daya saing dan diakui di tingkat nasional dan internasional.
2. Mengembangkan Program Magister Ilmu Politik yang inovatif, kritis, dan multi paradigmatis dalam kajian demokrasi, politik lokal, otonomi daerah dan politik kebijakan untuk memecahkan permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan program-program penelitian unggulan strategis yang bergunabagi masyarakat.
3. Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian di bidang Ilmu Politik kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu sosial kepada masyarakat.
4. Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Politik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non akademik lain yang mendukung.
5. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, organisasi swasta dan NGO di tingkat nasional dan internasional.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terjadi perubahan nomenklatur tentang kompetensi lulusan program studi. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ada beberapa unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang harus dipenuhi oleh setiap program studi yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun beberapa unsur CPL Program Magister Ilmu Politik mengacu pada KKNI tersebut dirumuskan sebagai berikut:

No	KKNI	Capaian Pembelajaran
1	Sikap	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga

		dan cintatanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
2	Penguasaan Pengetahuan	1. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan (ekspresi bekerjanya kekuasaan dan implikasinya) yang berkembang dalam masyarakat; 2. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; 3. Menguasai metode penelitian politik (metode penelitian sosial, baik kuantitatif maupun kualitatif); 4. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik
3	Keterampilan khusus	1. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan suatu negara; 2. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik dan pemerintahan, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan; 3. Mampu membandingkan praktek politik dan pemerintahan suatu negara, baik dimensi spasial (antar daerah, antar negara, antar komunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu 4. Mampu membangun konsensus (<i>consensus</i>)

		<i>building</i>) dalam proses politik dan pemerintahan; 5. Mampu melakukan riset dengan menggunakan salah satu metode penelitian; 6. Mampu menganalisis persoalan politik dan pemerintahan dengan berbagai teknik analisis
4	Keterampilan Umum	1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; 3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 4. Mengelola pembelajaran secara mandiri; 5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

Sasaran dan Strategi Pencapaian

Berdasarkan profil program magister dan jabaran dari visi, misi, dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Program Magister Ilmu Politik pada tahun 2024, diwujudkan dalam sasaran jangka pendek dan jangka menengah. Berikut diuraikan sasaran program magister berdasarkan pentahapan waktu yang jelas sebagaimana yang dideskripsikan di bawah ini. 1. Tahap pertama adalah periode 2012-2016. Tahap ini merupakan tahap pembangunan institusi dan pemenuhan standar-standar pendidikan nasional. Target yang diharapkan yaitu Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand membangun dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 2. Tahap kedua adalah periode 2016-2020. Pada tahap ini dilakukan transformasi manajemen akademik, sumberdaya manusia, keuangan dan aset. Target yang diharapkan yaitu Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unand telah terakreditasi minimal B oleh BAN-PT. 3. Tahap ketiga adalah periode 2020-2024. Pada tahap ini dilakukan pemantapan transformasi manajemen, keuangan, aset, sumberdaya manusia, dan kekayaan

- lainnya. Target yang ingin dicapai adalah terimplementasinya prinsip tata kelola program studi yang baik (*good department governance*) secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang diharapkan adalah Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand menjadi salah satu program studi terkemuka dalam bidang Ilmu Politik di tingkat nasional dengan akreditasi A oleh BAN-PT.
4. Tahap keempat adalah periode 2024-2028. Pada periode ini, Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand mendukung Unand untuk masuk kategori 100 perguruan tinggi terbaik di Asia. Tata kelola dan pembelajaran di FISIP telah memenuhi standar-standar pendidikan tinggi ASEAN. Target yang diharapkan yaitu Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand memperoleh sertifikasi oleh *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)*. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand tidak hanya menjadi tujuan bagi calon-calon mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga menjadi tujuan bagi calon-calon mahasiswa asing dari berbagai negara di dunia yang terus bertumbuh secara signifikan. Periode ini Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand diharapkan telah mulai menunjukkan reputasi internasional. Pelaksanaan kelas berbahasa Inggris sudah mulai dilaksanakan. Program pertukaran mahasiswa dan dosen serta *dual degree* sudah mulai rutin dijalankan.

Tujuan Strategis 1:

Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, kritis, memiliki kepekaan, disiplin dan etos kerja, dan profesional yang tangguh dan memiliki daya saing dan diakui di tingkat nasional dan internasional.

Sasaran Strategis :

- 1.1 Meningkatkan kualitas intelektual, moral dan spiritual staf pengajar, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 1.2 Meningkatkan tingkat keketatan calon mahasiswa.
- 1.3 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pendidikan.
- 1.4 Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional.
- 1.5 Meningkatkan kualitas input mahasiswa.
- 1.6 Meningkatkan relevansi kurikulum.
- 1.7 Meningkatkan peran alumni terhadap almamater.

Strategi pencapaian sasaran:

- 1.1 Meningkatkan kualitas intelektual, moral dan spiritual staf pengajar, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
 - 1.1.1 Menghidupkan kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Musholla kampus
 - 1.1.2 Memberikan pembekalan integritas dan anti korupsi kepada wisudawan
 - 1.1.3 Mengintegrasikan *soft skills* dan *core value* dalam proses pembelajaran
 - 1.1.4 Mendukung kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- 1.2 Meningkatkan tingkat keketatan calon mahasiswa:
 - 1.2.1 Meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
 - 1.2.2 Promosi Program Magister Ilmu Politik
 - 1.2.3 Rekrutmen calon mahasiswa yang berprestasi dalam bakat, minat dan nalar.

- 1.3 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pendidikan:
 - 1.3.1 Ikut Menyusun Buku Pedoman penyusunan Tesis FISIP
 - 1.3.2 Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
 - 1.3.3 Evaluasi kemajuan studi mahasiswa
 - 1.3.4 Membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua mahasiswa
 - 1.3.5 Mengefektifkan hubungan antara pembimbing akademik dengan mahasiswa
 - 1.3.6 Mengembangkan kualitas dosen
 - 1.3.7 Mengembangkan keprofesionalan pengelola laboratorium sosial
 - 1.3.8 Ikut aktif dalam merumuskan peraturan akademik program magister (S2) di lingkungan FISIP
 - 1.3.9 Pemenuhan standar sarana dan prasana laboratorium sosial
 - 1.3.10 Monitoring dan evaluasi laboratoriumsosal
- 1.4. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional dan global:
 - 1.4.1 Terimplementasikannya kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 1.4.2 Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - 1.4.3 Implementasi *soft skills* dalam kurikulum Program Magister Ilmu Politik.
 - 1.4.4 Pengintegrasian *soft skills* dalam proses pembelajaran.
 - 1.4.5 Meningkatnya kualitas input mahasiswa.
 - 1.4.6 Meningkatnya relevansi kurikulum.
 - 1.4.7 Meningkatkan efisiensi dan ouput pendidikan.
 - 1.4.8 Meningkatkan mutu kegiatan ekstrakurikuler.
 - 1.4.9 Meningkatkan peran alumni terhadap almamater.
- 1.5 Meningkatnya relevansi kurikulum
 - 1.5.1 Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan pasar kerja.
 - 1.5.2 Merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran dan bahan kajian pada kurikulum Program Magister Ilmu Politik.
 - 1.5.3 Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah.
 - 1.5.4 Penerapan *Student Centered Learning* (SCL).
 - 1.5.5 Mengintegrasikan *soft skills* dan *core value* dalam proses pembelajaran.
 - 1.5.6 Penerapan penilaian proses dan penilaian hasil.
 - 1.5.7 *Monitoring* dan evaluasi kurikulum.
 - 1.5.8 Penerapan kelas berbahasa Inggris.
 - 1.5.9 Penyusunan *Self-Assessment Report* (SAR).
- 1.6 Meningkatkan peran alumni terhadap almamater
 - 1.6.1 Menyelenggarakan kegiatan alumni *home coming*.
 - 1.6.2 Perluasan jejaring alumni.
 - 1.6.3 *Tracer study* secara berkelanjutan.
 - 1.6.4 Memberikan umpan balik terhadap kurikulum.
 - 1.6.5 Pengenalan dunia kerja.
 - 1.6.6 Informasi lowongan kerja.

Berdasarkan sasaran dan strategi pencapaian Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand, telah ditetapkan indikator kinerja seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Indikator kinerja Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam jangka menengah tahun 2016-2020.

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase calon lolos seleksi mendaftar ulang	100%	100%	97%	98%	99%
2	Persentase mata kuliah yang telah merumuskan capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase matakuliah yang menerapkan semua capaian pembelajaran dalam perkuliahan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase mata kuliah yang menerapkan metode SCL	80%	90%	95%	100%	100%
5	Persentase matakuliah yang telah mengintegrasikan <i>soft skills</i> dan <i>core values</i> dalam proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
6	Mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berbahasa Inggris	30%	35%	40%	45%	50%
7	Rata-rata masa studi	3 th 3 bln	2 th 9 bln	2 th 5 bln	2 th 3 bln	2 th 0 bln
8	Persentase kelulusan tepat waktu	40 %	50 %	60 %	75 %	90 %
9	Rata-rata IPK lulusan	3,45	3,50	3,60	3,65	3,75
10	Persentase mahasiswa <i>drop out</i> atau tidak mendaftar ulang	10	8	6	5	6
11	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama (Bulan)	6	4	3	2	2
12	Persentase kesesuaian pekerjaan lulusan dengan bidang ilmunya	80	80	80	80	80
13	Prosentase lulusan yang memiliki skor TOEFL ≥ 450	20	30	40	50	60
14	Jumlah kegiatan alumni yang berkontribusi terhadap akademik	70	75	80	85	90
21	Jumlah dosen sedang menjalani pendidikan S3	5	4	3	2	2
22	Jumlah dosen berpendidikan S3	11	12	13	14	14
23	Jumlah dosen memiliki jabatan Guru Besar	4	5	5	6	7
24	Jumlah kegiatan alumni yang berkontribusi terhadap kemajuan non akademik	2	4	6	7	8

Tujuan Strategis 2

Mengembangkan Program Magister Ilmu Politik yang inovatif, kritis, dan multi paradigmatis dalam kajian demokrasi, politik lokal, otonomi daerah dan politik kebijakan untuk memecahkan permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan

program-program penelitian unggulan strategis yang bergunabagi masyarakat

Sasaran:

- 2.1 Penguatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa
 - 2.1.1 Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Hibah Dikti
 - 2.1.2 Fasilitasi penerbitan artikel di publikasi terindeks SCOPUS serta mendorong sitasi artikel tersebut guna mendukung pencapaian rating Universitas melalui QS Rating
 - 2.1.3 Pembimbingan dosen muda oleh dosen senior
 - 2.1.4 Pembentukan Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia berbasis fakultas
 - 2.1.5 Meningkatkan kualitas pengayaan materi kuliah dari hasil penelitian dosen
 - 2.1.6 Memfasilitasi pengurusan pendaftaran HKI karya-karya dosen dan mahasiswa
- 2.2 Peningkatan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa dengan mengefektifkan *academic engine*.
 - 2.2.1 Program Beasiswa Unggulan Program Magister untuk mahasiswa berprestasi.
 - 2.2.2 Fasilitasi jasa penerjemah untuk jurnal Internasional bereputasi
 - 2.2.3 Penyediaan biaya publikasi untuk artikel pada jurnal Internasional bereputasi.
 - 2.2.4 Penyediaan dana penelitian hibah internal sehingga meningkatkan rasio penelitian dosen menjadi 1 judul per 1 dosen.
 - 2.2.5 Menggali pendanaan eksternal secara lebih intensif, mendorong semua dosen yang berpotensi untuk mengirim proposal penelitian agar mendapat hibah.
 - 2.2.6 Meningkatkan peringkat jurnal Prodi dan Fakultas menjadi jurnal internasional, yang pada tahap berikutnya, terindeks SCOPUS.
- 2.3 Tersedianya sarana laboratorium sosial pendukung penelitian yang cukup
 - 2.3.1 Workshop penyusunan panduan pratikum sosial.
 - 2.3.2 Fasilitasi penyusunan modul pratikum sosial.
 - 2.3.3 Pengembangan kerjasama nagari binaan.
- 2.4 Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendukung laboratorium sosial di semua Program Studi
 - 2.4.1 Pelatihan untuk tenaga pendukung laboratorium sosial.
 - 2.4.2 Penyediaan insentif untuk tenaga laboran sosial.

Berdasarkan sasaran dan strategi pencapaian Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand, telah ditetapkan indikator kinerja seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Indikator kinerja Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam jangka menengah tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Proposal Penelitian Dosen MIP FISIP yang ikut kompetisi hibah Dikti	11	12	13	14	14
2	Jumlah total penelitian dosen MIP FISIP yang didanai	11	12	13	14	14
3	Hasil penelitian untuk materi pengayaan	11	12	13	14	14

4	Jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi	11	12	13	14	14
5	Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi	3	5	7	10	14
6	Persentase mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen	50	60	70	80	90
7	Jumlah dana penelitian dari luar Unand (juta rupiah)					
8	Jumlah pendaftaran HKI	1	2	4	10	15
9	Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan praktikum sosial					
10	Jumlah jurnal yang terindeks	0	0	1	1	2

Tujuan Strategis 3

Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian di bidang Ilmu Politik kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu sosial kepada masyarakat.

Sasaran:

3.1 Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai pendanaan dari luar Perguruan Tinggi.

3.2 Percepatan pengembangan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat

Strategi pencapaian sasaran:

3.1 Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai pendanaan dari luar PT:

3.1.1 *Review* proposal pengabdian kepada masyarakat

3.1.2 Kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu terapan

3.2 Percepatan pengembangan hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat:

3.2.1 Sosialisasi hasil penelitian kepada instansi pemerintah di berbagai level dan organisasi publik

3.2.2 Sosialisasi hasil penelitian kepada *stakeholder* yang membutuhkan

Berdasarkan sasaran dan strategi pencapaian Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand, telah ditetapkan indikator kinerja seperti pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Indikator kinerja Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam jangka menengah tahun 2016-2020.

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Proposal Pengabdian Dosen FISIP yang ikut kompetisi	11	12	13	14	14
2	Jumlah kegiatan pengabdian dosen (judul : dosen)	11	12	13	14	14
3	Jumlah publikasi kegiatan pengabdian dosen pada jurnal nasional terakreditasi	11	12	13	14	14
4	Persentase mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian dosen	20	30	40	50	60
5	Jumlah dana pengabdian dari luar Unand (juta rupiah)					

Tujuan Strategis 4

Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Politik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non akademik lain yang mendukung.

Sasaran:

- 4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- 4.2 Peningkatan fasilitas penunjang proses pembelajaran.
- 4.3 Terimplementasinya semua sistem informasi untuk pendukung proses akademik, kepegawaian, keuangan dan aset.

Strategi pencapaian sasaran:

- 4.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan:
 - 4.1.1 Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen ke jenjang S3
 - 4.1.2 Promosi doktor untuk memperoleh jabatan Guru Besar
- 4.2 Peningkatan fasilitas penunjang proses pembelajaran:
 - 4.2.1 Pengadaan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional
 - 4.2.2 Peningkatan kemampuan dosen dalam menggunakan *e-learning*
- 4.3 Terimplementasinya semua sistem informasi pendukung proses akademik, kepegawaian, keuangan dan aset:
 - 4.3.1 Perluasan lingkup Sistem Informasi Akademik untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan kemajuan studi mahasiswa Perluasan lingkup Sistem Informasi Kepegawaian untuk pendukung karir dosen dan tenaga kependidikan.
 - 4.3.2 Perluasan lingkup Sistem Informasi Keuangan untuk pendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.
 - 4.3.3 Perluasan lingkup Sistem Informasi Barang Milik Negara untuk mendukung pengelolaan aset.

Berdasarkan sasaran dan strategi pencapaian Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand, telah ditetapkan indikator kinerja seperti pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Indikator kinerja Tujuan Strategis Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam jangka menengah tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase doktor terhadap jumlah dosen	100	100	100	100	100
2	Persentase Guru Besar terhadap jumlah dosen	27%	36%	45%	55%	64%
3	Persentase jenis layanan berbasis sistem informasi	100	100	100	100	100
5	Jumlah Jurnal Nasional terakreditasi berlangganan	2	3	4	6	7
6	Jumlah Jurnal Internasional bereputasi berlangganan	15	20	25	30	35
	Persentase dosen yang sudah memanfaatkan <i>e-learning</i> untuk pembelajaran	80	90	95	100	100

Tujuan Strategis 5

Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, organisasi swasta dan NGO di tingkat nasional dan internasional.

Sasaran:

- 5.1. Peningkatan kerjasama dalam negeri
- 5.2. Peningkatan kerjasama luar negeri

Strategi pencapaian sasaran:

- 5.1. Peningkatan kerjasama dalam negeri:
 - 5.1.1 Pemanfaatan *MoU* dalam negeri untuk kegiatan penelitian bagi dosen
 - 5.1.2 Pemanfaatan *MoU* dalam negeri untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
- 5.2. Peningkatan kerjasama luar negeri:
 - 5.2.1. Pemanfaatan *MoU* luar negeri untuk kegiatan penelitian kolaboratif
 - 5.2.2. Pemanfaatan *MoU* luar negeri untuk publikasi bersama
 - 5.2.3. Pemanfaatan *MoU* luar negeri untuk *staff exchange*
 - 5.2.4. Pemanfaatan *MoU* luar negeri untuk *student exchange*

Berdasarkan sasaran dan strategi pencapaian Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand, telah ditetapkan indikator kinerja seperti pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Indikator kinerja Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam jangka menengah tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti per tahun	3	5	10	15	20
2	Jumlah kerjasama internasional yang ditindaklanjuti per tahun	1	3	4	4	4
3	Jumlah <i>student exchange</i> dengan PT dalam negeri.	0	0	3	6	7
4	Jumlah <i>student exchange</i> dengan PT luar negeri.	0	0	3	6	7
5	Jumlah beasiswa hasil kerjasama dalam negeri	2	2	3	4	5

Dokumen pendukung:

- 1. Statuta Universitas.
- 2. Rencana Strategis Universitas.
- 3. Rencana Strategis Fakultas
- 4. Rencana Strategis Jurusan Ilmu Politik
- 5. Rencana Strategis Program Magister Ilmu Politik
- 6. Rencana Anggaran dan Belanja Fakultas.
- 7. Dokumen Peraturan Akademik, Standar Operasional Prosedur, Standar Mutu Akademik

1.2 Sosialisasi

Uraikan upaya sosialisasi visi, misi dan tujuan program magister serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas sebagai unit pengelola program magister kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan adalah dengan beberapa cara:

1. Visi dan misi Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand tertulis dalam dokumen Renstra FISIP. Dokumen Renstra ini disebarluaskan kepada semua pimpinan jurusan dan pimpinan program magister, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
2. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand setiap tahun mengeluarkan buku panduan akademis yang dibagikan kepada mahasiswa baru. Dalam buku panduan tersebut tertulis visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand. Hal ini juga disampaikan dalam ceramah-ceramah penerimaan mahasiswa baru oleh pimpinan program studi.
3. Dalam rapat-rapat pimpinan maupun rapat-rapat yang melibatkan staf pengajar, tenaga kependidikan dan mahasiswa pimpinan fakultas menyampaikan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand FISIP Unand.
4. Penyampaian visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand kepada alumni dalam berbagai pertemuan alumni.
5. Visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand disebarluaskan kepada publik termasuk mahasiswa dalam *website* Magister Ilmu Politik FISIP Unand.
6. Penyampaian visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dalam berbagai kegiatan kerjasama dengan institusi lain.
7. Visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand disebarluaskan kepada sivitas akademika dengan media poster dan spanduk.

Tingkat pemahaman tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand relatif naik karena media untuk menyebarluaskan visi, misi dan tujuan tersebut cukup bervariasi. Pemahaman dosen dan mahasiswa tentang visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand dapat dilihat hasil survei seperti pada Gambar 1.1 berikut:

Tingkat Pemahaman Dosen Terhadap Visi



Dari gambar 1 terlihat 87 persen dosen sangat paham dengan visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP. Sementara, jika dikaitkan dengan pemahaman mahasiswa Program Magister Ilmu Politik sebanyak 85 persen sangat memahami visi, misi dan tujuan program magister tersebut. Hal ini juga terlihat dari beberapa

dokumen yang dihasilkan dosen seperti Rencana Pembelajaran Semester yang hampir semuanya telah memiliki tujuan dan sasaran pembelajaran sesuai visi misi prodi untuk menghasilkan kompetensi secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Bukti lain tentang pemahaman dosen terhadap misi dapat dilihat dari keseriusan dan komitmen mereka dalam melakukan inovasi penyelenggaraan penelitian baik penelitian dasar maupun penelitian terapan di bidang kepakaran masing-masing. Banyak topik baru yang muncul dalam *roadmap* penelitian dosen. Terjadinya peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa juga sebagai bukti bahwa dosen memahami dan menjalankan misi prodi. Dosen aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, daerah dan nagari, organisasi publik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya juga sebagai bukti bahwa dosen juga telah memahami dan menjalankan misi prodi. Dosen, mahasiswa sangat aktif dalam mengawal upaya mewujudkan kelembagaan prodi yang berorientasi pada *good department governance*. Hal ini terlihat dari keaktifan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam memberikan kritik dan saran terhadap pimpinan dan pengelola fakultas dalam berbagai pertemuan formal dan informal tentang implementasi prinsip-prinsip *good faculty governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan aturan dan sebagainya. Pemahaman tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik dapat dilihat dari dukungan mereka dalam menyampaikan pelayanan (*service delivery*) yang unggul terhadap proses pendidikan, administrasi dan umum serta kemahasiswaan.

STANDAR 2

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Sistem Tata Pamong

Jelaskan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Magister untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

Sistem Tata Pamong Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Program Magister. Untuk melaksanakan hal tersebut tata pamong yang diselenggarakan Program Magister Ilmu Politik tetap berpedoman pada landasan yuridis yang berlaku di lingkungan Universitas Andalas dan kondisi *existing* yang tersedia di Program Magister Ilmu Politik.

Sejak diperolehnya izin penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi melalui SK Dirjen Dikti Nomor 350/E/O/2012, landasan yuridis yang digunakan oleh Program Magister Ilmu Politik dalam melaksanakan sistem tata pamongnya berpedoman kepada peraturan antara lain (1) Permendikbud No 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Andalas; (2) Permendikbud No 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; (3) SK Rektor No.6b tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister; (4) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

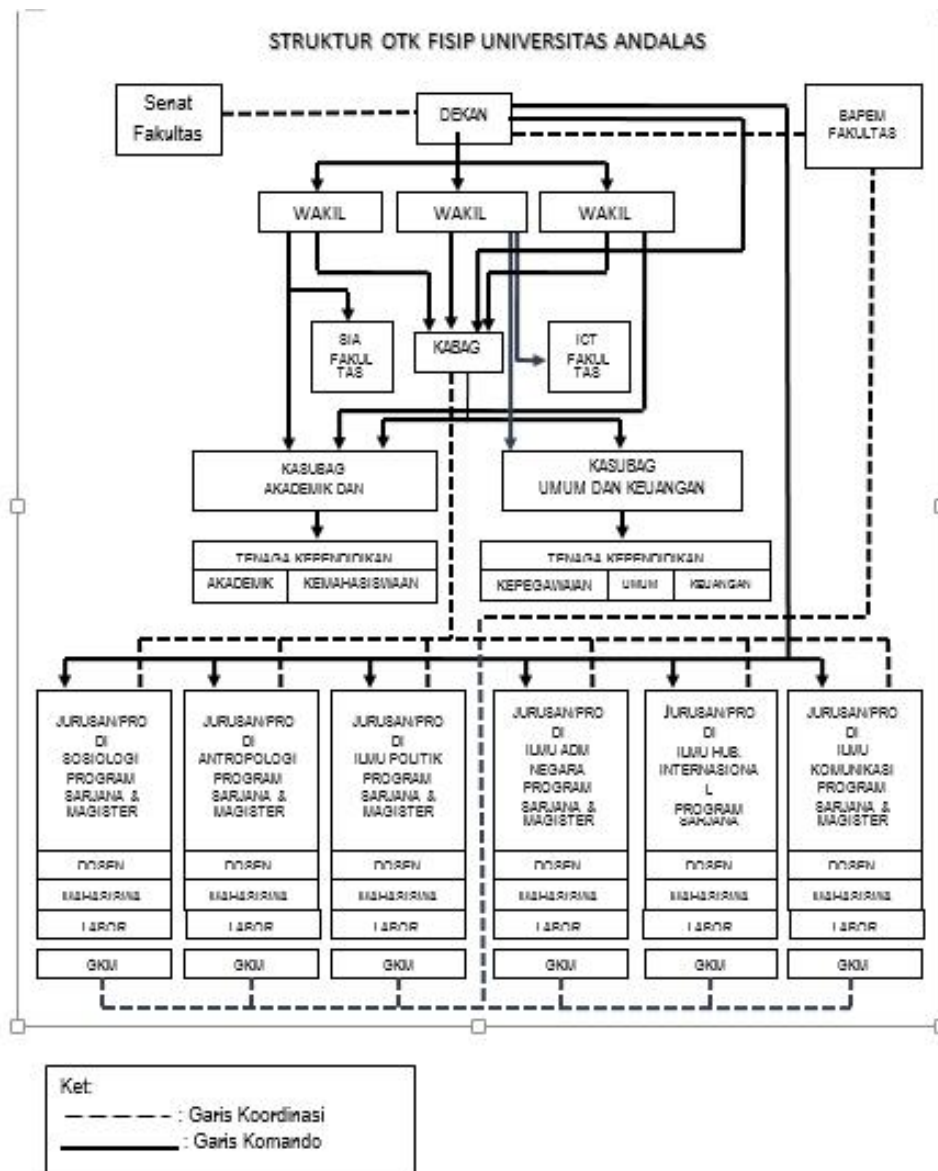
Secara kelembagaan, kedudukan Program Magister Ilmu Politik merupakan program pasca sarjana monodisipliner yang diselenggarakan di bawah naungan Jurusan Ilmu Politik, hal sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Andalas, khususnya pasal 71 ayat (3). Program Magister Ilmu Politik dipimpin oleh Koordinator Program Magister dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Pada awal berdirinya yang menjabat sebagai Koordinator Program Magister Ilmu Politik adalah Dr. Ria Ariyani. Namun pada tahun 2014, terjadi pergantian koordinator program yang selanjutnya dijabat oleh Dr. Asrinaldi, M.Si melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 623/XIII/J/Unand-2014 tentang Pergantian Antar Waktu Koordinator Program Magister Ilmu Politik Periode 2014-2017.

Koordinator Program Magister Ilmu Politik memiliki tugas pokok memimpin program magister dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik selalu melibatkan seluruh dosen tetap maupun dosen tidak tetap serta dibantu oleh staf kesekretariatan Program Magister dan tenaga kependidikan yang ada di Jurusan Ilmu Politik. Staf Kesekretariatan Program Magister Ilmu Politik memiliki tugas pokok membantu Koordinator Program Magister dalam penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, staf pengajar (dosen) dan kemahasiswaan.

Dalam hubungannya dengan tata kerja dengan unit lain di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Koordinator Program Magister Ilmu Politik selalu berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan program kerjanya kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik dan kepada

Dekan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan akademik di tingkat fakultas. Sementara dalam hubungannya dengan pihak di luar fakultas, Dekan/Wakil Dekan I melakukan koordinasi penyelenggaraan Program Pascasarjana monodisipliner yang berada di lingkungan FISIP kepada pihak universitas melalui Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.

Secara internal, kedudukan dan hierarki komando Program Magister Ilmu Politik dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat dilihat dalam struktur organisasi berikut ini :



Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian Program Magister Ilmu Politik, sistem tata pamong yang dijalankan dan dikembangkan oleh program magister senantiasa mempertimbangkan prinsip-prinsip **kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil**. Uraian pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Aspek Kredibilitas;

Aspek kredibilitas adalah aspek yang menyangkut tingkat kepercayaan *stakeholder* dan *user* yang menyangkut reputasi sebuah lembaga. Kredibilitas Program Magister Ilmu Politik bukan hanya ditunjukkan melalui reputasi lembaga belaka, tetapi juga reputasi personal para dosen, mahasiswa dan lulusannya. Aspek kredibilitas yang sering dilaksanakan adalah dalam pemilihan koordinator Program Magister Ilmu Politik dilakukan dengan cara melibatkan

semua dosen dalam rapat yang dijadwalkan. Begitu juga dalam perencanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh program magister ditetapkan berdasarkan rapat dengan dosen program magister. Rapat rutin dilakukan sekali sebulan untuk memantau perkembangan proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Politik yang dipimpin oleh koordinator program magister. Selain itu, evaluasi terhadap kegiatan program magister yang dilaksanakan melalui rapat rutin Program Magister Ilmu Politik yang dijadwalkan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan program terselenggara dengan baik.

Kredibilitas kelembagaan dapat dilihat dari bukti berikut ini :

- (a) Diperolehnya hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2016 dengan rata-rata nilai score 3,24 (dengan skala 0-4) yang dilakukan oleh LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu) Universitas Andalas. Kemudian pada tahun 2017 hasil Audit Mutu Internal (AMI) meningkat dengan rata-rata nilai score 3.36
- (b) Dijalinnya kerjasama antara Program Magister Ilmu Politik dengan Padang TV pada Tahun 2013 untuk menyelenggarakan Debat Publik Bakal Calon Walikota Padang;
- (c) Dijalinnya Kerjasama dengan KPK pada Tahun 2017 dalam Diskusi Publik Politik Cerdas Berintegritas.
- (d) Dijalinnya kerjasama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 untuk memberikan Pelatihan Bagi Staf Pegawai Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten Kota mengenai Pengawasan Pelanggaran Pemilu.
- (e) Dijalinnya kerjasama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam bentuk *Lecture Series* dan *jointResearch* tahun 2017.
- (f) Dijalinnya kerjasama dengan Konsorsium Program Magister Tata Kelola Pemilu, KPU RI dalam bentuk *Lecture Series* dan *jointResearch* tahun 2017.
- (g) Bekerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Debat Publik Calon Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah; antara lain dengan KPU Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2010 dan 2015, KPU Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2010, dengan KPU Kota Payakumbuh Tahun 2016;

Sedangkan kredibilitas personal yang dimiliki Program Magister Ilmu Politik diantaranya :

- (a) Ditunjuknya beberapa Dosen Magister Ilmu Politik sebagai Tim Pakar/Ahli atau Panelis dalam Debat Publik Calon Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten/Kota; antara lain di Kabupaten Dharmasraya (2010 dan 2015), Kabupaten Pesisir Selatan (2010), Kabupaten Sijunjung (2010), Kabupaten 50 Kota; Kabupaten Agam, Kota Bukittingi, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Padang.
- (b) Ditunjuknya beberapa Dosen Magister Ilmu Politik seperti Prof. Sri Zul Chairiyah, Dr. Asrinaldi dan Dr. Aidinil Zetra) sebagai Tim Seleksi Komisioner Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2017

(2) Aspek Transparansi;

Aspek transparansi dalam tata pamong Program Magister Ilmu Politik ditunjukkan dalam bentuk penyampaian informasi secara akurat, terbuka serta mudah diakses baik oleh para *civitas akademika* dan *stakeholder* terkait. Aspek transparansi diterapkan dalam kegiatan Rapat Program Magister Ilmu Politik dilakukan secara periodik baik setiap bulan, setiap semester dan setiap membahas agenda penting tertentu yang dihadiri oleh para dosen tetap, dosen tidak tetap serta tenaga kependidikan (sesuai dengan agenda yang dibahas). Kegiatan Rapat tersebut antara lain :

- (a) Rapat pembuatan kebijakan, program (akademik maupun non akademik) serta pengelolaan keuangan/anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui rapat program magister.
- (b) Rapat Program Magister Ilmu Politik yang membahas agenda akademik, diantaranya penentuan dosen pembimbing tugas akhir, dosen penguji seminar proposal tesis dan ujian tesis. Selain itu, rapat Program Magister Ilmu Politik juga membahas evaluasi proses pembelajaran, penentuan dosen pengampu mata kuliah satu kali dalam semester berjalan, termasuk mengevaluasi secara minor kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa.
- (c) Transparansi juga ditunjukkan dengan upaya Program Magister Ilmu Politik untuk terbuka memberi peluang kepada para dosennya untuk menduduki jabatan dan mengikuti berbagai kegiatan baik di tingkat fakultas, universitas, lokal, nasional maupun internasional. Sehingga setiap dosen mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti berbagai kegiatan yang tidak terjadi dominasi oleh satu atau beberapa orang dosen saja.
- (d) transparansi terhadap *stakeholder* ditunjukkan dengan keterbukaan anggaran yang tertuang dalam RKAKL Program Kerja Program Magister Ilmu Politik, yang dapat diakses oleh siapa saja.

(3)Aspek Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas dalam tata pamong Program Magister Ilmu Politik diterapkan baik pada level kelembagaan maupun individual (dosen dan tenaga kependidikan). Pada level kelembagaan, prinsip akuntabilitas Prodi ditunjukkan dengan :

Adanya keharusan bagi Prodi untuk membuat program kerja berdasarkan Renstra Prodi dan tindak lanjut hasil audit mutu AMI (Audit Mutu Internal). Selain itu, Prodi juga dikenai kewajiban untuk membuat laporan dan melakukan evaluasi kegiatan terhadap semua program kerja (RKA-KL) yang telah dilaksanakan.

Pada level individual, prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan :

- (a) Ditetapkannya kewajiban bagi semua dosen untuk menyerahkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) setiap akhir tahun. LKD yang telah diperiksa dan dinilai oleh Tim Asesor (yang ditetapkan oleh Universitas Andalas) selanjutnya dijadikan bukti pertanggungjawaban kinerja dosen selama satu tahun sebelumnya dan sekaligus sebagai syarat untuk diberikannya tunjangan sertifikasi dosen. Dalam LKD tersebut juga disertakan RPS, *Handout* Kuliah dan Rekapitulasi Kehadiran Mengajar.
- (b) Adanya kewajiban bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk membuat Rencana SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pada setiap awal tahun anggaran dan sekaligus menyerahkan Laporan SKP tahun sebelumnya yang penilaiannya dilakukan oleh Ketua Prodi dan Dekan.
- (c) Dalam bidang akademik/proses pembelajaran, prinsip akuntabilitas dapat ditunjukkan dengan adanya kewajiban bagi dosen untuk mengembalikan kembali tugas kuliah mahasiswa yang telah diperiksa/dinilai serta lembar hasil UTS dan UAS, termasuk monitoring dokumen satuan acara perkuliahan (SAP/RPKPS) serta kehadiran dosen dalam perkuliahan.

Sementara itu, Program Magister Ilmu Politik menentukan dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing tugas akhir, dosen penguji. Untuk memperlancar sistem dan pelaksanaan tata pamong, Program Magister Ilmu Politik membuat sejumlah Standar Operasional Prosedur.

(4) Aspek Bertanggung jawab;

Aspek bertanggung jawab Program Magister Ilmu Politik ditunjukkan dengan komitmen Koordinator program dan semua sivitas akademik untuk menegakkan semua aturan sesuai fungsi, tugas pokok, peran serta kode etik sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Andalas dan Peraturan Akademik Universitas Andalas. Bentuk kebertanggung-jawaban Program Magister Ilmu Politik dapat dilihat dalam 2 hal yakni bertanggung jawab dalam bidang manajerial dan bidang akademik :

Dalam bidang manajerial, bentuk kebertanggung-jawabannya antara lain :

- (a) Membuat Rencana dan Melaksanakan Program Kerja Tahunan yang dituangkan dalam RKAKL Universitas;
- (b) Melaksanakan pertemuan secara periodik setiap bulan dan per semester serta melibatkan seluruh dosen dalam setiap rapat prodi.

Dalam bidang akademik, aspek kebertanggungjawabannya antara lain :

- (a) Menetapkan dosen pengajar sesuai dengan latar belakang bidang ilmu dan kepangkatan (hanya yang memiliki gelar Doktor dan berpangkat Lektor);
- (b) Meminta kepada semua dosen untuk menyediakan RPS, *Handout* dan reading material untuk setiap matakuliah;
- (c). Membagi dosen pembimbing tesis mahasiswa pada semester 3 dan mewajibkan Mahasiswa untuk mengajukan proposal tesis dan melakukan bimbingan tesis pada Semester 3.
- (d). Mewajibkan mahasiswa untuk memiliki Buku Pedoman Penulisan Tesis dan wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal tesis untuk dapat mengajukan dirinya Ujian Seminar Proposal tesis.

(5) Aspek Adil;

Aspek keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap segenap sivitas akademika disesuaikan dengan kapasitas, kompetensi dan kondisi yang tersedia di Program Magister Ilmu Politik. Prinsip keadilan yang dijalankan Program Magister Ilmu Politik diwujudkan dalam bentuk :

- (a) Pemberian peluang bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan masa pengabdian di Prodi dan ketersediaan sumber daya yang aktif di Prodi.
- (b) Pemberian peluang untuk mengikuti kegiatan konferensi/seminar/workshop diberikan seluas-luasnya kepada dosen sesuai dengan minat dan kompetensinya;
- (c) Perlakuan yang sama diberikan kepada dosen dalam melaksanakan penelitian dosen yang dibiayai oleh fakultas.
- (d) Pembagian insentif secara merata dalam pembuatan modul pembelajaran.
- (e) Dalam bidang kemahasiswaan, perlakuan yang tidak diskriminatif memberikan pelayanan akademik dan kemahasiswaan.

2.2 Kepemimpinan

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Program Magister, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

1. Kepemimpinan Operasional

Kepemimpinan operasional Program Magister Ilmu Politik dilaksanakan dalam tiga ranah kegiatan yakni dalam (1) bidang administrasi akademik; (2) bidang sumberdaya manusia dan

keuangan; (3) bidang kemahasiswaan.

Dalam bidang administrasi akademik, pola kepemimpinan bersifat koordinatif dan terintegrasi dengan dengan unit/bagian yang ada di level jurusan dan fakultas. Bersifat Koordinatif dalam hal pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan administrasi, sedangkan bersifat integratif dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam bidang sumber daya manusia dan keuangan, kepemimpinan operasionalnya bersifat semi otonom. Artinya, secara penentuan dan pengembangan sumber daya manusia (dosen tetap dan tidak tetap) diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Program Magister Ilmu Politik untuk menentukan staf pengajarnya, kualifikasi dan kompetensinya. Sedangkan bersifat semi otonom dalam hal anggaran, karena sumber biaya keuangan Program Magister Ilmu Politik sepenuhnya berasal dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang alokasinya ditetapkan oleh Fakultas/Universitas, meskipun usulan rencana biaya anggaran berasal dari Program Magister Ilmu Politik.

Dalam bidang kemahasiswaan, kepemimpinan operasionalnya bersifat partisipatif, khususnya dalam menentukan rencana studi dan penyelesaian tugas akhirnya. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa, mulai dari mengusulkan pembimbing tesis, mendaftar seminar proposal, hingga memberikan masukan tentang proses akademik, proses pembelajaran dan penilaiannya terhadap kualitas para dosen Program Magister Ilmu Politik.

Untuk melaksanakan kepemimpinan operasional ini agar jelas dan terukur, maka pelaksanaan kepemimpinan operasional di Program Magister Ilmu Politik ini dituangkan ke dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang menjadi pedoman dalam kegiatan tiga bidang atau urusan tersebut.

Selain didasarkan pada SOP Program Magister Ilmu Politik, kepemimpinan operasional program studi ini juga dilandasi oleh sebuah *Core of Value* yang telah ditetapkan oleh Jurusan Ilmu Politik pada tahun 2008, yaitu *integrity, brotherhood, sincerely, cooperation, accountability, partisipatory, transparency, social responsibility*, dan *educative*. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menentukan setiap tindakan, tingkah laku dan program kerja yang dilakukan oleh setiap elemen yang ada dalam Program Magister Ilmu Politik.

2. Kepemimpinan Organisasi

Dalam konteks, kepemimpinan organisasi, apa yang dilakukan oleh koordinator Program Magister Ilmu Politik adalah usaha untuk mewujudkan visi yaitu “Menjadikan Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakandan tata kelola pemilu di Indonesia tahun 2024.” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kepemimpinan organisasi Program Magister Ilmu Politik yang dijalankan harus berpedoman pada visi dan misinya (yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kelembagaan dan Membangun Kerjasama (*networking*) baik ke dalam maupun keluar lembaga.

(1) Kepemimpinan organisasi yang bersifat ke dalam, antara lain :

- (a) Untuk hubungan kelembagaan, Koordinator Program Magister Ilmu Politik juga selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Jurusan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat bersinergi dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Jurusan Ilmu Politik. Koordinasi juga dilaksanakan dengan pimpinan fakultas, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dekan atau Wakil Dekan agar pencapaian tujuan organisasi di tingkat fakultas dan

- program magister dapat diwujudkan.
- (b) Untuk bidang pendidikan, Koordinator Program Magister Ilmu Politik mengendalikan proses penyusunan kurikulum yang relevan dengan kajian Demokrasi, Politik Lokal dan Politik Kebijakan.
 - (c) Untuk bidang penelitian, koordinator Program Magister Ilmu Politik mengarahkan para dosen untuk mengusulkan judul-judul penelitian yang sejalan dengan konsentrasi kajian Program Magister Ilmu Politik, termasuk topik dalam pengabdian kepada masyarakat.
 - (d) Untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran para dosennya, maka Program Magister Ilmu Politik berkoordinasi dengan Jurusan Ilmu Politik menerbitkan Jurnal Analisa Politik dan Jurnal Islam dan Demokrasi yang terbit secara berkala.
 - (e) Untuk menciptakan *atmosphere academic*, koordinator Program Magister Ilmu Politik bersama para dosennya menyusun agenda kuliah Umum (studium general) dengan mengundang narasumber dari luar perguruan tinggi yang memiliki kompetensi/keahlian sesuai bidang kajian prodi ini.
- (2) Kepemimpinan organisasi yang bersifat keluar, dilakukan dalam rangka menjalankan misi kelembagaan dan *networking*, bahwa Program Magister Ilmu Politik melakukan kegiatan *roadshow* dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan bidang kajian program magister ini dalam rangka pengembangan disiplin ilmu dan kompetensi sumberdaya yang tersedia. Sebagai contoh kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dengan Pemda dan lembaga perwakilan baik di tingkat nasional maupun lokal (DPR, DPD dan MPR RI).

3. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik Program Magister Ilmu Politik dipahami sebagai peran penting dan kontribusi Program Magister Ilmu Politik dalam ruang publik baik secara kelembagaan maupun individual.

- (a) Sebagai Tim Ahli penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkuat program dan kegiatan pemerintah provinsi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat tahun 2017.
- (b) Sebagai tim ahli penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) di beberapa Pemerintah Kota, Kabupaten di Provinsi di Sumatera Barat,.
- (c) Menjadi Tim Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota tahun 2017.
- (d) Menduduki jabatan pimpinan cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Padang periode 2016 – 2021.
- (e) Menjadi Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat; dengan peran memberikan masukan kepada pemerintah provinsi khususnya badan litbang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan program pemerintah.
- (f) Menjadi penulis tetap dan narasumber di media cetak seperti Harian Haluan, Padang Ekspres dan Singgalang dan elektronik lokal seperti Padang TV, TVRI Sumbar, Radio Classy FM dan lain sebagainya.

2.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Magister mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Jelaskan pelaksanaan sistem pengelolaan Program Magister serta dokumen pendukungnya.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya berpedoman pada ketentuan dan mekanisme yang dituangkan dalam peraturan berikut ini :

- (1) Permendikbud No 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Andalas;
- (2) Permendikbud No 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- (3) SK Rektor No.6b tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister;
- (4) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

Sistem pengelolaan fungsional adalah menempatkan Prodi Magister sebagai wadah pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademik dengan memanfaatkan segenap sumberdaya yang ada. Baik sumber daya dosen, mahasiswa serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Sistem pengelolaan operasional adalah menempatkan program magister sebagai unit pelaksana terdepan dalam menjalankan berbagai aktifitas akademik maupun manajemen kelembagaan.

Dua sistem pengelolaan tersebut dituangkan ke dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang terbagi dalam tiga urusan yakni Urusan Akademik, Urusan Sumber Daya dan Keuangan serta Urusan Kemahasiswaan dan Alumni.

Masing-masing urusan dikelola melalui tahapan-tahapan berikut ini :

Planning (Perencanaan)

Untuk melaksanakan kegiatan di Program Magister Ilmu Politik dimulai dengan tahap perencanaan yang dilakukan dalam rapat program magister. Tahapan perencanaan ini menjadi dasar untuk melaksanakan semua kegiatan yang dirancang bersama dengan dosen pengajar di Program Magister Ilmu Politik. Perencanaan Program Magister Ilmu Politik dilakukan dalam 3 Tahap;

- Perencanaan jangka panjang yang disusun pada awal dibentuknya Program Magister Ilmu Politik yang dituangkan dalam Tujuan dan Strategi Pencapaian Program Magister.
- Perencanaan Jangka Menengah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Universitas dan Fakultas. (lampirkan RENSTRA Unand/FISIP/S2 MIP)
- Perencanaan Jangka Pendek yang disusun setiap tahunan dan atau disesuaikan dengan masa Jabatan Koordinator Program Magister Ilmu Politik.

Tabel 2.1 Contoh Proker Program Magister Ilmu Politik tahun 2016

NO.	Program/ Kegiatan	Perhitungan			
		Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
1	CETAK JURNAL ANALISIS POLITIK	2	Kegiatan	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
	Biaya Cetak	180	eks	Rp 48.000	Rp 8.640.000
	Biaya Distribusi	2	paket	Rp 680.000	Rp 1.360.000
2	CETAK JURNAL ISLAM DEMOKRASI	2	Kegiatan	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
	Biaya Cetak	180	eks	Rp 48.000	Rp 8.640.000
	Biaya Distribusi	2	paket	Rp 680.000	Rp 1.360.000
3	BANTUAN PENGELOLA JURNAL ISLAM DAN DEMOKRASI	10	OK	Rp 250.000	Rp 2.500.000
	Konsumsi	10	org	Rp 30.000	Rp 300.000
	Honorium Pengelola	10	org	Rp 220.000	Rp 2.200.000
4	BANTUAN PENGELOLA JURNAL ANALISIS POLITIK	10	OK	Rp 250.000	Rp 2.500.000
	Konsumsi	10	org	Rp 30.000	Rp 300.000
	Honorium Pengelola	10	org	Rp 220.000	Rp 2.200.000
5	PEMBELIAN JURNAL TERAKREDITASI	2	Edisi	Rp 500.000	Rp 1.000.000
	Biaya Berlangganan Jurnal	2	paket	Rp 500.000	Rp 1.000.000
6	DISKUSI JURUSAN RUTIN ILMU POLITIK	6	KGT	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	Fotocopy Bahan	6	Bulan	Rp 50.000	Rp 300.000
	ATK	6	Bulan	Rp 50.000	Rp 300.000
	Konsumsi	6	Bulan	Rp 350.000	Rp 2.100.000
	Transportasi Pembicara	6	Bulan	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	Spanduk dan Leaflet	6	Bulan	Rp 150.000	Rp 900.000
	Plakat pembicara	6	Bulan	Rp	Rp

				200.000	1.200.000
7	TRACER STUDY JURUSAN	1	PAKET	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	Fotocopy Bahan	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	Pembuatan Website Alumni	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Pembuatan Form Aplikasi Alumni	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
8	EDOM JURUSAN	2	KGT	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
	Fotocopy Bahan	2	paket	Rp 300.000	Rp 600.000
	ATK	2	paket	Rp 300.000	Rp 600.000
	Dokumentasi	2	paket	Rp 500.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi	2	paket	Rp 400.000	Rp 800.000
9	LOKAKARYA EVALUASI RPKPS	1	KGT	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Fotocopy Bahan	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	ATK	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	Konsumsi	1	paket	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
	Transportasi Panitia	10	org	Rp 100.000	Rp 1.000.000
	Dokumentasi	1	paket	Rp 300.000	Rp 300.000
	Biaya Sewa Tempat	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
10	CETAK DOKUMEN RPKPS	44	MK	Rp 100.000	Rp 4.400.000
	Fotocopy Bahan	44	paket	Rp 60.000	Rp 2.640.000
	ATK	1	paket	Rp 60.000	Rp 60.000
	Biaya Cetak	1	paket	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
11	PELATIHAN METODOLOGI PENELITIAN ILMU POLITIK	1	PAKET	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	Fotocopy Bahan	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	ATK	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	Konsumsi	1	paket	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000

	Transportasi Panitia	10	org	Rp 100.000	Rp 1.000.000
	Honor Narasumber	2	org	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
	Dokumentasi	1	paket	Rp 300.000	Rp 300.000
12	PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK	1	KGT	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Biaya Cetak	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000
	ATK	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	Fotocopy Bahan	1	paket	Rp 250.000	Rp 250.000
	JUMLAH				Rp 55.400.000

Mekanisme Perencanaan Program Magister Ilmu Politik dilakukan melalui Rapat Program Magister yang dihadiri oleh seluruh sivitas akademika baik di Program Magister Ilmu Politik maupun Jurusan Ilmu Politik. Mekanisme ini dilakukan agar terjadi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan. Pelaksanaan Rapat dilakukan secara periodik, untuk Perencanaan Jangka Panjang dilakukan Perubahan Visi Misi dan Kurikulum; Perencanaan Jangka Menengah dilakukan setiap masa berakhirnya Renstra, sedangkan Perencanaan Jangka pendek dilakukan setiap akhir tahun dan awal semester. Memang tidak semua program kerja yang diusulkan ke fakultas dapat diterima karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun, untuk menetapkan program kerja tersebut, pihak fakultas tetap berkoordinasi dengan Koordinator Program Magister dan menetapkannya sesuai perencanaan berdasarkan skala prioritas.

Organizing (Pengorganisasian) :

Dalam mengorganisasikan Program Magister Ilmu Politik, koordinator program menerapkan **prinsip kolegal dan desentralisasi**.

Prinsip kolegal artinya segala urusan dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk *Team Work* yang dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota yang berasal dari kalangan dosen Program Magister Ilmu Politik. Pembentukan *teamwork* dilakukan dan disepakati dalam Rapat Program. Oleh karena itu setiap Dosen Program Magister Ilmu Politik memiliki peluang dan tanggung jawab yang sama untuk diberi tugas menjalankan Program/Kegiatan. Dalam *Team Work* ini Koordinator Program Magister bertindak sebagai ketua dan sekaligus sebagai supervisor dari semua *teamwork* yang dibentuk untuk menjalankan program kerja dan aktifitas Prodi.

Dalam urusan akademik misalnya, Koordinator Program Magister Ilmu Politik menentukan *teamwork* dosen penanggung jawab mata kuliah, menetapkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Prodi, menetapkan pembimbing dan penguji Ujian Tesis.

Dalam urusan sumber daya dan keuangan, Koordinator Program Magister Ilmu Politik menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program magister dan sekaligus besaran anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Program Magister Ilmu Politik.

Dalam urusan kemahasiswaan dan alumni, Koordinator Program Magister Ilmu Politik

menetapkan Tim seleksi penerimaan mahasiswa, menetapkan kuota mahasiswa yang diterima serta menetapkan Tim *tracer studies* kepada alumni.

Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Program Magister Ilmu Politik menerapkan prinsip desentralisasi dimana masing-masing *Teamwork* diberi kewenangan dengan otonomi terbatas untuk menjalankan tugas. Otonomi terbatas artinya setiap tim diberi keleluasaan mencari ide sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan namun tetap berpedoman pada kesepakatan dan mandat dalam Rapat Program Magister Ilmu Politik. Di akhir kegiatan atau program Koordinator Program Magister Ilmu Politik meminta laporan kepada masing-masing tim yang mendapat tugas dan sekaligus memimpin rapat evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.

Staffing (Pengembangan Staf),

Pengembangan staf di dalam Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya meliputi dua kegiatan, yakni (1) Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan; (2) Pengembangan kapasitas mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(1) **Dalam proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan**, kewenangan Program Magister Ilmu Politik pada prinsipnya bersifat semi otonom, artinya Program Magister Ilmu Politik dapat menetapkan formasi dan kriteria dosen atau tenaga kependidikan yang dibutuhkan oleh Program Magister Ilmu Politik dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berlaku di tingkat fakultas maupun universitas.

Dalam hal rekrutmen dosen/tenaga kependidikan ini, Koordinator Program Magister Ilmu Politik memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, menyeleksi dan menetapkan calon dosen atau tendik yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan yang dibuat dalam Rapat Program Studi. Kewenangan ini berlaku untuk rekrutmen Dosen Tetap maupun Dosen Tidak Tetap (Dosen Kontrak) dan Tenaga Kependidikan. Setelah Koordinator Program menetapkan pilihan tersebut, tahap selanjutnya adalah mengusulkan kepada Fakultas dan Universitas untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

(2) **Dalam Pengembangan Kapasitas Mutu Dosen/Tenaga Kependidikan**; Program Magister Ilmu Politik membuat dua kebijakan, yaitu :

(a) *Open Performance Access (OPA)*; bahwa Koordinator Program selalu mendorong dan membuka kesempatan kepada semua dosen Program Magister Ilmu Politik untuk mengikuti berbagai forum seminar, *workshop* dan berkompetisi di dalam hibah-hibah penelitian serta publikasi karya ilmiah. Dalam kebijakan ini, Koordinator Program juga mendorong dosen tetap sesegara mungkin melanjutkan studi ke tingkat doctoral;

(b) *Supporting Competence Program*; yakni kebijakan peningkatan kompetensi dosen dan tendik dengan mengalokasikan dana Program Magister Ilmu Politik untuk menyelenggarakan kegiatan *workshop* yang diperuntukkan bagi para dosen Program Magister Ilmu Politik, misalnya *workshop* metodologi penelitian, *workshop* penulisan buku ajar, *workshop* penyusunan kurikulum dan RPS atau *workshop* penulisan jurnal internasional. Dalam kaitan ini Koordinator Program secara terstruktur dan kontinyu mengalokasikan dana Program Magister Ilmu Politik untuk peningkatan kompetensi ini. Bahkan dukungan secara personal kepada dosen yang hendak mengikuti pelatihan/*workshop* di luar Universitas jika kegiatan yang diikuti tersebut dianggap strategis bagi pengembangan kelembagaan prodi; misalnya menugaskan seorang atau beberapa dosen mengikuti Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah di Universitas Negeri Malang pada Tahun 2016; mengutus dosen untuk mengikuti pelatihan sertifikasi penyuluh anti korupsi bagi dosen mata kuliah terkait.

Begitu pula dalam rekrutmen staf kependidikan, Koordinator Program Magister Ilmu Politik juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi staf yang dibutuhkan untuk urusan kesekretariatan, namun kewenangan untuk penempatan staf kependidikan ini terletak pada kebijakan Fakultas ataupun Universitas. Dalam hal

peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan, Koordinator Program memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar staf tendik tersebut mengikuti pelatihan atau *workshop* terkait tugas kesekretariatan, misalnya pelatihan ICT, pelatihan penyusunan rencana dan laporan keuangan dan lain-lain

Controlling (Pengawasan)

Sistem Pengawasan dalam Program Magister Ilmu Politik dilakukan berlapis-lapis. Pengawasan tingkat pertama atau lapis pertama dilakukan secara intern oleh Koordinator Program Magister Ilmu Politik, baik dalam Urusan Akademik, Urusan Keuangan dan Sumber Daya serta Urusan Kemahasiswaan. Pengawasan intern lapis pertama dilakukan melalui rapat program studi yang dipimpin langsung oleh Koordinator Program serta dihadiri oleh para dosen baik dosen tetap dan tidak tetap serta dosen luar biasa.

Dalam Urusan Akademik, pengawasan dilakukan secara langsung oleh Koordinator Program terhadap proses pembelajaran yang meliputi monitoring terhadap Kehadiran Dosen Mengajar, ketersediaan RPS, Diktat /*Handout* Kuliah, dan ketersediaan sumber bacaan/referensi. Dalam pengawasan urusan akademik ini juga termasuk di dalamnya dilakukan pengawasan terhadap urusan kemahasiswaan.

Sedangkan pengawasan terhadap Kinerja Dosen dalam Proses Pembelajaran (PBM) pada dasarnya dilakukan melalui monitoring terhadap Map Laporan kehadiran Dosen Mengajar yang berisi materi perkuliahan. Namun dalam pengawasan ini Koordinator Program seringkali juga melakukan penjangkauan input dari mahasiswa baik secara formal melalui Lembar Evaluasi PBM yang disediakan oleh BAPEM/GKM, maupun secara informal dengan cara menjangkauan informasi dari mahasiswa melalui group media sosial *Whatsapp*. Informasi yang dijangkauan diantaranya tentang materi perkuliahan, kompetensi dosen dalam penguasaan materi dan metode mengajar sampai pada etika dosen dan kinerja kehadiran dosen mengajar.

Pengawasan terhadap Urusan Keuangan dan Sumber Daya di Program Magister Ilmu Politik dilakukan secara terbuka melalui Rapat Program Studi. Dalam pengawasan ini Koordinator Program selain menyampaikan jumlah alokasi dana yang tersedia, juga melakukan meminta laporan anggaran belanja yang telah digunakan. Daftar inventaris barang dan anggaran yang telah dibelanjakan terdokumentasi di dalam Laporan Keuangan yang dibuat oleh staf Tenaga Kependidikan/Sekretariat dan dilaporkan secara berkala kepada Koordinator Program dan disampaikan dalam Rapat Program.

Pengawasan lapis kedua dilakukan secara kelembagaan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas. AMI-LP3M ini merupakan lembaga pengawasan di tingkat universitas yang dilakukan secara periodik setiap tahun terhadap semua Prodi di lingkungan universitas. Pelaksanaan AMI biasanya dilakukan pada awal tahun kalender, yang terakhir dilakukan terhadap Program Magister Ilmu Politik adalah Audit Mutu Kurikulum pada tanggal 21 Maret 2018. Pemeriksaan dan penilaian audit mutu Program Magister ini dilakukan terhadap segala aktifitas Program Studi tahun sebelumnya dan tiga tahun sebelumnya.

Dalam monitoring yang dilakukan oleh AMI, Koordinator Program Magister Ilmu Politik bertindak selaku juru bicara selama pelaksanaan audit serta didampingi oleh Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Ilmu Politik, dikarenakan ruang lingkup kerja GKM selain meliputi Program Sarjana juga Program Magister.

Selain itu, pengawasan lapis kedua juga dilakukan oleh (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen Program Magister Ilmu Politik baik yang berbasis perorangan maupun yang berbasis prodi. Pengawasan (monitoring dan evaluasi) dalam

urusan ini dilakukan secara terjadwal. Monitoring pertama dilakukan pada saat proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sedang berlangsung baik ke lokasi maupun terjadwal di dalam kampus. Monitoring kedua LPPM dilakukan pada akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada saat dilakukan dua monitoring tersebut para dosen yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat membawa dan menunjukkan bukti Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan, Draft Artikel Ilmiah dan bukti-bukti lain sebagaimana dituangkan dalam proposal.

Directing (Pengarahan)

Fungsi Pengarahan (*directing*) ini dilakukan terkait dengan pelaksanaan program kerja agar capaiannya sesuai dengan target. Pengarahan ini dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi pengarahan (*directing*) Program Magister Ilmu Politik dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Pengarahan yang bersifat vertikal dilakukan hanya dalam urusan administrasi mulai dari tingkat Universitas, Fakultas hingga Jurusan. Antara Jurusan Ilmu Politik dan Program Magister Ilmu Politik bukan bersifat pengarahan tetapi koordinasi. Sedangkan pengarahan horisontal dilakukan secara kolegal antara para pengelola prodi Ilmu Politik dan Program Magister Ilmu Politik bersama-sama dengan seluruh civitas akademik yang ada di Jurusan Ilmu Politik (diantaranya dengan Laboratorium Ilmu Politik, Pengelola Jurnal Analisis Politik, Jurnal Islam dan Demokrasi serta dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Ilmu Politik.

Proses pengarahan horisontal dilakukan dalam Rapat Jurusan Ilmu Politik bersama Program Magister Ilmu Politik yang dilakukan minimal sebulan sekali dengan tetap melibatkan seluruh warga jurusan.

Representation (Keterwakilan), Pelaksanaan fungsi representasi di Program Magister Ilmu Politik dilakukan terhadap dua hal, yakni (1) Keterwakilan dalam Senat Fakultas; (2) Keterwakilan dalam pelaksanaan tugas kewenangan koordinator Program Magister Ilmu Politik di luar lembaga Universitas. Untuk keterwakilan dalam Senat Fakultas, posisi dan peran Koordinator Program merupakan *ex-officio* keterwakilan Program Magister Ilmu Politik di Senat Fakultas. Sedangkan keterwakilan di luar lembaga dapat diberikan tugas kepada Dosen sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan. Keterwakilan diluar lembaga semacam ini misalnya dilakukan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, atau menjadi narasumber atau instruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah.

Budgeting (penganggaran). Pelaksanaan fungsi penganggaran di Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya terintegrasi dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran lembaga atau Universitas Andalas yang dituangkan ke dalam RKA-KL. (Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga). Fungsi penganggaran di Program Magister Ilmu Politik dilakukan mulai dari (1) tahap perencanaan (penyusunan) program kerja, (2) tahap pelaksanaan program, dan (3) tahap pelaporan anggaran program kerja.

Dalam tahap penyusunan program, Program Magister Ilmu Politik dapat mengusulkan dan merencanakan program kerja beserta anggarannya. Dalam tahapan ini, program dan anggaran disusun berdasarkan masukan dari dosen-dosen yang dilakukan melalui mekanisme Rapat Program Magister Ilmu Politik. Semua anggaran yang diusulkan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Fakultas dan dituangkan menjadi RKAKL Universitas Andalas.

Dalam tahapan pelaksanaan anggaran, fungsi ini dilaksanakan oleh *Teamwork* yang dibentuk dan disepakati melalui Rapat Program Magister sesuai dengan jenis program kerja

yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, *teamwork* mendapatkan supervisi dan pencairan dana dari Fakultas.

Dalam tahap pelaporan anggaran, Program Magister Ilmu Politik melakukannya dengan melibatkan staf sekretariat dan tenaga kependidikan yang ada di Jurusan Ilmu Politik. Hal ini dilakukan selain untuk mengsinkronisasikan eksekusi anggaran dengan anggaran yang ada di Jurusan Ilmu Politik sebagai unit yang menaungi Program Magister Ilmu Politik, juga dilakukan untuk keseragaman prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku, bahwa fungsi pelaporan anggaran dilakukan oleh Fakultas.

2.4 Penjaminan Mutu

Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Magister, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.

Sistem penjaminan mutu Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya dilakukan oleh unit penjaminan mutu yang ada di FISIP. Unit penjaminan mutu di FISIP Unand dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) yang berfungsi untuk membantu pimpinan fakultas dalam melaksanakan penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, layanan akademik, serta menyusun manual mutu bagi penyelenggaraan proses pembelajaran.

BAPEM dibentuk berdasarkan STATUTA Universitas Andalas dan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

Adapun Tugas BAPEM Fakultas adalah: Membuat turunan dari Kebijakan Mutu Internal universitas menjadi Kebijakan Mutu Internal fakultas, dari Standar Mutu Internal universitas menjadi Standar Mutu Internal fakultas, dari Peraturan Akademik universitas menjadi Peraturan Akademik fakultas, dari Manual Mutu universitas menjadi Manual Mutu fakultas yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan yang dikelolanya.

- a. Membuat Prosedur Mutu yang berlaku di lingkungan fakultas.
- b. Membuat formulir layanan administrasi akademik, administrasi dan keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana.
- c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada sivitas akademika dalam lingkungan fakultas
- d. Pelatihan dan konsultasi kepada GKM dan civitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu;
- e. Membahas dan menindak lanjuti PTK pada program studi dan fakultas.
- f. Pendampingan akreditasi program studi D1/S1/S2/S3/profesi
- g. Bekerjasama dengan tim pendampingan akreditasi dari universitas
- h. Mengkoordinasikan hasil evaluasi proses pembelajaran dengan GKM
- i. Menyusun *roadmap* GKM per periode kepemimpinan

Berikut ini beberapa hal yang telah dilakukan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) di FISIP:

1. Pada tingkat fakultas telah dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) dengan SK dari Dekan. Badan ini membantu pimpinan fakultas dalam pelaksanaan dan pengendalian penjaminan mutu pada tingkat fakultas.

2. Pada tingkat jurusan/program studi telah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan SK Dekan. Badan ini membantu pimpinan jurusan/program studi dalam pelaksanaan dan pengendalian penjaminan mutu pada tingkat jurusan/program studi. Tugas GKM adalah
 - a. Merumuskan Spesifikasi Program Studi, Profil Lulusan dan kompetensi lulusan
 - b. Menyusun Manual Prosedur dan Formulir yang relevan dengan program studi;
 - c. Mengevaluasi ketersediaan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) setiap mata kuliah dan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan oleh universitas ataupun fakultas
 - d. Mengevaluasi RPS dan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa baik pada laman *website* atau *i-Learning*
 - e. Mengevaluasi kelengkapan dan jenis bahan ajar setiap mata kuliah
 - f. Mengevaluasi kesesuaian RPS dengan pelaksanaan perkuliahan
 - g. Menganalisis hasil evaluasi proses pembelajaran setiap dosen
 - h. Mengevaluasi tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan
3. BAPEM fakultas telah dilengkapi dengan sarana ruangan kantor, mobiler dan komputer.
4. GKM berkantor di kantor jurusan/program dan telah diberikan satu unit almari untuk menyimpan dokumen-dokumen.
5. Dokumen mutu yang telah dimiliki sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultas dan jurusan adalah:
 - Kebijakan Mutu Akademis FISIP.
 - Standar Mutu Internal FISIP.
 - Manual Mutu FISIP.
 - Manual Prosedur FISIP.
 - Spesifikasi seluruh program studi yang ada.
6. Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Telah dilakukan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu antara pimpinan fakultas dengan BAPEM fakultas dan GKM.
8. Telah diadakan sosialisasi penjaminan mutu.
9. Satu orang anggota BAPEM FISIP telah mempelajari pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Jakarta tahun 2011.

Sistem Penjaminan Mutu pada Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya juga mengacu kepada sistem yang telah ditetapkan pada tingkat Universitas Andalas. Adapun unsur pelaksana penjaminan mutu pada Program Magister Ilmu Politik melekat pada GKM (Gugus Kendali Mutu) yang berada di Jurusan Ilmu Politik sebagai unit atau lembaga yang menaungi Program Magister Ilmu Politik. Oleh karena tugas pokok atau tanggungjawab penjaminan mutu berada pada pimpinan Program Studi, maka unsur pimpinan Prodi yang terlibat dalam tugas penjaminan mutu Program Magister dilakukan oleh Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang dibantu oleh dua orang Dosen sebagai anggota.

2.5 Umpan Balik

Apakah program Magister telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut:

Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, Program Magister Ilmu Politik telah melakukan beberapa bentuk evaluasi dan kajian terhadap proses pembelajaran, baik oleh Dosen, Mahasiswa, Alumni maupun Pengguna (User).

Evaluasi dan umpan balik proses pembelajaran oleh Dosen dilakukan melalui Rapat Program Magister; Sedangkan evaluasi dan umpan balik proses pembelajaran oleh mahasiswa dan alumni dilakukan diantaranya melalui (1) *tracer studies*; (2) evaluasi pembelajaran di akhir perkuliahan; (3) *polling* insidental melalui aplikasi *google form*.

Sedangkan kajian dan evaluasi proses pembelajaran oleh Pengguna dilakukan secara implisit pada saat dilakukan Lokakarya Penyusunan Kurikulum yang menghadirkan *stakeholder* atau pengguna (*users*).

Secara ringkas hasil kajian tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

Umpan Balik dari	Isi Umpan Balik	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
Dosen	1. Mahasiswa banyak yang tidak membaca bahan kuliah yang sudah diberikan; 2. Mahasiswa yang aktif selama berlangsungnya perkuliahan paling banyak lima sampai tujuh orang; 3. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam memahami literatur yang diberikan;	1. Memberi tugas <i>resume</i> dari bahan bacaan sesuai dengan materi perkuliahan; 2. Memperbanyak penggunaan metode pembelajaran SCL melalui teknik <i>discovery learning</i> dan <i>collaborative learning</i> ; 3. Memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa tentang cara memahami suatu bahan bacaan;
Mahasiswa	1. Beberapa mata kuliah tidak membagikan RPS pada awal perkuliahan; 2. Ketidakesesuaian antara materi yang diberikan oleh dosen dengan SAP/Silabus; 3. Kehadiran dosen tidak sesuai dengan jadwal kuliah selama satu semester; 4. Dosen tidak memberikan <i>handout</i> , <i>fotocopy</i> bahan setiap perkuliahan;	1. Mewajibkan dosen membagikan SAP/RPS pada awal perkuliahan atau mendownload melalui <i>i-Learn</i> . 2. Mewajibkan dosen untuk konsisten mematuhi SAP yang telah disusun; 3. Setiap dosen dihimbau dan diperingatkan untuk menepati kehadiran sesuai jadwal kuliah; 4. Meminta dosen membuat <i>handout/modul</i> pembelajaran / <i>reading material</i>
Alumni	1. Belum adanya mata kuliah yang berorientasi pada praktik lapangan. 2. Keterbatasan bahan bacaan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas mahasiswa.	1. Beberapa dosen pengampu mata kuliah disarankan untuk mengadakan praktik kuliah lapangan. 2. Pengelola program magister menyediakan fasilitas <i>reading room</i> dan akses jurnal-jurnal gratis untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa.

Pengguna lulusan	Lemahnya kemampuan berbahasa Inggris para lulusan;	• Dibentuk <i>English Club</i> yang diselenggarakan setiap hari Kamis jam 14.00 – 16.30 di reading room Prodi; • Dilakukan <i>English Day</i> setiap Hari Kamis jam 14.00-16.30 yang melibatkan Dosen dan Mahasiswa; • Memberikan literatur berbahasa Inggris dan mahasiswa diminta mempresentasikan hasil review bacaan tersebut.
------------------	--	--

2.6 .Keberlanjutan

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) Program Magister ini, khususnya dalam hal:

a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:

Upaya yang dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa terhadap Program Magister Ilmu Politik antara lain melakukan *road show* ke Pemerintah daerah kab/kota serta partai politik di Sumatera Barat seperti Mentawai dan bahkan ke daerah tetangga seperti Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Padang Sidempuan.

Dosen pengajar Program Magister Ilmu Politik juga sering menulis di media massa lokal dan media massa nasional. Selain itu, Dosen Ilmu politik juga sering menjadi narasumber di berbagai seminar nasional dan internasional, menjadi sumber berita bagi media massa lokal dengan opini yang diberikan terhadap isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam beberapa fenomena politik yang sedang terjadi di masyarakat, Program Magister Ilmu Politik ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik secara umum mengundang media massa bahkan melakukan kerjasama dalam kegiatan seperti kegiatan debat kandidat calon walikota Padang yang bekerjasama dengan TV lokal. Hal ini adalah salah satu upaya untuk mengenalkan Program Magister Ilmu Politik kepada masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan untuk menarik animo calon mahasiswa adalah dengan menyebarkan *leaflet* tentang Program Magister Ilmu Politik kepada pegawai-pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga iklan kepada media massa. Selanjutnya Program Magister Ilmu Politik juga mempunyai *website* yang tergabung kedalam program S1 ilmu politik, yaitu: <http://pascasarjana.fisip.unand.ac.id> yang berguna untuk mengenalkan Program Magister kepada calon mahasiswa dan masyarakat. Pada *website* ini ditampilkan direktori dosen pengajar, informasi Program Magister, kurikulum, prosedur pendaftaran, proses belajar mengajar, seminar dan info kegiatan Program Magister.

Program Magister Ilmu Politik juga dari waktu ke waktu terus menerus memperbaiki metode pembelajaran yang berbasis kepada mahasiswa dengan menerapkan metode *Student centered learning* (SCL). Metode pembelajaran ini memberi ruang yang lebih besar kepada dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan studi untuk berinovasi dan memahami materi perkuliahan. Metode pembelajaran SCL menuntut keaktifan mahasiswa, sehingga upaya

mencapai kompetensi yang bersifat *softskill* dapat tercapai.

b. Upaya peningkatan mutu manajemen:

Untuk menjamin keberlanjutan Program Magister Ilmu Politik maka upaya peningkatan mutu manajemen yang dilakukan Koordinator Program selaku pimpinan adalah (1) memperbaiki renstra, program kerja tahunan dan dokumen SOP; (2) memperbaiki administrasi akademik dan kualitas pelayanan baik kepada Dosen maupun mahasiswa; (3) memperbaiki kualitas pembelajaran melalui evaluasi berkala; (4) mendorong dosen untuk senantiasa mengikuti seminar, *workshop*, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah di jurnal terakreditasi; (5) melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, inventaris dan fasilitas infrastruktur yang tersedia di Program Magister Ilmu Politik;

Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: bukti pelatihan, Upaya meningkatkan mutu lulusan salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif yang dicapai oleh mahasiswa. Selain itu, evaluasi terhadap proses belajar mengajar pada tiap akhir semester menjadi indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Memberikan pelatihan metode penelitian diluar mata kuliah, dengan penggunaan perangkat lunak di Komputer.

d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:

Program Magister Ilmu Politik telah melakukan beberapa kerjasama sebagai upaya peningkatan wawasan mahasiswa dan dosen. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- 1) kerjasama dengan TIRI *Making Integrity Work-Indonesia* dalam hal pendidikan Integritas dan Anti Korupsi, yang berujung pada penambahan kurikulum baik di Program Magister Ilmu Politik.
- 2) Kerjasama dengan KPU RI dalam rangka sosialisasi dan diseminasi Pemilu 2014 bagi pemilih pemula. Kerjasama dengan Program *Sains Politik, School of History, Politics and strategy*, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) University Kebangsaan Malaysia dalam bentuk *Visiting Professor* ke Program Magister Ilmu Politik.
- 3) Kerjasama sebagai Mitra Bestari untuk Jurnal Analisa Politik dengan beberapa professor seperti Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (IIP Jakarta dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri), Prof. Dr. Nidzamuddin Sulaiman (*Centre of Ethnic Studies*, UKM), Dr. Leo Agustino (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten), dan Dr. Zulfan Tadjuddin (University of Western Australia).
- 4) kerjasama juga dilakukan di daerah, yaitu dengan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, dalam kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih serta debat calon kandidat kepala daerah yang bekerjasama dengan TV lokal.
- 5) Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat mencegah tindakan korupsi.
- 6) Kerjasama dengan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) untuk melaksanakan kegiatan *Lecture Series* dan *Joint Research*.

e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif:

Patut diakui, dana hibah yang diperoleh masih bersifat individual, misalnya hibah penelitian yang melibatkan dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik yang tentunya ini membawa dampak kepada penyelenggaraan pembelajaran di program studi. Ke depan, Program Magister Ilmu Politik ini berusaha memperoleh dana hibah dari pihak lain sehingga membawa manfaat bagi proses akademik di program studi ini.

STANDAR 3

KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

3.1 Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: Kebijakan rekrutmen calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.

Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi ini.

Sejak diterimanya surat keputusan pendirian Program Magister Ilmu Politik ini pada Oktober 2012, maka pimpinan fakultas bersama dengan pimpinan jurusan/program studi melakukan rapat dan memutuskan agar pengelola Program Magister Ilmu Politik segera menerima calon mahasiswa baru Program Magister Ilmu Politik. Atas dasar itu, maka Program Magister Ilmu Politik mulai menerima calon mahasiswa baru terhitung semester genap 2012/2013.

Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, maka pengelola Program Magister Ilmu Politik menetapkan beberapa kriteria di antaranya:

1. Kelengkapan administrasi
2. Mengikuti Ujian: Ujian TPA di Pasca sarjana Unand, TOEFL di UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas, dan Wawancara di Fakultas masing-masing.
3. Skor TOEFL yang diharuskan untuk kelulusan adalah minimal 450.
4. IPK Minimum 2,75 atau $< 2,75$ jika memiliki pengalaman kerja di atas 5 tahun
5. Lulusan S1 berasal dari institusi perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B.

Sistem pengambilan keputusan terkait dengan calon mahasiswa baru tergabung ke dalam prosedur penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister Ilmu Politik. Penerimaan mahasiswa baru untuk Program Magister Ilmu Politik ini dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas. Adapun prosedur pelaksanaan seleksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumuman pendaftaran
 - b. Sebelum mendaftar *online*, calon mahasiswa harus berkonsultasi dengan Koordinator program studi untuk dapat mempertegas ketersediaan bidang kajian ilmu yang ingin didalami. Bila semua sudah dipenuhi, baru melakukan Prosedur Pendaftaran *online*.
 - c. Calon mahasiswa melakukan pembelian PIN Pendaftaran *online* melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000
 - d. Berkas Pendaftaran diupload/unggah pada <http://umb.pasca.unand.ac.id> dan membawa berkas asli pendaftaran tersebut pada saat ujian wawancara. Persyaratan dan kelengkapan berkas tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 (Ijazah Sarjana) yang dilegalisir
 - 2) Pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter
 - 4) Formulir pendaftaran
 - 5) Melampirkan bukti pendaftaran online calon pendaftar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN)
 - 6) Surat rekomendasi akademis dari dua orang untuk calon pendaftar S2
 - 7) Melampirkan bukti pembelian PIN pendaftaran
 - e. Melampirkan bukti pendaftaran *online* calon pendaftar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN)
 - f. Calon mahasiswa melaksanakan ujian seleksi tertulis masuk Pascasarjana Unand
-
- g. Calon Mahasiswa ikut seleksi Ujian Wawancara/Ujian Kompetensi di Fakultas dan Program Studi masing-masing, dengan membawa kelengkapan berkas pendaftaran dan sertakan dengan dokumen aslinya.
 - h. Pengolahan data hasil ujian (dengan komputerisasi)
 - i. Penentuan kelulusan
 - j. Pengumuman hasil kelulusan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana
 - k. Calon mahasiswa yang telah lulus ujian seleksi melakukan pendaftaran registrasi dan pembayaran uang SPP

3.2 Profil Mahasiswa dan Lulusan

3.2.1 Tuliskan data **seluruh** mahasiswa dan lulusannya dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Total Mahasiswa		Jumlah Lulusan		IPK ⁽³⁾ Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer			Jumlah Mahasiswa WNA
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Min	Rata2	Mak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(2012) TS-4	15	12	12	8	4	0	4	A1=0	0	0	B1=0	0	0
(2013) TS-3	15	7	7	7	0	7	4	A2=0	0	0	B2=0	0	0
(2014) TS-2	15	7	7	7	0	14	4	A3=0	1	3,49	B3=3,49	3,49	0
(2015) TS-1	15	11	11	11	0	25	3	A4=1	1	3,68	B4=3,69	3,69	0
(2016) TS ⁽¹⁾	15	6	6	6	0	30	0	A5=5	1	3,37	B5=3,50	3,50	0
Jumlah	75	43	43	39	4	76	15	6	3				
Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir =3,5													
Dihitung dengan rumus : $(A1 \times B1 + A2 \times B2 + A3 \times 3 + A4 \times B4 + A5 \times B5) / (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)$													
Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = 3,5 tahun													

Catatan:

⁽¹⁾TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang

⁽²⁾Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

⁽³⁾Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum

3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah).

No.	Nama Mahasiswa	Jenis Prestasi	Kegiatan, Waktu, dan Tempat	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wein Arifin	Penulis buku “Perilaku Memilih dalam Pemilu”	2016	Nasional
2	Wira Hospita	Pemakalah dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke- 3	Konferensi Nasional, 5-8 September 2016 di Bukittinggi	Nasional
3	Candra Kirana	Peserta Forum Rembuk Nasional HIMA Pascasarjana Indonesia	Jakarta, 25-29 Mei 2016	Nasional
4	Candra Kirana	Peserta Diskusi Publik Politik Cerdas Berintegritas	Padang, 2017	Nasional
5	Harpinsyah	Peserta seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas	Semnas II FISIP Unand, 28-29 September 2016	Nasional
6	Wira Hospita	Peserta Konsultasi Publik Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Pembaharuan Desain Penegakan Hukum Pemilu	Padang, 20 Juni 2016	Nasional
7	Canang Bagus Prahara Umpu	Peserta Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia	Cisarua, 5-7 Oktober 2015	Nasional
8	Wein Arifin	Peserta dalam Seminar sehari “Penguatan Hak-Hak Politik Kaum Perempuan di Aras Lokal”	Seminar, Jambi 27 January 2016	Nasional
9	Wein Arifin	Peserta dalam Seminar Sehari “Membangun akuntabilitas Partai Politik	Seminar, Jambi 17 Juni 2015	Nasional

10	Ilham Fauzi	Menulis Essay “ Buku dan Prestasi” dalam buku Kita dan Indonesia Harus Melangkah Sendiri	Antologi Essay Remaja Sumatera Barat Tahun 2015, Diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Wilayah
11	Harpinsyah	Narasumber dalam Pengabdian Masyarakat tentang Permendagri No 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa	Muaro Bungo, 5-6 September 2017	Wilayah
12	Candra Kirana	Peserta Sekolah Pasar Modal Syariah 2017	Pariaman, 6 April 2017	Wilayah
13	Wein Arifin	Menulis di Kolom Opini Harian Jambi To Day: “Voter Turnout dan Demokratisasi”	13 January 2015	Wilayah
14	Wein Arifin	Menulis di Kolom Opini Harian Jambi Independent: “Politik Hukum Kampanye Pilkada”	27 September 2015	Wilayah
15	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online www.metrojambi.com : Pelembagaan Partai Politik	24 February 2015	Wilayah
16	Canang Bagus Prahara Umpu	Pemateri Bimtek Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITUNG)	Painan, 14 Oktober 2014	Wilayah
17	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online www.metrojambi.com : “Prilaku Memih dalam Pilkada”	05 Mei 2015	Wilayah
18	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online www.metrojambi.com : “Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasa Perpu Pilkada)”	19 Januari 2015	Wilayah
19	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online www.metrojambi.com : “Dilema Sistem Presidensial-Multipartai”	2 februari 2015	Wilayah

20	Nofal Wiska	Menulis di Kolom Opini Harian Padang Ekspres: “Anomali Caleg di Atas Panggung”	15 Februari 2014	Wilayah
21	Zailendra	Narasumber dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017	Payakumbuh, 27 Januari 2017	Lokal
22	Canang Bagus Prahara Umpu	Pemateri Bimtek SITUNG KPU	Painan, 22 Desember 2015	Lokal
23	Candra Kirana	Peserta Kuliah Umum Membangun Demokrasi Berkeadaban Sesuai dengan Sosiokultur Masyarakat	Padang, 24 Oktober 2016	Lokal
24	Candra Kirana	Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif di FISIP Universitas Andalas	Padang, 24 Oktober 2016	Lokal
25	Wira Hospita	Peserta Kuliah Umum Bersama H.M. Jusuf Kalla dan Prof. Bagir Manan di FISIP Universitas Andalas	Padang, 5 September 2016	Lokal

3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa pada lima tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan pada Tahun					Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Bukan Transfer)
	TS-4 2012	TS-3 2013	TS-2 2014	TS-1 2015	TS 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TS-4 2012	(a)=9	9	9	8	8	(c)=1
TS-3 2013		7	7	7	5	2
TS-2 2014			7	7	7	0
TS-1 2015				(d)=11	(e) =11	(f) =0
TS 2016					6	

Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas.

3.3 Evaluasi Lulusan

3.3.1 Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan

Adakah studi pelacakan (*tracer study*) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna?

tidak ada
✓ ada

Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini.

Tracer study dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan beberapa metode sebagai berikut.

1. Melakukan survei terhadap pengguna lulusan dengan wawancara terstruktur;
2. Melakukan survei melalui email;
3. Survei secara online dengan menggunakan metode *survey online* (link website : <https://tinyurl.com/tracerS2MIP>) yang dikirim melalui *whatsapp*, *facebook*, dan ditampilkan di web Program Magister Ilmu Politik. Metode *survey online* dengan menggunakan *website* diharapkan dapat lebih mempercepat proses pengumpulan data. Setelah data kuesioner terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Ada beberapa manfaat yang dapat digunakan dari hasil survey ini diantaranya dapat membantu mahasiswa lewat jejaring alumni, dan mendapatkan masukan dari alumni untuk perbaikan kurikulum jurusan;
4. Survei dengan menggunakan surat melalui Pos.

Pihak program studi menyiapkan daftar pertanyaan yang berisikan 9 komponen, yaitu:

1. Integritas (etika dan moral)
2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)
3. Keluasan wawasan antar disiplin ilmu
4. Kepemimpinan
5. Kerjasama dalam tim
6. Bahasa asing
7. Komunikasi
8. Penggunaan teknologi informasi
9. Pengembangan diri

Dari hasil *tracer study* menunjukkan bahwa seluruh alumni telah bekerja dengan mayoritas menjadi dosen di perguruan tinggi baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, kemudian menjadi komisioner KPU dan pegawai pemerintah daerah. Alumni tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan 100% pekerjaan alumni terkait dengan bidang ilmu yang mereka pelajari di Magister Ilmu Politik. Alumni juga memberikan feed back apa untuk perbaikan kurikulum program Magister.

Dari hasil *tracer study* terhadap pengguna dan lulusan juga ditemukan persoalan seperti masih rendahnya kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Begitu juga dengan lamanya masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, Program Magister Ilmu Politik merespons hasil *tracer study* sebagai berikut.

1. Program Magister Ilmu Politik menyediakan matakuliah bahasa Inggris non SKS. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa agar sesuai dengan tuntutan kerja. Selain itu, program studi merancang kelompok berbahasa Inggris (*English club*), menetapkan *English day* dengan mewajibkan mahasiswa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Sementara, untuk dosen pengampu matakuliah dianjurkan untuk meningkatkan referensi dan bahan ajar dengan menggunakan bahasa Inggris.
2. Program Magister Ilmu Politik menyediakan pembekalan bagi wisudawan berupa pelatihan tentang Integritas dan Anti Korupsi serta tentang Akhlak Kesarjanaan sebagai respons untuk menjaga komitmen lulusan program studi untuk melaksanakan nilai-nilai integritas mereka ketika memasuki dunia kerja.
3. Program Magister Ilmu Politik juga memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai bekal lulusan untuk memasuki dunia kerja di masyarakat.
4. Hasil *tracer study* juga dilakukan untuk penggalangan dana terhadap alumni, terutama untuk membangun mushola FISIP dan renovasi gedung kuliah Pascasarjana di Kampus II Jln. Situjuh Padang. Selain itu, alumni juga memberikan sumbangan buku untuk perpustakaan Pascasarjana.
5. Program Studi Magister Ilmu Politik juga memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada alumni.
6. Untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi, maka Program Magister Ilmu Politik juga membentuk jejeraing alumni berupa Keluarga Besar Alumni Magister Ilmu Politik (KBA-MIP) dan grup *Whatsapp* alumni.

3.3.2 Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut:

Nyatakan angka persentasenya(*) pada kolom yang sesuai. Jumlah responden (pengguna)= ...

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna				Pemanfaatan Hasil Pelacakan
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Integritas (etika dan moral)	80	20	0	0	<i>Tracer study</i> yang dilakukan dimanfaatkan untuk membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kerja dan upaya memperbaikinya dengan cara: 1. Program studi Magister Ilmu Politik menggunakan data ini sebagai tindak lanjut untuk memahami kompetensi yang relevan dalam dunia kerja dengan merevisi kembali kurikulum Magister Ilmu Politik yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan 3 fokus konsentrasi yaitu Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Tata Kelola Pemilu dan Politik Kebijakan. 2. Memperbaiki sistem pembelajaran dengan menggunakan format <i>I-learning</i>.
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)	80	20	0	0	
3	Keluasan wawasan antar disiplin ilmu	78	22	0	0	
4	Kepemimpinan	90	10	0	0	
5	Kerjasama dalam tim	80	20	0	0	
6	Bahasa asing	0	5	60	35	
7	Komunikasi	90	10	0	0	
8	Penggunaan teknologi informasi	75	25	0	0	
9	Pengembangan diri	87,5	12,5	0	0	
Total		(a)=735,5	(b)=164,5	(c)=0	(d)=0	

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan

(*) persentase tanggapan pihak pengguna pada peringkat = [(jumlah tanggapan pada peringkat) : (jumlah tanggapan yang ada)] x 100

3.4 Himpunan Alumni

Jelaskan apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, jelaskan jenis partisipasi (sumbangan dana, fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring) dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.

Alumni Magister Ilmu Politik tergabung kedalam ikatan alumni yang bernama Keluarga Besar Alumni Magister Ilmu Politik (KBA-MIP). KBA-MIP Unand terintegrasi dalam IKA-FISIP Unand (Ikatan Alumni tingkat Fakultas). Adapun aktifitas selama ini yang dilakukan oleh KBA-MIP adalah:

A. Bidang Akademik:

1. Memberikan input kepada Program Magister Ilmu Politik dalam melakukan revisi kurikulum.
2. Membangun Kerja sama dengan instansi tempat alumni bekerja.
3. Sumbangan Fasilitas (buku dan fasilitas sarana ibadah di FISIP serta pembangunan kampus II Pascasarjana di Jln. Situjuh Padang)

B. Bidang non-akademik, kegiatan dan kontribusi alumni meliputi:

1. Diskusi terbuka melalui aplikasi *Whatsapp* tentang isu-isu aktual terkait dengan pengembangan Program Magister Ilmu Politik ke Depan.
2. Mengundang alumni dalam kegiatan Alumni *Home Coming* untuk memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu dan mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

STANDAR 4

SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan

Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

Pengelolaan SDM (sumber daya manusia) di Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas mengacu kepada Peraturan tentang Pegawai Negeri dan Statuta Universitas Andalas berdasarkan Permendikbud No. 47 tahun 2013 yang harus melalui proses rekrutmen, penempatan, pengembangan dan pemberhentian.

Seleksi/rekrutmen :

Sistem rekrutmen dosen dan karyawan mengacu kepada sistem rekrutmen pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diatur dalam :

1. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian,
2. Peraturan Pemerintah No.98 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 (perubahan PP No. 98 tahun 2000) tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil
3. Keputusan MENPAN No.KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS dan Kepmen Diknas Nomor: 45157/A4.1/KP/2007 Pedoman Teknis Persyaratan Pengusulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Depdiknas Tahun 2005.
4. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas Pasal 98 ayat 5 menyatakan syarat diangkat menjadi dosen Unand adalah: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, c) memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi fakultas melalui pertimbangan senat fakultas, d) mempunyai moral dan integritas yang tinggi, e) memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Sementara syarat diangkat menjadi tenaga kependidikan Unand adalah: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, c) memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan, d) mempunyai moral dan integritas yang tinggi, e) memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Disamping itu Program Studi memberikan syarat tambahan yaitu minimal berpendidikan S2 dalam disiplin Ilmu Politik dengan IPK 3. Permendikbud Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Andalas.
7. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.46 tahun 2013 tentang perubahan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 2013.
9. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Walaupun begitu, sistem rekrutmen dosen di Program Magister Ilmu politik, berasal dari kalangan dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang relevan. Selain itu, seleksi terhadap sumber daya dosen ini juga dilakukan melalui permintaan khusus kepada dosen tertentu karena memiliki keahlian yang langka dan unik sesuai dengan kebutuhan pengembangan Program Magister Ilmu Politik.

Sebelum diterima sebagai PNS, calon dosen mengikuti 4 tahap seleksi yaitu:

- a) seleksi Administrasi,
- b) Tes Kemampuan Dasar (TKD),
- c) Tes Kemampuan Bidang (TKB),
- d) Tes wawancara.

Penempatan:

Penempatan, pengembangan, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Andalas.

Persyaratan untuk dosen Program Studi Magister Ilmu Politik sendiri adalah berpendidikan S3 dan tidak ada persyaratan pengalaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Karena dosen adalah dosen Jurusan Ilmu Politik yang berpendidikan S3, semua dosen telah berpengalaman mengajar dan membimbing di Program Studi Ilmu Politik S1.

Tenaga kependidikan dibagi dua yakni: tenaga kependidikan berstatus PNS dan tenaga kependidikan berstatus tenaga kontrak. Untuk tenaga kependidikan PNS, perencanaan dan rekrutmen dilakukan oleh universitas. Untuk CPNS tenaga kependidikan penempatannya diatur dan didistribusikan melalui biro kepegawaian Universitas Andalas. Penempatan ini tidak bersifat permanen, di mana tenaga kependidikan tersebut dapat dimutasikan baik dalam lingkungan fakultas maupun di lingkungan Universitas sesuai dengan kebutuhan dan aturan kepegawaian Universitas Andalas. Sedangkan fakultas menerima alokasi tenaga kependidikan dari universitas. Jurusan dan program magister menerima tenaga kependidikan dari fakultas. Rekrutmen tenaga kependidikan honorer dilakukan oleh fakultas dengan melibatkan Program Studi.

Penugasan dosen pada Program Magister Ilmu Politik sesuai dengan usulan dalam rapat program magister berdasarkan Mata kuliah yang ditawarkan tiap semester. Prosesnya dilakukan adalah melalui rapat program studi dengan melibatkan majelis dosen untuk menentukan mata kuliah yang akan diampu oleh dosen berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing. Hasil rapat penempatan dosen Program Magister Ilmu Politik selanjutnya dikirimkan ke dekan untuk dimintakan SK penempatannya pada mata kuliah yang sudah disetujui dalam rapat majelis dosen.

Pembinaan:

Pembinaan dilakukan dengan menyusun *team teaching* untuk setiap mata kuliah. Dosen baru sebagai pengajar dalam mata kuliah tersebut dibina oleh dosen yang lebih berpengalaman

untuk membantu mengajar di satu matakuliah yang relevan dengan kompetensi ilmunya. Pembinaan juga dilakukan melalui keterlibatan dosen muda dalam penelitian dosen yang lebih senior baik dalam melaksanakan hibah kompetitif nasional maupun penelitian desentralisasi.

Selain itu, pembinaan terhadap dosen muda dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan institusi pemerintah daerah sebagai tim ahli bersama dosen-dosen senior. Misalnya, dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat beserta evaluasi kegiatan pemerintahan daerah.

Pengembangan :

Program Magister Ilmu Politik memberikan kesempatan kepada dosen, untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, *workshop*, seminar ataupun konferensi. Dosen didorong untuk mengembangkan potensi akademik dengan mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dimana semua proses ini berkoordinasi dengan Jurusan Ilmu Politik dan pimpinan fakultas. Adapun jenis pelatihan non-gelar yang difasilitasi baik ketua jurusan, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas adalah:

- Pelatihan PEKERTI
- Pelatihan AA (*Aplied Aproach*)
- Pelatihan Bahasa Inggris
- Pelatihan SCL (*Student Centered Learning*)
- Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian Tingkat Nasional/Internasional
- Pelatihan Metodologi Penelitian
- Program *post-doctoral*
- Pelatihan Penulisan artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi

Khusus untuk Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti:

- Pelatihan operator EPSBED, pengelolaan SIA Fakultas, pengelolaan keuangan dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas untuk tenaga administrasi

Pemberhentian :

Tata cara pemberhentian terhadap dosen yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dalam hal ini adalah UNAND mengacu kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Universitas Andalas juga mengatur pemberhentian ini dalam kode etik dosen berdasarkan peraturan Rektor UNAND No. 25 Tahun 2012 serta peraturan rektor No. 24 Tahun 2012 tentang kode etik PNS Tenaga Kependidikan Universitas Andalas.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ketua/Koordinator Program Magister Ilmu Politik bersama-sama dengan beberapa dosen yang ditunjuk sebagai anggota GKM, terutama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui proses pengumpulan dokumen-dokumen mutu seperti silabus, RPS, bahan ajar atau *reading material* yang disediakan oleh dosen Program Magister Ilmu politik. Setiap dosen melaksanakan perkuliahan selalu disertai absensi yang berisikan tingkat kehadiran, RPS, Silabus, dan materi yang disampaikan setiap pertemuan. Setiap pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, melalui surat yang dikirim Wakil Dekan I memberitahukan bahwa jumlah perkuliahan harus dicukupkan sehingga mencapai jumlah yang sudah ditetapkan. Apabila jumlah pertemuan belum mencukupi maka dosen yang bersangkutan wajib menyelesaikan terlebih dahulu sebelum ujian dilaksanakan. Untuk evaluasi kinerja dosen, dilakukan melalui rapat jurusan, dan segala permasalahan yang terkait dengan suasana akademik dan proses pembelajaran dibicarakan dan dicarikan solusinya.

Begitu juga dengan daftar kehadiran dosen dalam melaksanakan kewajiban mengajar dimonitor secara partisipatif oleh mahasiswa melalui aplikasi *online* yang langsung direspon oleh pimpinan jurusan dan fakultas. Sedangkan evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap pertengahan semester dan akhir semester.

Sementara, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan di Program Magister Ilmu Politik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kehadiran yang ditunjukkan dengan absensi kehadiran tenaga kependidikan yang direkap oleh fakultas melalui penggunaan *finger print*. Selain itu, kinerja tenaga kependidikan dipantau melalui aplikasi *google form* yang diisi setiap hari sebagai bahan evaluasi untuk menilai capaian yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu, monitoring kinerja tenaga kependidikan melalui rapat tenaga kependidikan secara rutin setiap senin pagi bersama dengan pimpinan Program Studi dan Fakultas.

4.3 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.

4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No .	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sri Zul Chairiyah** *	0020085307	20.08.1953	Guru Besar	Dra, MA, Dr.	Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia Master Ilmu Politik, Universitas Indonesia Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia	S1 Ilmu Politik S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik
2	Afrizal***	0020056206	20.05.1962	Guru Besar	Drs, MA, Dr.	Sarjana Sosiologi, Universitas Andalas Master of Art Sosiologi, University of Tasmania, Australia Doktor Sosiologi Politik, Flinders University, Australia	S1 Sosiologi S2 Sosiologi S3 Sosiologi Politik

3	Zainal Arifin***	0006106603	06.10.1966	Lektor Kepala	Drs M.Hum Dr	Sarjana Antropologi Universitas Andalas Master Antropologi Universitas Gadjah Mada Doktor Antropologi Universitas Gadjah Mada	S1 Antropologi S2 Antropologi S3 Antropologi
4	Asrinaldi***	0013097304	13.09.1973	Lektor Kepala	S.Sos, M.Si, Dr.	Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Magister Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Doktor Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia	S1 Ilmu Pemerintahan S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik
5	Aidinil Zetra***	0010027006	10.02.1970	Lektor	S.IP, MA Dr	Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Master of Art Ilmu Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia Doktor Ilmu Politik Universiti Kebangsaan Malaysia	S1 Ilmu Pemerintahan S2 Ilmu Politik S3 Ilmu Politik

6	Tengku Rika Valentina	00018101	1.01.1981	Lektor Kepala	S.IP. MA. Dr.	Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas	S1 Ilmu Politik
						Master Ilmu Politik, Gajah Mada	S2 Ilmu Politik
						Doktor Ilmu Politik, Universitas Padjajaran	S3 Ilmu Politik

Keterangan:

(¹) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

(²) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

(³) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.

4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam **SKS rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No .	Nama Dosen Tetap	SKS Pengajaran pada			SKS Penelitian	SKS Pengabdian kepada Masyarakat	SKS Manajemen**		Jumlah SKS
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, M.A	1,5	2,25	0	3	3	0	0	9,75
2	Prof. Dr. Afrizal, M.A	1,5	4,5	0	3	3	0	0	13,5
3	Dr. Zainal Arifin, M.Hum	1,5	2,25	0	3	3	0	0	9
4	Dr. Asrinaldi, M.Si	6	4,5	0	3	3	6	0	21
5	Dr. Aidinil Zetra, M.A	6	6,75	0	3	3	6	0	22,5
Jumlah		16,5	20,25	0	24	15	12	0	75,75
Rata-rata*		3,30	4,05	0	3	3	2,40	0	15,15

Catatan: SKS Penelitian dan Pengabdian yang dihitung SKS Beban Kerja

SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap.

**** SKS manajemen dihitung sbb :**

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 SKS
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS
- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 SKS
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS
- sekretaris PS 3 SKS

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

4.4 Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ismail Nurdin***	-	27 Mei 1969	Lektor Kepala	Drs., M.Si Dr	IIP (S1) IIP (S2) Unpad (S3)	Politik dan Pemerintahan Administrasi
2	Andi Pitono***	-	9 Januari 1970	Lektor	S.Sos M.Si Dr	STIA LAN (S1); Unpad (S2); Unpad (S3)	Politik dan Pemerintahan Administrasi
3	Udaya Madjid	-	26 September 1970	Lektor Kepala	Dr., M.Pd	IIP (S1); UPI (S2); Unpad (S3)	Politik dan Pemerintahan Administrasi

4	Muhammad Fachri Adnan***	0017105802	17 Oktober 1958	Lektor Kepala	Dr, M.Si	UNP (S1) UGM (S2) UUM (S3)	Administrasi Publik
5	Tjahjo Suprajogo		13 Januari 1969	Lektor Kepala	Dr. M.Si Drs	UB (S1) UGM (S2) UB (S3)	Ilmu Pemerintahan Kebijakan Publik Administrasi Publik
6	Tun Huseno	0018016108	18 Januari 1961	Lektor	Dr. M.Si SE	Univ. Islam Nusantara (S1) UGM (S2) UB (S3)	Manajemen Eko. Pembangunan Ilmu Administrasi

Keterangan:

- (1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.
- (2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- (3) Lampirkan fotokopi ijazah S2 dan S3.

4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir

4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bakaruddin Rosyidi	S3	Ilmu Politik	Universitas Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2008
2	Indah Adi Putri	S3	Ilmu Politik	Univ.Indonesia	Indonesia	2013
3	Doni Hendrik	S3	Ilmu Politik	Universitas Padjadjaran	Indonesia	2016
4	Andri Rusta	S3	Ilmu Politik	Universitas Padjadjaran	Indonesia	2017
5	Irawati	S3	Ilmu Politik	Universitas Padjadjaran	Indonesia	2017
6	Tamrin	S3	Studi Pembangunan	Universitas Andalas	Indonesia	2017
7	Syaiful	S3	Ilmu Politik	Univ. Indonesia	Indonesia	2018

4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prof. Eiji Oyamada (Doshisha University)	2 nd National Seminar on Social Political Sciences: Eradicating Corruption: Experience of Japan and Several Countries	2016
2	Prof. Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah)	Seminar Nasional Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora untuk Perbaikan Karakter Bangsa	2016
3	Prof.Dr. Maswadi Rauf (Guru Besar Universitas Indonesia)	Kuliah Umum Kajian Politik Kontemporer	2016
4	Dr. Mada Sukmajati (Universitas Gajah Mada)	Kuliah Umum: Transformasi Kandidasi oleh Partai Politik Menuju Pemilu/Pilkada Berkualitas	2016
5	Dr. Leo Agustino (Universitas Sultan Agung Tirtayasa)	Kuliah Umum Metodologi Penelitian Ilmu Politik	2016

6	Prof. Hamdi Muluk (Guru Besar Universitas Indonesia)	Kuliah Umum Metodologi Penelitian	2015
7	Dr. Otto Nur Abdullah (Komnas HAM RI)	Diskusi umum Penyelesaian Kasus HAM Era Reformasi	2015
8	Dr. Toferry Primanda Soetika (Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)	Kuliah Umum: Agenda Pembangunan Global: Dari MDG's Menuju Agenda Pembangunan Global Pasca	2015
9	Prof. Micheil S. De Vries (Radboud University Nijmegen, Belanda)	Kuliah Umum: The Challenges of Public Administration Reform in Developing Countries	2014
10	Prof. Dr. Agus Dwiyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)	Kuliah Umum: Perkembangan Reformasi Birokrasi di Indonesia	2014
11	Samsu Rahim (Bupati Kabupaten Solok)	Kuliah Umum: Tata kelola Pemerintahan Lokal	2014
12	Dr. Philips J. Vermonte (Direktur CSIS)	Kuliah Umum: Politik Indonesia Kontemporer	2014
13	Prof. Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat)	Kuliah Umum: Perkembangan Demokrasi di aras Lokal	2014
14	Abdurahman Makmun (Direktur PPPI & Ketua Komisi Informasi Pusat) dan Wicaksono (Ngoro Kakung), Praktisi Sosmed	Seminar Sehari: Pengelola Situs Kementrian & Lembaga Publik untuk Transparansi Anggaran	2014
15	Prof. Greg Barton (Monash University)	Kuliah Umum: Democracy, Islam and its Progress in Indonesia	2013
16	Dr. I Ketut Putra Erawan (Institute Peace and Democracy)	Kuliah Umum: Membangun Nilai Demokrasi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Berbasis Kearifan Lokal	2013
17	Prof. Dr. Robert Lawang (Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia)	Kuliah Umum: Perubahan dan Iklim, Titik Tolak Pengembangan Masyarakat Desa	2013
18	Prof. Dr. Azhar Kasim (Guru Besar Universitas Indonesia)	Kuliah Umum: Reformasi Birokrasi di Indonesia, Tantangan dan Prospek	2013

4.5.3. Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar/ ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT.

No.	Nama Dosen	Jenis Kegiatan*	Tempat	Waktu	Sebagai	
					Penyaji	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	FGD DKPP RI	Hotel Ibis, Padang	2016	✓	
		International Conference on Strengthening Political Party in Election, Parliament, and Government in Semarang, Indonesia	UNDIP	2016		✓
		FGD Kuota Perempuan	KPPA	2016	✓	
		Pelatihan Pemilih Muda RVTI dalam Rangka Pilkada Serentak	UNAND	2015	✓	
		Pelatihan Pemilih Muda RVTI dalam Rangka Pileg Serentak	UNAND	2014	✓	
2	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Transformasi ilmu-ilmu sosial menuju Ilmu-ilmu sosial yang terlibat langsung dengan publik	Padang	2017	✓	
		<i>Global regulations of industrial plantation conflict: how they work in Indonesian context</i>	Kyoto, Jepang	2016	✓	
		Gerakan Lingkungan di Indonesia	Padang	2016	✓	
		Seminar dasar-dasar sosial penyelesaian konflik di dalam dan di luar kawasan hutan	Bukittinggi	2015	✓	
		Seminar Internasional dengan paper : <i>Solutions of Global Agrarian Conflict: How They Work in Indonesia</i>	Kuala Lumpur, Universiti Malaya,	2015	✓	
		Kuliah dosen tamu : <i>Industrial Plantations, FPIC, and Community Rights: Conflicts and Solutions</i>	Canberra, Australian National University,	2015	✓	
		Seminar Pertambangan Tanpa Izin (Peti): Suatu Analisis Sosiologi Lingkungan dan Teori Akses	Padang	2014	✓	

		Seminar <i>Empowering indigenous people against the states and the business to tackle group conflict</i>	Ciang Mai, Thailand	2014	✓	
		Seminar pemahaman terhadap perlakuan para pemangku kepentingan dan pembagian keuntungan dari pelaksanaan REDD +	Bukittinggi	2014	✓	
		<i>International Sociological Association World Congress</i>	Yokohama, Jepang	2014	✓	
		Konferensi <i>Internasional: APPSA Conference: Contestation and Convergence</i>	Chiang Mai, Thailand	2014	✓	
		Seminar <i>The analysis of social adaptation of local communities on environmental changes</i>	Padang	2014	✓	
		<i>Pelatihan Adult Education</i>	Padang	2014	✓	
		<i>Traditional Markets and Their Roles in Changes of Rural Lifestyle In the Minangkabau Village (nagari), Indonesia: A Challenge of Integration in ASEAN Community. Disampaikan dalam International Conference on Creating Asean Future, IIFAS and Andalas University</i>	Padang	2015	✓	
		Body Of Knowledge Di Media On-Line: Tantangan Konstruksi Sosial. Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Tahunan HIPIS 2005.	Padang	2015	✓	
		Pariwisata Berbasis Masyarakat: Peran Utama Stakeholders. Disampaikan dalam Seminar Kepariwisata Kota Padang oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Padang	Padang	2015	✓	
		Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan dari Kemajemukan Budaya di Sumatera Barat. Disampaikan dalam Seminar BKS-PTN Ilmu Sosial Wilayah Barat.	UNIME D Medan	2014	✓	

		Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat. Disampaikan dalam Seminar Nasional I FISIP.	Universitas Andalas	2014	✓	
		Pembauran Etnis Di Padang: Suatu Bentuk Dari Peristiwa Lintas Budaya Minangkabau Menuju Kota Metropolitan dan Kawasan Strategis Nasional. Disampaikan dalam Diskusi Aktual Forum Litbang Daerah, Tema: "Penguatan Peran Kota Padang Menjadi Kawasan Strategis Nasional"	Tropical Forest Conservation Action (TFCA) kerjasama dengan Yayasan Kirekat Indonesia (YKI)	2014	✓	
3	Dr.Zainal Arifin, M.Hum	Kebudayaan dan Warisan Tak Benda Masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, Disampaikan dalam <i>AcaraRapatTeknisPelestarianNilai BudayaDalamRangkaPenetapanWarisanBudayaTak Benda (Wbtb) Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu Dan Sumatera Selatan</i>	Kemendikbud RI, Jakarta	2015	✓	
		"Paradigma dalam Penelitian Kebudayaan" disampaikan dalam <i>Workshop Metodologi Penelitian Kebudayaan</i>	IAIN Sulthan Thana Saifuddin, Jambi	2014	✓	
		"Matrilineal Puzzle Minangkabau : Membangun Harmoni Ditengah Disharmoni" disampaikan dalam <i>International Seminar : State Law: The Present Study Toward the Contribution of Islamic Law and Traditional Law on National Law Structure.</i>	STAIN Batusangkar	2014	✓	
		"Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional" disampaikan dalam <i>Seminar Penelitian Empiris Mengenai RUU Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional</i>	DPD RI	2014	✓	

		“Seni Menyusun Proposal Kualitatif untuk Ditlitabmas” disampaikan dalam <i>Sosialisasi Program Penelitian dan PBM di Perguruan Tinggi</i>	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) X-A Sumatera Barat	2014	✓	
		“Menggagas Pola Pengelolaan Wilayah Mentawai Berbasis Kearifan Lokal” disampaikan dalam <i>Semiloka Hasil Kajian Komprehensif dan Rekomendasi Skema Acuan Pengelolaan Wilayah Pulau Siberut</i>	Bappeda Kota Padang	2014	✓	
4	Dr. Asrinaldi, M.Si	Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3 tentang Demokratisasi Partai Politik	Bukittinggi	2016	✓	
		FGD DKPP RI	Hotel Ibis, Padang	2016	✓	
		Seminar Nasional Masyarakat Sejarah Indonesia	Padang	2016	✓	
		Seminar Nasional Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia	Padang	2016	✓	
		Konferensi Internasional Hubungan Indonesia-Malaysia Ke-9	Yogyakarta	2015	✓	
		Konferensi Hukum Tata Negara Ke-2	Padang	2015	✓	
		Seminar Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru	Padang	2014	✓	
		Konferensi Internasional Hubungan Indonesia-Malaysia Ke-8	Pekanbaru	2014	✓	
		Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-1	Sawahlunto	2014	✓	
6	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Seminar Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sijunjung	Padang	2016	✓	
		Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat Dan Daerah	Jakarta	2015	✓	

	Seminar Politik dan Pilihan Raya	Kinabalu, Malaysia	2014	✓	
	Seminar Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Sijunjung	Padang	2016	✓	
	Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat Dan Daerah	Jakarta	2015	✓	
				44	1

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, *Workshop*, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll

4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai:

4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/Narasumber

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Menjadi fasilitator SPMI Belmwa Ristekdikti	2017	Nasional
		Dewan Pakar Scale UP	2009-skrng	Nasional
		Menjadi reviewer penelitian nasional	2017	Nasional
		Menjadi <i>visiting professor di Universiti Malaya</i>	2015	Internasional
		Anggota Jaringan FPP untuk penguatan hak-hak komuniats adat	2014-skrng	Lokal
		Ketua PKBI Sumbar	2009-skrng	Lokal
2	Dr. Zainal Arifin, M.Hum	Mitra Bestari Jurnal Antropologi Sosial Budaya	2015 – 2017	Lokal
		Mitra Bestari Jurnal Suluah	2016 – 2017	Lokal
		Mitra Bestari Jurnal Wisdom	2015 – 2017	Nasional
		Mitra Bestari Jurnal Penelitian BAPPEDA Sumatera Barat	2014	Lokal

3	Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Badan Hukum dan Pemerintahan	2016	Lokal
		Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh	2016	Lokal
		Sekretaris Tim Ahli Penyusunan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021	2016	Lokal
		Anggota Tim Seleksi Anggota Panwaslu se Sumatera Barat	2015	Lokal
		Anggota Tim Ahli Penyusunan Dokumen Pra-RPJMD Kabupaten Solok	2015	Lokal
		Anggota Tim Ahli Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Sumatera Barat-Bappenas	2015	Lokal
		Anggota Tim Ahli Penyusunan Background Study RPJMD Provinsi Sumatera Barat	2015	Lokal
		Anggota Tim Ahli Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	2015	Lokal
		Staf Pengajar/ Narasumber untuk Diklat PIM III dan Pim IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2014 sd sekarang	Lokal
		Anggota Tim Ahli Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Sumatera Barat-Bappenas	2014	Lokal
		Anggota Tim Ahli Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	2014	Lokal
		Anggota Tim Ahli	2014	Lokal

		Midterm Review RPJMD Kabupaten Tanah Datar		
--	--	--	--	--

4.5.4.2 Keanggotaan pada organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	Asosiasi Dosen Ilmu Politik (ADIPI)	2015-skrng	Nasional
		Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Padang	2012-skrng	Ketua Cabang Sumbar Lokal
		Centre Election Political Party (CEPP Uni-Link Sumbar)	2012-skrng	Koordinator Sumbar Nasional
2	Prof. Dr. Afrizal, M.A	International Sociology Association (ISA)	2016	Internasional
		Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)	2016	Nasional
		Himpunan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia (HIIPSI)	2016	Nasional
3	Dr. Asrinaldi, M.Si	Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Cabang Sumatera Barat	2014–2018	Nasional
		Internasional Political Science Association	2014–2016	Internasional
		Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Padang	2012-skrng	Lokal
		Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat	2010-2015	Lokal
		Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat	2016-2021	Lokal
4	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Padang	2012-skrng	Lokal

4.5.4.3 Visiting professor

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Universiti Malaya	2015	Internasional

4.5.5 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

No.	Nama Dosen	Prestasi yang Dicapai*	Waktu Pencapaian	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Hibah Kompetitif DIKTI	2016	Nasional
		Hibah Desentralisasi DIKTI	2015-2016	Nasional
2	Dr. Zainal Arifin, M.Hum	Tawa Nan Ampek : Sistem klasifikasi Tanaman Obat Minangkabau (Kasus Simanau, Solok)Dipa FISIP Unand	2016	Lokal
		<i>Tawa Nan Ampek Dan Epat Ngarubeijat Laggek</i> : Etnofarmakologi Minangkabau Dan Mentawai Dalam Kajian Strukturalisme . Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional, Kemenkes RI	2016	Nasional
		<i>Paradoks Matrilineal :</i> Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya. (Kasus : Masyarakat Semende Muara Sahung, Kaur Bengkulu). Hibah Kompetensi – Kemenristek-Dikti RI	2016	Nasional

		<i>Paradoks Matrilineal : Pola Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya. (Kasus : Masyarakat Semende Muara Enim, Sumatera Selatan). Hibah Kompetensi – Kemenristek-Dikti RI</i>	2015	Nasional
		Kajian Komprehensif Skema Acuan Pengelolaan Wilayah Pulau Siberut Mentawai. Yayasan Kirekat Indonesia dan Tropical Forest Conservation Action (TFCA)	2014	Nasional
3	Dr. Asrinaldi, M.Si	Penulis Opini Kompas dengan judul Kegagalan Kelola Informasi (19/04/2016)	2016	Lokal
		Pemenang Hibah Kompetensi Dikti; Politik Kekuasaan Penghulu Adat Dan Implikasinya Pada Kualitas Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat.	2016	Lokal
		Pemenang Hibah Strategis Nasional Dikti; Model Kebijakan e-Government Untuk Pengembangan Public e-Service di Indonesia.	2015	Lokal
		Penulis Opini Kompas dengan judul Restu Petinggi Partai dalam Pilkada (01/07/2015)	2015	Lokal
		Penulis Opini Kompas dengan judul Pilkada dan Uang Survei Kepala Daerah (04/06/2015)	2015	Lokal
		Penulis Opini Kompas dengan judul Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik (11/04/2015)	2015	Lokal
		Penulis Buku Kekuatan-	2014	Lokal

		Kekuatan Politik di Indonesia Penerbit Tiara Wacana		
4	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis <i>Mobile Web</i> untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan konstituen	2016	Nasional
		Pemenang Hibah Bersaing Dikti: Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis <i>Mobile Web</i> untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan konstituen	2015	Nasional

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.

4.6 Tenaga kependidikan

4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan *	-	-	7		3	6	-		Universitas
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer	-	1	13	-	1	-	-	1	ICT Fakultas
3	Administrasi	-	-	2	-	1	-	-	-	Pascasarjana Fisip dan Jurusan
4	Lainnya : Cleaning Service, Security	-	-	-	-	-	-	-	7	Jurusan dan Pascasarjana
Total		-	1	22	-	5	6	-	8	

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

4.6.2 Jelaskan upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga penunjang dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan tenaga kependidikan sebagai *supporting staff* adalah sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui sistem pengelolaan yang profesional pula.

Pengelola Program Magister Ilmu Politik selalu mendorong tenaga kependidikannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memfasilitasi berbagai pelatihan/*workshop*, seperti pelatihan IT dan administrasi. Upaya tersebut dilakukan prodi dengan dibantu oleh pihak fakultas.

Pengelola Program Magister Ilmu Politik memiliki dua orang tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan tenaga kontrak. Tenaga kependidikan yang ada di program magister ilmu politik memiliki tugas layanan administrasi serta membantu pengelolaan laboratorium. Pengembangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan sepenuhnya oleh pimpinan fakultas dan universitas.

Meskipun demikian program magister berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan dengan memfasilitasi yang bersangkutan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi baik yang diadakan di tingkat fakultas maupun universitas. Salah satu bentuk pelatihan akhir-akhir ini yang diikuti oleh tenaga kependidikan program magister ilmu politik di antaranya adalah:

1. Pelatihan e-office,
2. i-learning,
3. Pelatihan SIA,
4. Pelatihan laporan keuangan
5. Pelatihan pelayanan prima dari universitas.

Selain itu, kepada tenaga kependidikan juga diberikan penugasan dan tanggung jawab dalam manajemen administrasi dan keuangan di program magister ilmu politik.

STANDAR 5

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

Kurikulum merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang menjadi acuan bagi mahasiswa untuk dijadikan pedoman guna menyelesaikan rangkaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan akhir dari kompetensi lulusan yang diharapkan, maka kurikulum disusun mengacu pada visi dan misi program magister. Penjabaran kurikulum Program Magister Ilmu Politik mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta dengan yang tercantum pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 UU No.12/2012 dijelaskan bahwa "Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi." Sejalan dengan itu, dalam Pasal 1 ayat 6 Permenristekdikti No.44/2015 menyebutkan bahwa "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program magister."

Kurikulum Program Magister Ilmu Politik memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program magister. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

5.1.1 Kompetensi

Uraikan secara ringkas kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya).

Pada 14 Januari 2015 dilakukan revisi terkait dengan visi dan misi Program Magister Ilmu Politik sehingga mempengaruhi struktur kurikulum. Apalagi sejak diberlakukannya kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka Program Magister Ilmu Politik mengubah kurikulum tersebut sehingga kompetensi lulusan yang diharapkan mengalami sebagai berikut.

Ada dua profil lulusan dan sekaligus kompetensi yang hendak dihasilkan oleh Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas yakni :

Profil Lulusan : **Akademisi/Peneliti**

- a. Sikap dan Nilai
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

b. Keterampilan Umum

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dan para stakeholder;
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

c. Keterampilan Khusus

- Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep ilmu politik.
- Mampu melaksanakan tata kelola pemilu
- Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah birokrasi dan pemerintahan
- Mampu menganalisis perilaku politik dan memilih di tengah-tengah masyarakat
- Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik
- Mampu menganalisis Politik Indonesia
- Mampu menganalisis fenomena sosial politik di tengah masyarakat
- Mampu mengadvokasi fenomena sosial kemasyarakatan

- Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik
- d. Pengetahuan
- Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS bagi masyarakat;
 - Memiliki kemampuan dan menguasai tentang teori penyelenggaraan pemilu
 - Mampu menguasai Teori *Governance*, Politik Indonesia dan Politik Desentralisasi
 - Memiliki pengetahuan tentang kemampuan dalam bidang Manajemen Program
 - Mampu dan menguasai teori politik dan demokrasi

Profile Lulusan : **Aktivis LSM/NGO/Konsultan Kebijakan Publik**

- a. Sikap dan nilai
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- b. Keterampilan Umum
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dan para stake holder;
 - Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada

- pekerja yang berada di bawah evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- b. Keterampilan Khusus
- Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep ilmu politik.
 - Mampu melaksanakan tata kelola pemilu
 - Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah birokrasi dan pemerintahan
 - Mampu menganalisis perilaku politik dan memilih di tengah-tengah masyarakat
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik
 - Mampu menganalisis Politik Indonesia
 - Mampu menganalisis fenomena sosial politik di tengah masyarakat
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik
- c. Pengetahuan
- Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu Politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS bagi masyarakat;
 - Memiliki kemampuan dan menguasai tentang teori penyelenggaraan pemilu
 - Memiliki pengetahuan tentang kemampuan dalam bidang Manajemen Program
 - Mampu dan menguasai teori politik dan demokrasi

Profile Lulusan : **Birokrat**

- a. Sikap dan Nilai
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri; dan
 - Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- b. Keterampilan Umum
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dan para stakeholder;
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

c. Keterampilan Khusus

- Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep ilmu politik.
- Mampu melaksanakan tata kelola pemilu
- Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah birokrasi dan pemerintahan
- Mampu menganalisis perilaku politik dan memilih di tengah-tengah masyarakat
- Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik
- Mampu menganalisis Politik Indonesia
- Mampu menganalisis fenomena sosial politik di tengah masyarakat
- Mampu mengadvokasi fenomena sosial kemasyarakatan
- Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik

c. Pengetahuan

- Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu Politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS bagi masyarakat
- Memiliki kemampuan dan menguasai tentang teori penyelenggaraan pemilu
- Mampu menguasai Teori *Governance*, Politik Indonesia dan Politik Desentralisasi
- Memiliki pengetahuan tentang kemampuan dalam bidang Manajemen Program
- Mampu dan menguasai teori politik dan demokrasi

Profile Lulusan : **Politisi**

a. Sikap dan Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- d. Keterampilan Umum
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dan para *stakeholder*;
 - Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah evaluasinya terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
 - Menyusun deskripsi hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya dan para *stakeholder*;
 - Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- e. Keterampilan Khusus
- Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep ilmu politik.
 - Mampu melaksanakan tata kelola pemilu.
 - Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah birokrasi dan pemerintahan.
 - Mampu menganalisis perilaku politik dan memilih di tengah-tengah masyarakat.
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik.
 - Mampu menganalisis Politik Indonesia.
 - Mampu menganalisis fenomena sosial politik di tengah masyarakat.
 - Mampu mengadvokasi fenomena sosial kemasyarakatan.
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik.
 - Mampu memecahkan masalah secara praktis berdasarkan teori dan konsep ilmu politik.
 - Mampu melaksanakan tata kelola pemilu.
 - Mampu menganalisis dan memecahkan masalah-masalah birokrasi dan pemerintahan.
 - Mampu menganalisis perilaku politik dan memilih di tengah-tengah masyarakat.
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik.
 - Mampu menganalisis Politik Indonesia.
 - Mampu menganalisis fenomena sosial politik di tengah masyarakat
 - Mampu mengadvokasi fenomena sosial kemasyarakatan.
 - Mampu menganalisis persoalan-persoalan politik dan kebijakan publik.
- d. Pengetahuan
- Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu Politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK bagi masyarakat.
 - Memiliki kemampuan dan menguasai tentang teori penyelenggaraan pemilu.
 - Mampu menguasai Teori *Governance*, Politik Indonesia dan Politik Desentralisasi.
 - Memiliki pengetahuan tentang kemampuan dalam bidang Manajemen Program.
 - Mampu dan menguasai teori politik dan demokrasi.
 - Menguasai dasar-dasar teori dalam bidang ilmu Politik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK bagi masyarakat.
 - Memiliki kemampuan dan menguasai tentang teori penyelenggaraan pemilu.
 - Mampu menguasai Teori *Governance*, Politik Indonesia dan Politik Desentralisasi
 - Memiliki pengetahuan tentang kemampuan dalam bidang Manajemen Program.
 - Mampu dan menguasai teori politik dan demokrasi.

5.1.2. Struktur Kurikulum

Beban belajar bagi peserta di Program Magister Ilmu Politik sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

- 5.1.2.1 Jelaskan struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis) serta keterkaitan di antaranya, serta lengkapi tabel di bawah ini

Pada Tahun 2018, Program Magister Ilmu Politik melaksanakan revisi kurikulum yang disusun ke dalam bentuk sistem perkuliahan dengan beban studi 45 SKS yang dapat ditempuh selama 4 semester atau dalam waktu yang lebih singkat. Pada Semester I dan Semester II, mahasiswa diwajibkan mengikuti semua mata kuliah wajib sebanyak 2 Matakuliah dan 3 masing-masing Matakuliah Pilihan Wajib Konsentrasi. Di Semester III mahasiswa dapat mengambil 2 Matakuliah Pilihan di masing-Masing Konsentrasi, dan mahasiswa sudah dapat melaksanakan kolokium atau seminar proposal sepanjang syarat sudah terpenuhi. Di Semester IV Mahasiswa sudah bisa melaksanakan Ujian Seminar Hasil dan Ujian Tesis

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah ⁽¹⁾	Bobot SKS	SKS MK dalam Kurikulum		Kelengkapan ⁽³⁾			Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara
				Int i ⁽²⁾	Insti-tusional	Deskripsi	Silabus	SAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	MIP 1101	Demokrasi Indonesia	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1102	Teori Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1103	Politik Desentralisasi	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1104	Legislatif dan Partai Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1105	Sistem Pembuatan Kebijakan	3	√	√	√	√	√	Program studi
		Matakuliah Wajib							
II	MIP 1206	Pencegahan dan Penanganan Konflik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1206	Desain Penelitian Dalam Ilmu Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	Matakuliah Wajib Pilihan								
	1. Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah								
	MIP 1207	Perencanaan Pembangunan Desa dan Nagari	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1208	Birokrasi dan Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1209	e-Government	3	√	√	√	√	√	Program studi
	2. Konsentrasi Tata Kelola Pemilu								

	MIP 1210	Regulasi Pemilu di Indonesia	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1211	Etika Moral Penyelenggara pemilu	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1212	Manajemen Keuangan Pemilu	3	√	√	√	√	√	Program studi
	3. Politik Kebijakan								
	MIP 1213	Politik Kebijakan Publik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1214	Governance dan Kebijakan Publik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 1215	Penyusunan dan Penulisan Produk Kebijakan	3(2-1)	√	√	√	√	√	Program studi
III	Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah								
	MIP 2316	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2317	Manajemen Pelayanan Publik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2318	Modal Sosial dan Institusi Politik Lokal	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2319	Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan	3	√	√	√	√	√	Program studi
	Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Tata Kelola Pemilu								
	MIP 2320	IT dalam Pemilu	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2321	Malpraktek Pemilu	3	√		√	√	√	Program studi
	MIP 2322	Organisasi dan Birokrasi Pemilu	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2323	Marketing Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2324	Sistem Peradilan Pemilu	3	√	√	√	√	√	Program studi
	Mata Kuliah Wajib Politik Kebijakan								
	MIP 2325	Isu-Isu Kebijakan Lokal	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2326	Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik	3	√	√	√	√	√	Program studi
	MIP 2327	Evaluasi dan Terminasi Kebijakan	3	√	√	√	√	√	Program studi

	MIP 2328	Manajemen Program	3	√	√	√	√	√	Program Studi
	MIP 2329	Filsafat Ilmu Sosial	3	√	√	√	√	√	Program studi
IV	ISP 611	Kolokium	1						Fakultas
	ISP 612	Seminar Hasil	2						Fakultas
	ISP 613	Tesis	6						Fakultas
Total SKS Program Magister Ilmu Politik			45						

5.1.2.2. Tuliskan mata kuliah pilihan **yang dilaksanakan** dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Semester	Kode MK	Nama MK (pilihan)	Bobot SKS	Unit/ Jur/ Fak Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
3	MIP 2323	Marketing Politik	3	Prodi
3	MIP 2319	Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan	3	Prodi
3	MIP 2327	Manajemen Program	3	Prodi
3	MIP 2328	Filsafat Ilmu Sosial	3	Prodi
Total SKS			12	

5.1.3 Peninjauan Kurikulum dalam Lima Tahun Terakhir

Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut.

Peninjauan kurikulum Program Magister Ilmu Politik sudah dilakukan 2 kali. Pertama, terkait dengan peninjauan kurikulum yang bersifat minor. Artinya, peninjauan hanya dilakukan terhadap matakuliah yang mesti diambil oleh mahasiswa di setiap konsentrasi. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang sedikit, maka pembagian mahasiswa ke dalam konsentrasi dan peminatan terlihat tidak memenuhi asas efektifitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Untuk itu dilakukanlah peninjauan kurikulum yang bersifat minor. Peninjauan ini hanya dilakukan dalam rapat Program Magister Ilmu Politik dengan melibatkan dosen pengajar pada tanggal 11 Maret 2014.

Peninjauan kurikulum yang kedua dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015. Peninjauan ini dilakukan dalam bentuk lokakarya dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sengaja diundang dalam acara tersebut. Adapun pemangku kepentingan tersebut adalah komisioner KPU Daerah, Komisioner Bawaslu Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Birokrasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kepala Biro Organisasi, Aktivis LSM dari organisasi perempuan, Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Sumatera Barat, Alumni yang sudah bekerja di perguruan tinggi negeri dan swasta, serta alumni yang bekerja di sektor BUMN dan Swasta.

Dalam peninjauan kurikulum ini terjadi perubahan struktur kurikulum sesuai dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan SN Dikti Permenristek No.44/2015 terkait dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Dalam perubahan kurikulum tersebut dihasilkan kurikulum baru yang rencana akan diterapkan Tahun 2018. Ini terkait dengan kurikulum lama yang sudah lima tahun digunakan dan dievaluasi sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat.

Tuliskan hasil peninjauan kurikulum mengikuti format tabel berikut.

No .	No. MK	Nama MK	MK Baru/ Lama/Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/ Masukan dari	Berla ku Mulai Sem./ Th.
				Silab us/S AP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MIP 101	Filsafat Ilmu Sosial	Demokrasi Indonesia	√	√	- Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKKNI dan Permenristek No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

2	MIP 102	Teori Politik	Teori Politik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
3	MIP 103	Politik Indonesia	Politik Desentralisasi	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

4	MIP 104	Governance dan Demokrasi	Legislatif dan Partai Politik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
5	MIP 105	Politik Desentralisasi	Sistem Pembuatan Kebijakan	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

6	MIP 206	Politik Kebijakan Publik	Pencegahan dan Penanganan Konflik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
7	MIP 207	Metode Penelitian Ilmu Politik	Desain Penelitian Dalam Ilmu Politik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

8	MIP 208	Demokrasi dan Demokratisasi	Perencanaan Pembangunan Desa dan Nagari	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
9	MIP 209	Sistem Kepartaian dan Perwakilan Politik	Birokrasi dan Politik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

10	MIP 210	Seminar Kosentrasi	E-Government	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
11	MIP 211	Manajemen Kebijakan	Regulasi Pemilu di Indonesia	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

12	MIP 212	Reformasi Birokrasi	Sistem Peradilan Pemilu	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
13	MIP 213	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Manajemen Keuangan Pemilu	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

14	MIP 314	Pemilu dan Perilaku Politik	Politik Kebijakan Publik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
15	MIP 315	Governance dan Integritas	Governance dan Kebijakan Publik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

16	MIP 317	Manajemen Pelayanan Publik	Penyusunan dan Penulisan Produk Kebijakan	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
17	MIP 318	Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program	Politik Identitas dan Multikulturalisme	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

18	MIP 319	Perbandingan Kebijakan	Manajemen Pelayanan Publik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
19	MIP 320	Komunikasi Politik	Modal Sosial dan Institusi Politik Lokal	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

20	MIP 321	Politik lokal dalam konteks global	IT dalam Pemilu	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNP dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
21	MIP 322	Marketing Politik	Malpraktek Pemilu	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNP dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

22	MIP 323	Metode Survey	Organisasi dan Birokrasi Pemilu	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
23	MIP 324	Governance dan Manajemen konflik politik	Isu-Isu Kebijakan Lokal	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

24	MIP 325	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
25	MIP 326	Isu dan kebijakan Perkotaan	Evaluasi dan Terminasi Kebijakan	√	√	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019

26	MIP 327	Kepemimpinan politik dan pemerintahan		✓	✓	• Perubahan kurikulum berdasarkan UU No.12/2012 tentang KKNi dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Surat Edaran Rektor Unand	Masukan dari rapat evaluasi program magister dan masukan dari pemangku kepentingan dalam revisi	Ganjil 2018/2019
----	---------	---------------------------------------	--	---	---	---	---	------------------

5.2 Persyaratan Mengikuti Pendidikan Magister, Proses Pelaksanaan dan Persyaratan Kelulusannya.

Jelaskan persyaratan mukim (*residency requirement*), pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Persyaratan mukim adalah persyaratan bahwa mahasiswa magister wajib melakukan kegiatan akademik dengan beban penuh di kampus untuk beberapa semester.

5.2.1 Uraikan apakah ada persyaratan mukim dan berapa lama serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Pendidikan Magister Ilmu Politik dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun yang bersifat menetap dalam bentuk perkuliahan (*by course*). Artinya, mahasiswa harus mengikuti kuliah selama 4 semester di kampus Universitas Andalas. Pada semester I, setiap mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah sebanyak 5 mata kuliah wajib program magister (15 sks). Pada Semester II, mahasiswa diwajibkan mengambil 2 mata kuliah wajib program magister (6 sks) dan 3 mata kuliah wajib konsentrasi (9 sks). Penentuan konsentrasi (peminatan) mahasiswa, dilakukan pada akhir semester I dengan cara mengajukan rancangan usulan topik tesis yang akan dibuat. Berdasarkan usulan rancangan tersebut selanjutnya program magister mengelompokkan peminatan mahasiswa ke dalam 3 (tiga) konsentrasi keahlian yang tersedia, yakni Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi daerah, Tata Kelola Pemilu, dan Konsentrasi Politik Kebijakan. Pada Semester III, mahasiswa diwajibkan mengambil 2 (dua) mata kuliah pilihan konsentrasi dari empat pilihan matakuliah yang tersedia. Pada Semester IV, mahasiswa melaksanakan penyusunan tesis yang terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap kolokium, seminar hasil dan ujian tesis.

Format perkuliahan pada semester I hingga semester III dilakukan dalam bentuk tatap muka dan seminar dengan menggunakan metode *Student Centered Learning (SCL)*. Perkuliahan kelas dilakukan dalam bentuk pertemuan/tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan persemester, termasuk di dalamnya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam perkuliahan kelas mahasiswa wajib menghadiri pertemuan/kuliah minimal 14 kali pertemuan.

Di akhir Semester III, mahasiswa sudah dapat mengikuti kolokium atau seminar proposal tesis yang sebelumnya telah dibimbing oleh pembimbing yang sudah ditetapkan pada akhir semester II. Diharapkan selesai kolokium ini, mahasiswa dapat melakukan penelitian lapangan di Semester IV.

Kendala yang ditemui adalah karena sebagian besar mahasiswa Magister Ilmu Politik berasal dari luar daerah Kota Padang, dan ada juga mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat sehingga persoalannya adalah pada kehadiran mahasiswa yang tidak selalu penuh untuk hadir dalam perkuliahan. Kalau pun mereka hadir, pada umumnya seringkali terlambat dikarenakan sebagian diantara mahasiswa menghadiri perkuliahan dengan perjalanan setiap hari pulang pergi dari tempat tinggal mereka di luar kota Padang seperti dari Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara.

5.2.2 Jelaskan persyaratan penguasaan bahasa Inggris. Untuk penguasaan bahasa Inggris digunakan standar TOEFL.

Penguasaan bahasa Inggris merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa Magister Ilmu Politik, karena sebagian besar sumber referensi yang dijadikan rujukan perkuliahan berasal dari sumber-sumber berbahasa Inggris. Standar minimal penguasaan bahasa Inggris yang diwajibkan oleh program magister ini adalah TOEFL dengan skor 450. Namun, sejak tahun 2017, Universitas Andalas mensyaratkan skor TOEFL bagi mahasiswa magister yang akan Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah 500. Sertifikat skor TOEFL yang diakui oleh Program Magister Ilmu Politik hanyalah yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Universitas Andalas.

5.2.3 Jelaskan persyaratan perkuliahan dan ujian mata kuliah yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya. Berikan pula penjelasan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi.

Perkuliahan yang dilaksanakan setelah mahasiswa mengisi KRS secara daring (*online*). Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Mahasiswa hanya dibenarkan ujian, jika minimal hadir tatap muka sebanyak 75 persen atau (12 kali pertemuan). Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kuliah minimal, maka mereka tidak dibenarkan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester.

Dalam perkuliahan yang dilaksanakan selalu mengacu kepada perkembangan teori-teori mutakhir dan dinamika masyarakat yang berkembang sebagai referensi pembelajaran. Beberapa matakuliah yang sesuai dengan perkembangan teori-teori mutakhir antara lain penjelasan tentang demokrasi lokal yang dilihat dengan Teori Institutional Baru (*new institutionalism*). Selain itu, matakuliah ICT dalam Politik juga diajarkan mengkomodifikasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan dalam demokrasi elektoral.

Pelaksanaan dan Kendala Perkuliahan Yang Dilaksanakan

Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan jumlah tatap muka disesuaikan dengan bobot sks masing-masing mata kuliah. Di samping pelaksanaan

perkuliahan melalui metode kelas, mahasiswa juga diberikan tugas-tugas terstruktur yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok sesuai dengan capaian yang diharapkan dari setiap sesi perkuliahan yang ditetapkan. Evaluasi penyelenggaraan perkuliahan dilakukan setelah kuliah ke-8 melalui pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS). Selain itu, untuk mengevaluasi keberhasilan mahasiswa mengikuti perkuliahan ini juga dilakukan evaluasi diakhir semester melalui pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada kuliah ke-16 untuk matakuliah yang memiliki bobot 3 sks. Tidak semua mahasiswa dapat mengikuti UAS ini mengingat ada persyaratan minimum kehadiran dalam tatap muka kelas yang wajib diikuti mahasiswa, yaitu 12 kali tatap muka atau 75 persen dari jumlah kehadiran kelas. Walaupun begitu, penilaian akhir untuk mahasiswa justru dihitung dari akumulasi dari seluruh komponen penilaian seperti UTS, UAS, Nilai Tugas Terstruktur, Tugas tidak terstruktur, Keaktifan dan Diskusi Kelas yang dilaksanakan selama perkuliahan.

Adapun kendala kuliah yang ditemukan adalah aktivitas dosen yang juga banyak berkegiatan di luar kampus baik sebagai peneliti, narasumber dan tenaga ahli sehingga dapat mengganggu kelancaran perkuliahan. Apalagi dengan dinamika otonomi daerah dan aktivitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal dan nasional berdampak pada kehadiran dosen Program Magister Ilmu Politik dalam memberi perkuliahan. Umumnya dosen ini menjadi peneliti, narasumber dan bahkan tenaga ahli di berbagai instansi pemerintahan. Walau bagaimana pun, pihak pengelola memberi keleluasaan kepada dosen yang bersangkutan karena pengalaman di lapangan juga dibutuhkan untuk ditransfer kepada mahasiswa di kelas. Namun, pihak pengelola Program Magister Ilmu Politik juga mewajibkan kepada dosen yang tidak masuk kelas mencari kelas perkuliahan untuk mencari hari pengganti bagi perkuliahannya yang tidak dihadiri sehingga mutu perkuliahan tidak terganggu.

Kendala lain yang juga dihadapi dalam perkuliahan ini adalah status mahasiswa Program Magister ini yang umumnya bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta. Adakalanya, status mereka yang bekerja ini mendadak harus ditugaskan kantornya untuk melakukan suatu kegiatan sehingga tidak masuk kelas sehingga materi perkuliahan dan tugas mandiri yang diberikan sulit dikerjakan. Namun, solusi yang diberikan oleh pihak pengelola adalah meminta dosen memberikan *handout* materi perkuliahan dan menfotokopikan buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa yang bersangkutan. Untuk tugas, mahasiswa tetap diwajibkan menyelesaikan sehingga kekurangan dalam materi perkuliahan bisa ditutupi melalui buku bacaan wajib yang diberikan.

5.2.4 Jelaskan cara penyajian dan penilaian rencana penelitian tesis.

Penyajian dan Penilaian rencana penelitian tesis di Program Magister Ilmu Politik dilakukan dalam dua tahap :

Tahap Pertama :

1. Mahasiswa mengusulkan usulan judul penelitian tesis pada akhir semester 1 kepada Program Magister. Usulan judul penelitian dituangkan ke dalam *form/blanko* yang disediakan program magister yang di dalamnya tersedia dua usulan judul penelitian.
2. Setelah usulan judul penelitian diterima, program magister melakukan Rapat Program Magister untuk membahas usulan judul penelitian yang sesuai dan relevan dengan visi Program Magister, konsentrasi/peminatan yang tersedia dan *roadmap* penelitian atau bidang kajian program magister.

3. Pengusulan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa sekaligus menjadi penentu pilihan konsentrasi/peminatan keahlian yang akan diinginkannya.

Tahap Kedua :

1. Setelah usulan judul penelitian mahasiswa disetujui, mahasiswa mulai mencari bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan untuk menulis proposal tesis. Sambil mengumpulkan bahan, mahasiswa dapat berdiskusi dengan pembimbingnya agar proposal yang ditulis sesuai dengan kajian yang diinginkan.
2. Komisi pembimbing terdiri dari dua orang yang bertindak sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II. Usulan calon pembimbing dilakukan oleh mahasiswa, namun sesuai pendistribusian dan kompetensi keilmuan, pada akhirnya rapat program magister yang menentukan pembimbing tesis mahasiswa tersebut.
3. Setelah proposal tesis selesai ditulis dengan bimbingan pembimbing yang terdiri dari dua orang pembimbing, maka pembimbing dapat mengusulkan untuk diseminarkan dalam kolokium atau seminar proposal di program magister. Proses atau prosedur pengusulan rencana penelitian tesis diatur dalam Peraturan Rektor No.3 tahun 2016.
4. Setelah mahasiswa mengikuti kolokium atau seminar proposal penelitian dengan hasil rekomendasi sidang kolokium diterima dan ditolak, jika sidang kolokium atau seminar proposal memutuskan menerima proposal usulan mahasiswa, maka mahasiswa dapat melanjutkannya ke proses penelitian.
5. Jika mahasiswa selesai melakukan penelitian dan telah menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis, maka dengan rekomendasi kedua pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan usulan untuk mengikuti ujian tesis.

- 5.2.5 Jelaskan peraturan tentang kewajiban penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar (internasional, nasional, wilayah, lokal PT) serta pelaksanaan dan kendala yang dihadapi).

Sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No.152/E/T/2012 tentang kewajiban bagi publikasi hasil penelitian bagi lulusan S1/S2/S3 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mendorong universitas untuk menyusun aturan serupa agar hasil penelitian tesis dapat dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah seperti yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas dan sudah direvisi dengan Peraturan Rektor No.3/2016 tentang peraturan akademik. Begitu juga dengan mahasiswa Magister Ilmu Politik yang telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir studi (ujian Tesis) diwajibkan menuangkan hasil penelitiannya ke dalam artikel ilmiah yang selanjutnya akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah *online* perpustakaan Universitas Andalas dan atau jurnal nasional baik akreditasi maupun tidak terakreditasi.

Bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Politik setiap penelitian yang dilakukan harus diseminarkan dalam kegiatan kolokium di tingkat program magister atau fakultas untuk mendapatkan masukan dan perbaikan sebelum menjadi tesis. Begitu juga dengan himbauan kepada mahasiswa untuk hadir dan ikut aktif dalam kegiatan seminar di forum lokal, nasional maupun internasional dengan mempresentasikan hasil penelitian mereka.

Kendala dalam pelaksanaan ketentuan ini adalah (1) kemampuan mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal terakreditasi yang masih rendah; selain itu, (2) masih terbatasnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga berdampak pada

pengalaman riset untuk menghasilkan artikel ilmiah; dan (3) masih terbatasnya dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian sehingga mereka tidak memiliki pengalaman dalam menulis artikel ilmiah bersama dosen.

5.2.6 Jelaskan sistem penjaminan mutu tesis, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

Sistem Penjaminan Mutu Tesis pada dasarnya mengikuti sistem penjaminan mutu yang diatur dan ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Universitas Andalas dalam Kebijakan Mutu Internal dan Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017 berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas No.218 tahun 2013 tentang kebijakan mutu internal Unand tahun 2014-2018. Selain itu, standar mutu dijabarkan ke dalam Surat Keputusan Dekan No.102 tahun 2015 tentang standar mutu internal FISIP tahun 2015-2019.

Berdasarkan Kebijakan dan Standar Mutu tersebut, maka sistem penjaminan mutu tesis Magister Ilmu Politik dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. setiap pengusulan judul tesis harus melalui prosedur penilaian kelayakan dalam rapat program magister. Hal ini bertujuan untuk mengontrol agar setiap usulan judul tesis diharapkan sesuai dengan visi, misi dan *roadmap* penelitian program magister. Selain itu, mahasiswa juga melakukan bimbingan secara informal dengan dosen program magister sebelum ditetapkan pembimbing mereka.
2. Setiap tesis mendapatkan bimbingan dari komisi pembimbing yang bergelar doktor dan atau magister berpangkat lektor kepala sesuai bidang ilmu yang relevan dengan topik/tema tesis. Dan penetapan komisi pembimbing dilakukan dalam rapat program magister agar proses penentuan komisi pembimbing benar-benar akuntabel dan transparan sesuai dengan kompetensi dan keahlian pembimbing. Komisi pembimbing dikenal juga dengan dosen pembimbing.
3. Setiap penyusunan tesis mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing dengan tujuan agar proses bimbingan dan kualitas isi serta hasil penelitian memperoleh hasil yang maksimal.
4. Lama proses bimbingan dan penelitian tesis dikontrol secara tertulis melalui lembar/form konsultasi isi dengan tujuan agar proses bimbingan tesis berjalan transparan dan akuntabel.
5. Setiap tesis yang disusun mahasiswa harus melalui proses pengujian dan penilaian dihadapan dewan penguji yang memiliki kompetensi relevan dengan topik/tema tesis baik dalam seminar proposal maupun ujian tesis. Ini dimaksudkan agar tesis yang dihasilkan mahasiswa benar-benar memiliki mutu sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
6. Format penulisan tesis mengikuti standar penulisan karya ilmiah.
7. Setiap hasil penelitian tesis mahasiswa harus dituangkan ke dalam artikel yang harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah elektronik (*online*) Universitas Andalas, nasional terakreditasi atau internasional.
8. Ditambah dengan kewajiban mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi

Kendala Yang dihadapi :

1. Masih ada usulan penelitian mahasiswa yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Namun, dengan adanya arahan dari pengelola program magister, maka usulan penelitian tesis tersebut dapat diperbaiki.

2. Adakalanya muncu persepsi yang berbeda di antara dosen pembimbing terkait dengan substansi penelitian mahasiswa sehingga menyulitkan mahasiswa.
3. Terbatasnya jumlah jurnal untuk publikasi dan lamanya waktu tunggu untuk publikasi juga menjadi kendala dalam melihat kualitas tesis mahasiswa yang dihasilkan

5.2.6 Jelaskan peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir studi magister, pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.

1. Ketetapan mengenai tim penguji dalam ujian akhir studi (tesis) Magister Ilmu Politik mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister Program Pasca sarjana Universitas Andalas dan sudah direvisi dengan Peraturan Rektor No.3/2016 tentang peraturan akademik. Susunan Tim Penguji ujian akhir studi (tesis) dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan FISIP yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota dan 2 (dua) orang dari Komisi Pembimbing.
2. Yang bertindak selaku Ketua Tim Penguji adalah Koordinator Program Magister Ilmu Politik, sedangkan penguji lainnya adalah dosen program Magister Ilmu Politik yang bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor.
3. Penetapan Nama-nama Tim Penguji dilakukan oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas usulan Koordinator Program Magister Ilmu Politik dengan mempertimbangkan usulan Rapat Program magister.
4. Kendala yang dihadapi adalah jika tidak tersedia Dosen Penguji yang memiliki bidang keahlian atau kajian yang relevan dengan topik atau tema tesis yang ditulis oleh mahasiswa, maka dosen ditetapkan sebagai tim penguji diambil dari dosen bergelar magister dengan kepangkatan akademik Lektor atau Lektor Kepala yang relevan bidang kajian tesis mahasiswa. Jika dimungkinkan, tim penguji juga dapat diambil dari luar instansi Universitas Andalas yang menguasai topik atau tema di dalam tesis mahasiswa.

5.3 Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1 Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

Mekanisme monitoring perkuliahan dilakukan dengan dua cara, yakni secara administratif dan substantif.

Secara administratif :

1. Monitoring perkuliahan dilakukan dengan cara melihat data tertulis yang dituangkan dalam map perkuliahan yang disediakan untuk setiap mata kuliah. Di dalam map

perkuliahan tersedia data dan informasi mengenai jumlah kehadiran dosen mengajar, kehadiran mahasiswa dan materi perkuliahan yang diajarkan setiap matakuliah dalam rentang satu semester.

2. Data Kehadiran dosen mengajar yang tertulis dalam map perkuliahan kemudian direkapitulasi dan evaluasi perkuliahan disampaikan dalam rapat program magister setelah semester berjalan.

Secara substantif :

1. Monitoring secara substantif dilakukan dalam rapat program magister dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari dosen pengasuh matakuliah baik mengenai kehadiran dosen bersangkutan maupun kehadiran mahasiswa.
2. Monitoring secara substantif melalui rapat program magister juga dilakukan untuk membahas materi perkuliahan untuk menghindari tumpang tindih maupun kelayakan materi bahan ajar.
3. Selain melalui rapat program magister, monitoring substantif juga dilakukan melalui rapat-rapat tim dosen pembina mata kuliah konsentrasi/peminatan.

5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya.

No.	Nama Mata Kuliah	Dosen Pengampu
1.	Politik Indonesia	Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, MA
2.	Perilaku Politik	Dr. Fachri Adnan, M.Si
3.	Teori Governance	Dr. Ria Aryani, M.Si
4.	Teori Politik	Dr. Asrinaldi, M.Si
5.	Teori Demokrasi	Prof. Dr. Afrizal, MA

Catatan: Soal terlampir bersama dokumen ini.

5.4 Penelitian Tesis

5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program magister ini, mencakup informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.

▪ Ketersediaan Panduan

Program Magister Ilmu Politik menyediakan panduan penulisan tesis agar mahasiswa yang menulis tesis dapat menghasilkan tesis yang sesuai dengan format ilmiah. Panduan tesis ini disusun oleh program magister dengan mengacu pada peraturan rektor sehingga terdapat kesamaan padangan dari tim penyusun panduan penulisan tesis tersebut.

▪ Kebijakan pembimbingan

Sistem pembimbingan penelitian tesis di Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister Program Pascasarjana Universitas Andalas sebagaimana direvisi dengan Peraturan Rektor No.3/2016 tentang peraturan akademik. Peraturan Rektor tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Buku Pedoman Program Magister Ilmu Politik Tahun 2013 yang didalamnya juga diatur mengenai persyaratan dan mekanisme pengusulan judul

penelitian tesis, mekanisme penunjukan Komisi Pembimbing dan persyaratan Dosen Pembimbing, serta mekanisme proses bimbingan hingga ujian tesis.

- Mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan serta proses pembimbingannya

Uraian ringkas mengenai proses, mekanisme dan persyaratan pembimbingan penelitian hingga ujian tesis diuraikan dalam borang 5.5.1 s/d 5.5.4.

5.4.2 Tuliskan nama dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya pada TS dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama Dosen Pembimbing Tesis	Pendidikan Tertinggi	Jabatan Akademik Dosen	Banyaknya Mahasiswa yang Dibimbing dan Status Pembimbing	
				Ketua	Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dr. Asrinaldi, M.Si	S3	Lektor Kepala	7	7
	Dr. Ria Aryani, M.Si	S3	Lektor Kepala	2	3
	Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, MA	S3	Guru Besar	4	-
	Dr. Aidinil Zetra, MA	S3	Lektor Kepala	8	8
	Dr. Fachri Adnan, M.Si	S3	Lektor Kepala	3	2
	Prof. Dr. Afrizal, MA	S3	Guru Besar	4	-
	Prof. Dr. Helmi, M.Sc	S3	Guru Besar	2	-
	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi	S3	Guru Besar	1	-
Total				31	20

5.4.3 Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis pada tiga tahun terakhir : Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk penulisan tesis (pengajuan pembimbing, ujian seminar proposal, ujian seminar hasil dan ujian tesis) memerlukan waktu selama delapan bulan (3 semester).

5.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran

Untuk setiap aspek pada subbutir 5.5.1 s.d. 5.5.4, uraikan (1) keberadaan *standard operating procedur* (SOP), (2) keberadaan dan keefektifan lembaga/komisi pelaksana, dan (3) mekanisme monev.

5.5.1 Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis

▪ Keberadaan Standard Operating Procedure

Pengelolaan Program Magister Ilmu Politik mengacu pada SOP yang sudah disusun sehingga terdapat dasar hukum, mekanisme dan prosedur yang jelas dalam melaksanakan setiap aktivitas di program magister. Hal ini juga memungkinkan pihak yang berkepentingan melakukan penilaian terkait dengan aktivitas program magister untuk mengawasi penyelenggaraan program magister sehingga terdapat upaya antisipatif terkait dengan kesalahan atau penyimpangan yang

akan terjadi. Sejumlah SOP sudah disusun dan harus dipedomani oleh seluruh pihak yang diatur oleh SOP tersebut. Misalnya, dalam aspek penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan tesis harus mengacu pada SOP yang disusun sehingga tesis yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

▪ **Keberadaan dan Keefektifan Lembaga/Komisi Pelaksana**

Penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa ini dikelola oleh koordinator program studi dan diputuskan melalui rapat program magister. Dengan mekanisme ini mekanisme pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan SOP yang ada, maka peserta rapat sebagai institusi/lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan dapat mengevaluasi proses penulisan tesis mahasiswa ini.

Misalnya dalam hal penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis dilakukan melalui tahapan berikut ini :

1. Setiap mahasiswa yang akan mengajukan usulan penelitian tesis diwajibkan mengisi form yang disediakan oleh program magister dengan melampirkan transkrip nilai dan satu berkas rancangan proposal penelitian tesis sesuai dengan peminatan/konsentrasi yang dipilih mahasiswa pada semester dua.
2. Setiap mahasiswa yang hendak mengajukan usulan penelitian tesis harus lulus 2 (dua) mata kuliah prasyarat yakni mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Politik dan Mata Kuliah Teori Politik.
3. Dalam berkas usulan penelitian tesis, berisi dua judul usulan penelitian tesis sesuai dengan peminatan dan dua nama dosen yang diusulkan untuk menjadi pembimbing tesis.
4. Seluruh berkas pendaftaran usulan penelitian diserahkan kepada Program Magister untuk dibahas dalam Rapat Program Magister.
5. Rapat program Magister dipimpin oleh Koordinator Program Magister S2 untuk menentukan persetujuan judul dan nama dosen pembimbing.
6. Setelah usulan judul penelitian dan dosen Pembimbing disetujui, kemudian mahasiswa menghubungi dosen bersangkutan untuk memberitahu persetujuan tersebut dan mengusulkan penerbitan surat keputusan (SK) Dekan.
7. Setelah SK Dekan diterbitkan, mahasiswa menyerahkan SK tersebut kepada dosen pembimbing dan menyepakati jadwal konsultasi bimbingan dengan dosen pembimbing.

▪ **Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa melalui tahapan berikut. Pertama, setiap mahasiswa mengajukan usul penelitiannya kepada program magister melalui koordinator program. Pada tahapan ini, koordinator program mempelajari kesesuaian usul penelitian tersebut dengan kompetensi yang dihasilkan nantinya. Jika terdapat kesesuaian, maka koordinator program membawa dokumen usulan mahasiswa tersebut ke tahapan rapat di program magister. Rapat yang melibatkan seluruh staf pengajar ini membahas usul penelitian untuk diberi masukan serta menentukan komis pembimbing untuk penelitian tesis tersebut. Dengan cara ini, maka pengawasan dan tindakan koreksi terkait dengan usul penelitian ini dapat dilakukan.

5.5.2 Proses penulisan tesis

Proses Penulisan tesis dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

Tahap Bimbingan Proposal Tesis:

1. Setelah mahasiswa memperoleh Surat Keputusan (SK) dekan tentang penetapan

pembimbing, kemudian mahasiswa menyerahkan kepada komisi pembimbing dan menyepakati jadwal konsultasi bimbingan bertiga yakni antara Pembimbing I, Pembimbing II dan mahasiswa.

2. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai draft proposal penelitian mahasiswa dan menyepakati topik, pendekatan teoritis, metode penelitian dan alur konsultasi bimbingan.
3. Setelah pertemuan dengan komisi pembimbing, proses bimbingan penulisan tesis diawali dari Pembimbing II (dua) hingga mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke Pembimbing I (satu).
4. Koreksi perbaikan draft proposal penelitian oleh Pembimbing II dan naskah perbaikan oleh mahasiswa tidak boleh lebih dari satu bulan yang dibuktikan dengan lembar monitoring bimbingan tesis.
5. Setelah proposal penelitian tesis disetujui oleh Pembimbing II (dua), mahasiswa menyerahkan proposal penelitian tesis kepada Pembimbing I (satu).
6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I (satu), selanjutnya mahasiswa mendaftar ke program magister untuk melaksanakan kolokium (Seminar proposal penelitian).

Tahap Kolokium

1. Pelaksanaan Kolokium (seminar proposal penelitian tesis) dilaksanakan terjadwal yang ditentukan oleh koordinator program magister.
2. Koordinator program magister mengusulkan nama dewan penguji dengan mempertimbangkan usulan komisi pembimbing dan rapat program magister.
3. Penetapan nama dewan penguji dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Dekan.
4. Pelaksanaan Kolokium dipimpin oleh Ketua komisi pembimbing (Pembimbing I) dan dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri dari dua orang Dosen Program Magister yang sesuai/relevan dengan topik yang diseminarkan.
5. Pelaksanaan Kolokium dilaksanakan terbuka dan wajib dihadiri oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang jumlah kehadiran seminar proposalnya belum mencukupi 5 (lima) kali kehadiran.
6. Hasil Kolokium (Seminar Proposal Penelitian) dituangkan dalam nilai dikalikan dengan bobot 1 (satu) SKS.
7. Blanko (form) penilaian dan kategori penilaian ditetapkan oleh program magister.
8. Setelah kolokium berakhir, mahasiswa wajib memperbaiki proposal penelitian sesuai rekomendasi dewan penguji kolokium dan meminta kembali persetujuan dari komisi pembimbing dan pengesahan dari koordinator program magister.

Tahap Penelitian Lapangan

1. Pelaksanaan penelitian tesis (penelitian lapangan) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing.
2. Pengurusan izin penelitian tesis dilakukan dengan mengisi form (blanko) yang disediakan oleh program magister dengan melampirkan proposal penelitian tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan mendapat pengesahan dari koordinator program magister.
3. Pengajuan surat izin penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa dengan menyerahkan surat dari program magister yang ditujukan kepada Dekan FISIP untuk diterbitkan menjadi surat pengantar izin penelitian tesis ke instansi yang berwenang.
4. Selama proses penelitian atau penelitian lapangan mahasiswa dapat melakukan konsultasi dan bimbingan dengan komisi pembimbing.

Tahap Penulisan Draft Tesis

1. Penulisan tesis dilakukan setelah mahasiswa selesai melaksanakan penelitian.
2. Konsultasi penulisan tesis dilakukan berjenjang dimulai dari Pembimbing II (dua) dalam bentuk draft tesis, dan setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing II, dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I (satu).
3. Penulisan tesis harus mengikuti pedoman penulisan tesis yang telah ditetapkan oleh program magister dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Politik.
4. Perbaikan dan penyerahan perbaikan draft tesis yang diberikan oleh Pembimbing, harus diselesaikan oleh mahasiswa tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.
5. Selama proses pelaksanaan konsultasi atau bimbingan penulisan tesis mahasiswa wajib mencatat tanggal bulan dan tahun di dalam lembar (form) monitoring bimbingan tesis, yang nantinya akan dilampirkan sebagai persyaratan ujian tesis.
6. Setelah draft tesis disetujui oleh komisi pembimbing, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk melaksanakan ujian tesis.

Tahap Penyerahan Tesis

1. Penyerahan tesis ke program magister dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan ujian tesis dihadapan dewan penguji dan memperbaiki tesis sesuai rekomendasi ujian tesis.
2. Tesis dapat diterima oleh program magister setelah mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing maupun dewan penguji, serta pengesahan dari koordinator program magister.
3. Tesis yang diserahkan ke program magister sebanyak 4 (empat) eksemplar yang diperuntukkan satu rangkap untuk koleksi perpustakaan Universitas Andalas (perpustakaan pascasarjana), satu rangkap untuk koleksi *reading room* program magister, dan dua rangkap untuk dua orang dosen pembimbing.

5.5.3 Kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.

Penetapan kelayakan dosen pembimbing tesis di Program Magister Ilmu Politik didasarkan pada kriteria dan ketentuan berikut ini :

1. Dosen yang berhak menjadi dosen pembimbing tesis adalah mereka yang bergelar Doktor atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala/Golongan IV a.
2. Penetapan dosen pembimbing tesis diprioritaskan sesuai dengan bidang keahlian/kajian yang dimilikinya dan relevan dengan topik tesis mahasiswa.
3. Setiap dosen diberi kesempatan untuk menjadi pembimbing tesis mahasiswa paling banyak 6 orang mahasiswa bimbingan.
4. Setiap dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk proses bimbingan sedikitnya satu jam dalam seminggu untuk satu orang mahasiswa bimbingannya dalam bentuk tatap muka di kampus selama jam kerja.
5. Jika diperlukan proses pembimbingan dapat juga dilakukan melalui email atau media internet lainnya, tanpa mengurangi kewajibannya untuk tetap melakukan proses bimbingan dengan cara tatap muka di kampus.

5.5.4 Ujian akhir studi magister.

Ujian akhir di Program Magister Ilmu Politik dilakukan dalam bentuk ujian tesis. Ketentuan untuk mengikuti ujian tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian tesis apabila tesisnya telah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan Pembimbing II untuk dilanjutkan mengikuti ujian tesis.
2. Pendaftaran ujian tesis dilakukan dengan mengisi *form* (blanko) surat permohonan ujian tesis yang disediakan oleh Program Magister dengan melampirkan (i) bukti terdaftar (registrasi) sebagai mahasiswa Magister Ilmu Politik pada tahun berjalan; (ii) bukti pembayaran ujian tesis, (iii) nilai/skor TOEFL minimal 500; (iv) Naskah tesis yang telah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan Pembimbing II untuk mengikuti ujian tesis; (v) transkrip nilai semua kuliah yang sudah ditempuh dan telah lulus sesuai persyaratan Program Magister Ilmu Politik.
3. Permohonan ujian tesis diajukan secara tertulis kepada koordinator program magister.
4. Koordinator program magister menetapkan dewan penguji yang terdiri dari ketua dewan penguji, ditambah 2 (dua) orang anggota dewan penguji, serta komisi pembimbing.
5. Penetapan dewan penguji dilakukan oleh koordinator program magister dengan mempertimbangkan saran komisi pembimbing dan rapat program magister.
6. Setelah dewan penguji ditetapkan oleh koordinator program magister, mahasiswa menghubungi dan meminta persetujuan kepada dosen yang ditunjuk sebagai dewan penguji.
7. Nama-nama dewan penguji ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
8. Jadwal ujian tesis ditetapkan oleh program magister.
9. Ujian tesis dilaksanakan dalam bentuk seminar dan terbuka untuk umum, serta wajib dihadiri mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang sedang menjalani proses bimbingan tesis.

Sistem Penilaian Ujian Tesis

1. Hasil ujian tesis dinyatakan dalam bentuk penilaian angka dan huruf yang dituliskan di dalam form penilaian berdasarkan kategori-kategori tertentu yang disediakan oleh program magister. Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut :
A untuk nilai 86-100
A- untuk nilai 81-85
B+ untuk nilai 76-80
B untuk nilai 71-75
2. Hasil ujian tesis diberikan oleh seluruh dewan penguji dan komisi pembimbing
3. Selain penilaian hasil ujian tesis, dewan penguji (selain Komisi Pembimbing) juga memberikan rekomendasi hasil ujian yang dituangkan ke dalam form yang disediakan oleh program magister untuk ditindaklanjuti oleh mahasiswa.
4. Pelaksanaan ujian tesis dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Ujian Tesis yang ditandatangani oleh seluruh dewan penguji dan komisi pembimbing.

5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:

- 5.6.1 Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).

Kebijakan tentang suasana akademik ini diatur dala Statuta Universitas Andalas BAB VII Pasal 89 dan 90 sebagai berikut.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 89

- (1) Pimpinan UNAND wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNAND;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNAND, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNAND untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Bangsa dan Negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNAND.

Pasal 90

- (1) UNAND wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- 5.6.2 Jelaskan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana (laboratorium, ruang kerja mahasiswa, ruang seminar, perpustakaan, *common room*, prasarana olah raga dan seni, ibadah dll.), sarana (koleksi jurnal ilmiah dan buku, akses internet, fasilitas komputer, fasilitas lab., sarana olah raga dan seni dll.) dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Selain prasarana dan sarana yang disediakan oleh universitas dan Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Politik memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Satu buah *reading room* seluas 6x6 meter,
2. Tersedia koleksi buku yang relevan dengan program magister Ilmu Politik sebanyak 600 judul, dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa.
3. Tersedia satu buah PC dan Printer yang diperuntukan mahasiswa untuk mengakses internet.
4. Dua buah ruang seminar dengan kapasitas 20 orang,
5. Ruang kuliah dan sekretariat program dilengkapi dengan jaringan WIFI
6. Satu buah ruangan interaksi untuk bimbingan dan konseling mahasiswa dengan dosen pembimbing.
7. Satu buah ruangan untuk dosen luar biasa.

- 5.6.3 Jelaskan interaksi akademik berupa program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Interaksi akademik yang dilakukan Program Magister Ilmu Politik baik dalam maupun luar proses pembelajaran antara lain :

1. Di dalam proses pembelajaran, interaksi akademik dilakukan melalui dua cara : (a) Ketika bimbingan/konseling mahasiswa dengan dosen pada saat akan melakukan pemilihan tema penelitian sebagai bagian peminatan keahlian. Pada saat itu mahasiswa mendapatkan gambaran tentang substansi tema penelitian sesuai dengan rencana topik yang akan

dijadikan tesis. (b) Melalui kehadiran dalam seminar proposal, kolokium dan ujian tesis Ketika seminar/kolokium dan ujian tesis berlangsung mahasiswa diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut maksimal sebanyak 5 kali kehadiran dan diperbolehkan memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian tesis ataupun kolokium. (c) Mendatangkan Dosen tamu yang sesuai dengan topik materi yang akan diberikan sebagaimana tertera dalam silabus.

2. Sedangkan interaksi akademik di luar proses pembelajaran diantaranya (a) Lokakarya penyusunan kurikulum yang dilakukan sebelum dan setelah Program Magister Ilmu Politik diizinkan oleh DIKTI untuk diselenggarakan, tepatnya pada bulan Oktober 2012. (b). Bedah Buku salah seorang dosen tetap yang bukunya dijadikan topik untuk pembelajaran yang melibatkan mahasiswa S2, (c) Kuliah Umum yang dilakukan setiap awal dimulainya tahun akademik. Kuliah umum disampaikan oleh para pakar dengan topik-topik yang aktual dan relevan untuk didiskusikan oleh para mahasiswa dan dosen Program Magister Ilmu Politik dan Ilmu sosial lainnya. (d) *Road show* program magister ke beberapa daerah, khususnya ke beberapa instansi pemerintah untuk memperkenalkan Program Magister Ilmu Politik kepada aparat pemerintah daerah setempat. Beberapa lokasi yang pernah dikunjungi antara lain: Pemerintah Kabupaten Mentawai, DPRD Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemkab Muaro Bungo (Jambi), Pemerintah Kota Jambi dan FISIP Universitas Jambi.

5.6.4 Jelaskan upaya PS untuk mengembangkan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan kemampuan untuk memberikan tanggapan dan solusinya.

Beberapa upaya Program Magister Ilmu Politik dalam mengembangkan perilaku kecendekiawanan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, lingkungan serta memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah secara ilmiah diantaranya :

1. Penanggulangan kemiskinan di daerah sekitar kampus melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen-dosen dan mahasiswa. Biasanya sebelum kegiatan dilaksanakan, dosen dan mahasiswa diminta melakukan *surveillance* untuk mendapatkan data awal untuk dibahas bersama sebagai dasar untuk mencari solusi terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui pengabdian masyarakat.
2. Kegiatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon pelindung di sekitar kampus FISIP yang dilakukan dosen program magister bersama mahasiswa baru S1 dan S2 setiap ajaran baru akan dimulai. Selain itu, kegiatan pelestarian lingkungan ini juga mengundang forum dekan Fakultas Ilmu Sosial se-Indonesia yang melakukan rapat kerja di FISIP Universitas Andalas untuk ikut menanam pohon pelindung di lahan FISIP Universitas Andalas.

STANDAR 6

PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

6.1 Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Jelaskan keterlibatan Program Magister Ilmu Politik dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.

Berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa pengelolaan dana untuk Program Magister Ilmu Politik masih bersifat sentralistik/terpusat di universitas. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening milik Negara /lembaga/satuan kerja. Artinya pengelolaan keuangan untuk Program Magister Ilmu Politik tetap dilakukan oleh universitas dan fakultas. Namun demikian, dalam perencanaan anggaran, fakultas tetap mempergunakan prinsip *bottom up*, yaitu fakultas melibatkan Program Magister Ilmu Politik dalam proses perencanaan anggaran disetiap rapat pembuatan anggaran oleh pihak fakultas. Program Magister Ilmu Politik merencanakan program kerja untuk setiap tahunnya melalui rapat Program Magister Ilmu Politik, dan menyusun rencana program kerja untuk tahun berikutnya. Dalam penyusunan rencana program kerja, program Magister Ilmu Politik menunjuk tim yang akan merancang program kerja beserta anggarannya dan hasil kerja Tim Penyusun Program Kerja tersebut dibahas dalam rapat program Magister Ilmu Politik untuk dimintai persetujuan. Rencana Program Kerja tahunan yang telah disahkan oleh rapat program Magister Ilmu Politik diajukan ke tingkat fakultas dan universitas.

Dana yang dikelola oleh universitas dan fakultas kemudian didistribusikan kepada tiap tiap program studi yang ada di lingkungan FISIP termasuk kepada Program Magister Ilmu Politik untuk dilaksanakan. Pada dasarnya Program Magister Ilmu Politik melaksanakan kegiatan berdasarkan jumlah anggaran yang diterima dari universitas dan fakultas. Penggunaan dan pembelanjaan dana kegiatan Program Magister Ilmu Politik disertai dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan anggaran belanja Program Magister Ilmu Politik disesuaikan dengan RKA-KL yang sudah disahkan sebelumnya. Untuk akuntabilitas penggunaan dana Program Magister Ilmu Politik, laporan penggunaan dana disampaikan setiap akhir tahun dalam rapat program yang sudah diagendakan.

6.2.1 Tuliskan realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

Sumber Dana	Jenis Dana	Total Jumlah Dana (Juta Rupiah)			
		2014	2015	2016	Rata-Rata per Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usaha sendiri		0	0	0	0
Penelitian		238.500.000	1.695.000.000	1.102.000.000	1.011.833.333
Pengabdian		198.500.000	156.000.000	56.000.000	136.800.000

Mahasiswa	Biaya Pendaftaran	4.000.000	5.500.000	3.000.000	4.166.667
	Biaya kuliah per semester (SPP)	48.000.000	66.000.000	36.000.000	50.000.000
	Matrikulasi	-	16.500.000	9.000.000	12.750.000
	Biaya Bimbingan Tesis	32.000.000	44.000.000	24.000.000	33.333.333
	Jaket dan Orientasi	6.800.000	9.350.000	5.100.000	7.083.333
Dosen	Gaji	633.048.746	661.919.503	746.028.227	680.332.166
	Tunjangan Serdos	487.747.806	519.189.888	552.888.200	519.941.966
	Tunjangan Kehormatan Guru Besar	0	0	116.811.633	
Pemerintah (Pusat & Daerah)	0	0	0	0	0
Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)	0	0	0	0	0
Total		1,648,596,552	3,173,459,391	2,643,828,060	2.488.628.001

* Selisih angka rata-rata pada TS disebabkan karena sumber kerja sama hanya pada 2 (dua) tahun terakhir.

6.2.2 Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir :

2014		2015		2016	
Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dana Operasional (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1= 8	B1=114.010.000	A2=11	B2=216.013.000	A3=6	B3=198.572.000
Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = Rp. 21.143.800 Gunakan rumus: $(B1+B2+B3)/(A1 + A2 + A3)$					

Catatan: Dana operasional adalah seluruh dana yang digunakan oleh PS untuk penyelenggaraan program, termasuk gaji, upah, pembelian bahan dsb. (Kecuali dana untuk pembangunan dan penelitian tesis).

6.2. Tuliskan dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Penelitian	Nama Dosen yang Terlibat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana* (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis <i>Mobile Web</i> untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan konstituen	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Dikti 2016	50.000.000
	Dampak Perubahan Sosial-Politik Makro Terhadap Proses Pembebasan Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Pengaruh Konteks Sosial-politik terhadap Penerapan Prinsip dan Kriteria FPIC RSPO)	Prof. Dr. Afrizal, M.A	DP2M DIKTI	180.000.000
	Gerakan lingkungan di Indonesia antara memperjuangkan alam dan masyarakat	Prof.Dr.Afrizal, MA	PUPT – Hibah Guru Besar	110.000.000
	Konflik Pasar Raya Padang	Prof.Dr. Afrizal, MA dan Dr. Indraddin	Ristekdikti	80.000.000
	Model Pemberdayaan Nelayan Miskin di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang	Dr. Syahrizal, M.Si	DP2M DIKTI	100.000.000
	Pemodelan status gizi balita untuk mengevaluasi kebijakan kesehatan dalam menanggulangi prevalensi gizi buruk di Kabupaten pesisir selatan	Dr. Aidinil Zetra, M.A	BOPTN 2016 Universitas Andalas	50.000.000
	Analisis Dan Konstruksi Model Tentang Koneksitas Budaya Enterpreneurship, Jaringan Sosial Dan Kesukubangsaan Dari Para Migran Pelaku Bisnis Kelas Menengah Kecil Di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan.	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi Dr. Syahrizal, M.Si	PUPT – Hibah Guru Besar	110.000.000
	Gerakan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia: Rekonsiliasi Kepentingan	Prof.Dr. Afrizal, MA	BPOPTN	110.000.000

	Alam dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan			
	Nelayan dan Ketimpangan: Studi tentang Sistem Bagi Hasil dalam Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Sumatera Barat.	Dr. Syahrizal, M.Si	DIPA FISIP UNAND	12.000.000
	Kepuasan Peserta KB MKJP terhadap Kualitas Pelayanan di Sumatera Barat	Prof.Dr. Afrizal,MA Dr.Jendrius, M.Si	BKKBN	150.000.000
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kab. Pasaman	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Lit.Bangda Kab.Pasaman	150.000.000
	Strengthening local government and community capacity to deal with environmental changes	Prof. Helmi	Unesco	USD 40,000 (540.000.000)
JUMLAH KESELURUHAN				1.642.000.000
2015	Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis <i>Mobile Web</i> untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan konstituen	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Hibah Bersaing, Dikti 2015	65.000.000
	Dampak Perubahan Sosial politik Makro Terhadap Proses Pembebasan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit: Studi	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Dikti	180.000.000
	Pendidikan Politik bagi Santri di Pesantren Salafiyah Kab. Padang Pariaman	Dr. Asrinaldi, M.Si	DIPA FISIP Unand	5.000.000
	Gerakan Lingkungan di Indonesia ; antara memperjuangkan masyarakat dan kelestarian alam	Prof. Dr. Afrizal, M.A	DIPA Unand	110.000.000
	Riset Partisipasi dalam Pemilu: Perilaku Memilih Masyarakat Kota Bukittinggi	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Kerjasama KPU Kota Bukittinggi dan Polokda Unand	50.000.000
	Kesukarelaan Politik Masyarakat Kota Sawahlunto	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Kerjasama KPU Kota Sawahlunto dan Polokda Unand	65.000.000
	Partisipasi Politik dan	Dr. Aidinil Zetra,	Kerjasama	60.000.000

	Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan	M.A	KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Polokda Unand	
	Kehadiran dan Ketidakhadiran Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu 2014	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Kerjasama KPU Kabupaten Dharmasraya dan Polokda Unand	50.000.000
	Partisipasi Politik Masyarakat Kota Payakumbuh	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Kerjasama KPU Kota Payakumbuh dan Polokda Unand	55.000.000
	Pilot Project Pengukuran Indeks Kesiapan Masyarakat dalam Merespon Fenomena Global Village di wilayah Provinsi Sumatera Barat.	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi	LIPI	750.000.000
	Potret Keluarga di Sumatera Barat	Prof. Dr. Afrizal, M.A	BKKBN Sumatera Barat	50.000.000
	Perkawinan Anak di Sumatera Barat	Prof. Dr. Afrizal, M.A	BKKBN Sumatera Barat	25.000.000
	Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Pusat Layanan Pemerintah Di Sumatera Barat	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prov.Sumatera Barat	80.000.000
	Kepuasan Terhadap Pelayanan Metode	Prof. Dr. Afrizal, M.A	BKKBN Sumatera Barat	150.000.000
JUMLAH				1.695.000.000
2014	Studi Budaya Pasar Tradisional Dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan Kasus Pasar Nagari Dan Masyarakat Nagari Di Propinsi Sumatera Barat	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi Wedi Nasrul, SE., M.Si	DP2M DIKTI	50.000.000
	IbM Perumusan Agenda Dalam Penyusunan Kebijakan Publik bagi Koalisi Masyarakat Sipil di Kota Padang	Dr. Asrinaldi, M.Si	DIPA FISIP UNAND	3.500.000
	Pola Kekerasan Seksual di Sumatera Barat	Prof.Dr.Afrizal, MA	FISIP	50.000.000

	Hubungan Partai Politik dengan Konstituen di Propinsi Sumatera Barat	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Mandiri	40.000.000
	Penguatan Hubungan Anggota Partai Politik dengan Masyarakat Pemilih (Konstituen)	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Kerjasama Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unand	75.000.000
	Rekrutmen Dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik (Tingkat Nasional)	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	Koalisi Perempuan Indonesia	20.000.000
JUMLAH				238.500.000
TOTAL KESELURUHAN				3.575.500.000
Rata-rata per tahun				1.191.833.333

* Di luar dana penelitian/penulisan tesis sebagai bagian dari studi lanjut.

6.2.4 Tuliskan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tahun	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber dan Jenis Dana	Jumlah Dana (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	Peningkatan Kapasitas Aktivis Perempuan Dalam Mengadvokasi Kebijakan Publik di Sumatera Barat	DIPA FISIP UNAND	3.500.000
	Peningkatan Pemahaman Kader Partai Persatuan Pembangunan Kota Pariaman Dalam Melakukan Personal Branding Menjelang Pemilu Tahun 2019	DIPA FISIP UNAND	3.500.000
	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Partai Politik di Kota Payakumbuh	Kesbangpol Kota Payakumbuh	14.000.000
	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Ormas di Kab.Pasaman Barat	Kesbangpol Kab. Pasaman Barat	10.000.000
	Sosialisasi Politik Untuk Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab.Pasaman Barat	Kesbangpol Kab. Pasaman Barat	10.000.000
	Pendidikan Politik Untuk Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Sawahlunto	Kesbangpol Prov. Sumbar	15.000.000
JUMLAH	56.000.000		
2015	Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Di Kabupaten Kepulauan	DIPA-Unand	5.000.000

	Mentawai		
	Pendidikan Politik Bagi Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Salafiyah “Nurul Yaqin” Ambung Kapur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.	DIPA Fisip	5.000.000
	Voter Education untuk Siswa SLTA di Kabupaten Padang Pariaman	DIPA Fisip	7.500.000
	Pelatihan Penguatan Peran anggota Dewan Perempuan dalam pembuatan kebijakan public	DIPA Fisip	5.000.000
	Pelatihan Pemilih Muda RVTI	KPU Sumbar – CEPP UNAND	75.000.000
	Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Tambang Emas Rakyat Di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung (2015/2016)	Pemerintahan Nagari	2.500.000
	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Partai Politik di Kota Payakumbuh	Kesbangpol Kota Payakumbuh	14.000.000
	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Ormas di Kab. Pasaman Barat	Kesbangpol Kab. Pasaman Barat	10.000.000
	Sosialisasi Politik Untuk Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab. Pasaman Barat	Kesbangpol Kab. Pasaman Barat	10.000.000
	Pendidikan Politik Untuk Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Sawahlunto	Kesbangpol Prov. Sumbar	15.000.000
	Pelatihan Metode Survey Preferensi Pemilih untuk Pengurus dan Kader Partai Gerindra Kota Padang	Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kota Padang	7.000.000
JUMLAH			156.000.000
2014	Model Pembekajaran Problem based-instruction melalui penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah pada guru SMA di kota Padang (prof. Nuh)	DIPA Fisip	5.000.000
	Pelatihan Penguatan Peran anggota Dewan Perempuan dalam pembuatan kebijakan publik	DIPA Unand	5.000.000
	Pengabdian Masyarakat Berbasis Prodi Ilmu Politik ke Dinas Pendidikan Solok Selatan, Rabu 12 November 2014 di SMP 12 Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan	DIPA Unand	5.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aktivis Perempuan Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Kota Padang	DIPA Fisip	5.000.000

	Pelatihan Metode Pembelajaran Pengembangan Demokrasi Substantif Untuk Guru Guru PPKN di SMP/SMA Se- Kabupaten Solok	DIPA Fisip	5.000.000
	IBM Perumusan Agenda Dalam Penyusunan Kebijakan Publik bagi Koalisi Masyarakat Sipil di Kota Padang	DIPA Fisip	3.500.000
	Pelatihan Pemilih Muda RVTI	Dirjen Kemendagri-CEPP FISIP-UI	75.000.000
	Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula di Kabupaten Limapuluh Kota	Badan Kesbangpol Kabupaten Limapuluh Kota	40.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Petugas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan	Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan	30.000.000
	Pelatihan Teknik Perencanaan Pembangunan Partisipatif untuk Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Tanah Datar	Pemda Kabupaten Tanah Datar	25.000.000
JUMLAH			198.500.000
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN :			410.500.000
Rata-rata per tahun			136.800.000

6.3 Prasarana

6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut :

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen	-	(a)-
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen	-	(b)-
Satu ruang untuk 2 dosen	-	(c)-
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)	6 Orang	(d) 4x4m ² /Per-Dosen 6 orang x 16m ²
Total		(t)

6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (*bandwidth*) untuk mahasiswa program magister.

Penyediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bekerja maupun berdiskusi sudah diusahakan oleh program magister. Tersedianya fasilitas meja dan kursi yang dilengkapi dengan aliran daya listrik untuk penggunaan komputer berada diselasaran gedung magister Ilmu Politik. Untuk kebutuhan informasi, tersedia jaringan internet dan wifi yang tersedia diseluruh gedung kampus Universitas Andalas. Kapasitas jaringan internet ini

terus ditingkatkan bandwithnya menjadi 200 MB (Indosat) dan 1,23 TB (Telkomsel). Program Magister Ilmu Politik juga menyediakan satu unit PC dan printer di ruang baca untuk dimanfaatkan mahasiswa dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas dan pencarian referensi melalui internet dan mengakses jaringan i-Learn, akses online ke koneksi perpustakaan pusat dan semua ruang baca yang ada di FISIP serta mengakses e-book dan e-jurnal. Namun biasanya mahasiswa sudah bisa mengakses langsung internet melalui jaringan wifi dan LAN yang disediakan di FISIP.

6.3.3 Tuliskan data prasarana(kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. **kecuali** ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

No .	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ruang Kuliah	Gedung C lantai 2 Jurusan Ilmu Politik (2 ruangan) , Gedung Pasca Sarjana Jl. Situjuh (6 ruangan)		√		√		Universitas (24jam/Minggu)
2	Perpustakaan Unand	1	1241,28	√		√		Perpustakaan Unand
3	Ruang seminar fakultas	2	102	√		√		Fakultas (20Jam/minggu)
4	Ruang Program	1	120	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)
5	Ruang Sidang	1	39	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)
6	Labor/Ruang Baca S1 Ilmu Politik	1	30	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)
7	Ruang Baca S2 Ilmu Politik	1	30	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)
8	Ruang GKM	1	16	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)
9	Ruang Ketua Program	1	20	√		√		Jurusan (40Jam/Minggu)

Keterangan:SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

6.3.4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laboratorium Komputer ICT	1	4096	SD		Terawat		Universitas
2	Lapangan Bola	1	20370	SD		Terawat	-	Universitas
3	Lapangan Futsal	1	10780	SD		Terawat	-	Universitas
4	Gedung Auditorium	1	6000	SD		Terawat	-	Universitas
5	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)	1	2700	SD		Terawat	-	Universitas
6	Lap. Tenis	1	200	SD		Terawat	-	Universitas
7	Lap. Bulu Tangkis	1	200	SD		Terawat	-	Universitas
8	Convention Hall	1	500	SD		Terawat	-	Universitas
9	Poliklinik	1	10	SD		Terawat	-	Universitas
10	Rumah Sakit	1	21.000	SD		Terawat	-	Universitas
11	Mesjid	1	1000	SD		Terawat	-	Universitas
12	Kafe Queen	1	144	SD		Terawat		Universitas
13	FISIP Meeting Corner	1		SD		Terawat	-	Fakultas
14	Lobi Prodi	2	100	SD		Terawat	-	Fakultas
15	Musholla Ar-Rasyiid	1	144	SD		Terawat	-	Fakultas
16	Lapangan Olah raga	1	162	SD		Terawat	-	Fakultas

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

6.4 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik

6.4.1 Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal baik dalam bentuk tercetak (*hard copy*) maupun dalam bentuk elektronik (bentuk CD-ROM dan media lainnya))

Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut:

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks	2125	4250
Jurnal nasional yang terakreditasi	5	36
Jurnal nasional yang tidak terakreditasi	1	13

Jurnal internasional	6	65
Prosiding	21	21
Tesis	70	70
Disertasi	25	25
TOTAL	2253	4480

Isikan jurnal/prosiding seminar yang tersedia/ yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jurnal yang tersedia/ yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal nasional Terakreditasi DIKTI*	1. Jurnal Studi Pemerintahan	Vol 4 No 1 Februari 2013 Vol 4 No 2 Agustus 2013 Vol 5 No 1 Februari 2014 Vol 5 No 2 Agustus 2014 Vol 6 No 1 Februari 2015 Vol 6 No 2 Agustus 2015 Vol 7 No 1 Februari 2016 Vol 7 No 2 Mei 2016	8
	2. Jurnal kebijakan dan administrasi publik	Vol 17, nomor 1 november 2013 Vol 17, nomor 2 november 2013 Vol 18, nomor 1 november 2014 Vol 18, nomor 2 november 2014 Vol 19, nomor 1 november 2015 Vol 19, nomor 2 november 2015	6
	3. Jurnal Sosiohumaniora LPPM Unpad	Vol 15 no 1 maret 2013 Vol 15 no 2 Juli 2013 Vol 15 no 3 november 2013 Vol 16 no 2 Juli 2014 Vol 16 no 3 november 2014 Vol 17 no 1 maret 2015 Vol 17 no 2 Juli 2015 Vol 17 no 3 november 2015 Vol 18 no 1 maret 2016 Vol 18 no 2 juli 2016	10
	4. Jurnal ilmu administrasi dan organisasi bisnis & birokrasi UI	Vol 20 no 1 januari 2013 Vol 20 no 2 May 2013 Vol 20 no 3 September 2013 Vol 21 no 1 januari 2014 Vol 21 no 2 May 2014 Vol 21 no 3 september 2014	6
	5. Jurnal Mimbar UNISBA	Vol 29 no 1, 2013 Vol 29 no 2 maret 2013 Vol 30 no 1, 2014 Vol 30 no 2 2014 Vol 31 no 1 2015 Vol 31 no 2, 2015	6

Jurnal nasional belum Terakreditasi DIKTI*	1. Analisis Center For Strategic And Internasional Studies (CSIS)	Vol.42, No.1 Maret 2013 Vol.42, No.2 Juni 2013 Vol. 42, No.3 September 2013 Vol. 42, No.4 Desember 2013 Vol.43 No.1 Maret 2014 Vol.43 No.2 Juni 2014 Vol. 43 No.3 September 2014 Vol.43, No.4 Desember 2014 Vol.44, No.1 Maret 2015 Vol.44, No.2 Juni 2015 Vol.44, No.3 September 2015 Vol. 44, No.4 Desember 2015 Vol.45, No.1 Maret 2016	13
Jurnal Internasional *	1. International Political Science Review	Vol 36 Number 1 January 2015 Vol 36 Number 2 March 2015 Vol 36 Number 3 June 2015 Vol 36 Number 4 September 2015 Vol 36 Number 5 November 2015 Vol 37 Number 1 January 2016 Vol 37 Number 2 March 2016 Vol 37 Number 3 June 2016 Vol 37 Number 4 September 2016 Vol 37 Number 5 November 2016	10
	2. American Journal of Political Science	Vol 58 Number 1 January 2014 Vol 58 Number 1 April 2014 Vol 60 Number 1 January 2016	3
	3. Electoral Studies	Vol 32 Issue 1 Maret 2013 Vol 32 Issue 2 Juni 2013 Vol 32 Issue 3 September 2013 Vol 32 Issue 4 Desember 2013 Vol 33 Maret 2014 Vol 34 Juni 2014 Vol 35 September 2014 Vol 36 Desember 2014 Vol 37 Maret 2015 Vol 38 Juni 2015 Vol 39 September 2015 Vol 40 Desember 2015 Vol 41 Maret 2016 Vol 42 Juni 2016	14

	4. Government Information Quarterly	Vol 30 Supp 1 January 2013 Vol 30 Issue 1 Januari 2013 Vol 30 Issue 2 April 2013 Vol 30 Issue 3 Juli 2013 Vol 30 Issue 4 Oktober 2013 Vol 31 Issue 1 Januari 2014 Vol 31 Issue 2 April 2014 Vol 31 Issue 3 Juli 2014 Vol 31 Issue 4 Oktober 2014 Vol 32 Issue 1 Januari 2015 Vol 32 Issue 2 April 2015 Vol 32 Issue 3 Juli 2015 Vol 32 Issue 4 Oktober 2015 Vol 33 Issue 1 Januari 2016 Vol 33 Issue 2 April 2016 Vol 33 Issue 3 Juli 2016	16
	5. Policy and Society	Vol 32 Issue 1 Maret 2013 Vol 32 Issue 2 Mei 2013 Vol 32 Issue 3 September 2013 Vol 32 Issue 4 Desember 2013 Vol 33 Issue 1 Maret 2014 Vol 33 Issue 2 Juni 2014 Vol 33 Issue 3 September 2014 Vol 33 Issue 4 Desember 2014 Vol 34 Issue 1 Maret 2015 Vol 34 Issue 2 Juni 2015 Vol 34 Issue 3-4 September-Desember 2015 Vol 35 Issue 1 Maret 2016 Vol 35 Issue 2 Juni 2016	
	6. Political Geography	Vol 32 Januari 2013 Vol 33 Maret 2013 Vol 34 Mei 2013 Vol 35 Juli 2013 Vol 36 September 2013 Vol 37 November 2013 Vol 38 Januari 2014 Vol 39 Maret 2014 Vol 40 Mei 2014 Vol 41 Juli 2014 Vol 42 September 2014 Vol 43 November 2014 Vol 44 Januari 2015 Vol 45 Maret 2015 Vol 46 Mei 2015 Vol 47 Juli 2015 Vol 48 September 2015 Vol 49 November 2015 Vol 50 Januari 2016 Vol 51 Maret 2016 Vol 52 Mei 2016 Vol 53 Juli 2016	22

Jika pelanggan *e-journal*, agar dilampirkan daftar judul jurnal yang dapat diakses penuh.

Jurnal Internasional:

1. Sciencedirect.com
2. Gen.lib.rus.ec
3. Sci-hub.cc
4. <https://www.researchgate.net>
5. <http://www.proquest.co.uk>
6. www.e-journal.com
7. www.doaj.com

Jurnal Nasional:

1. Perpustakaan daerah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Bung Hatta
3. Pustaka Tun Sri Lanang (PTSL), Univ.Kebangsaan Malaysia
4. <http://Ilearn.unand.ac.id>
5. <http://www.repository.unand.ac.id>
6. <http://jurnaltropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro#>
7. <http://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn>
8. www.e-journal.com
9. www.jurnalperempuan.org
10. www.ipu.org
11. <http://jiis.sunan-ampel.ac.id>
12. Jurnal.unair.ac.id
13. <https://www.e-book.com>
14. <https://www.kemitraan.or.id>
15. <https://www.ti.or.id>
16. <https://www.researchgate.net>
17. <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas>
18. aipi-politik.org

Berikut beberapa lampiran gambar situs sumber pustaka diatas:

Gambar dalam www.jurnalperempuan.org



Yayasan Jurnal Perempuan

Lahir sejak tahun 1995 dengan menerbitkan Jurnal Perempuan (terbit tahun 1996), jurnal feminis pertama di Indonesia yang dibaca

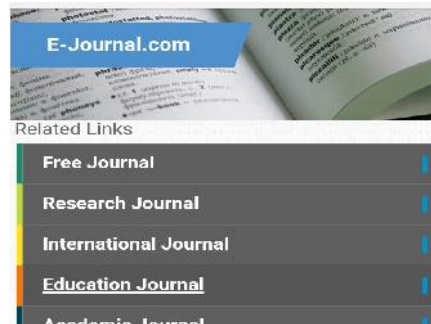
Gambar dalam Sci-hub.cc



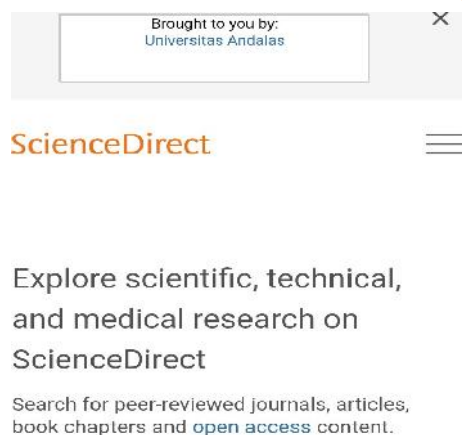
Gambar dalam Gen.lib.rus.ec



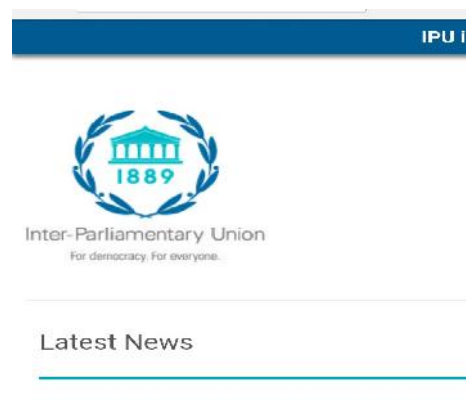
Gambar dalam www.e-journal.com



Gambar dalam Sciencedirect.com



Gambar dalam www.ipu.org



6.4.2 Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laboratorium/Ruang baca Program Magister Ilmu Politik	LCD Projector	2	SD		Terawat	-	25 jam/minggu
		TV 30 inci	1	SD		Terawat		20 jam/minggu
		Jaringan internet dan wifi	1	SD		Terawat		60 jam/minggu
		White Board	2	SD		Terawat	-	25 jam/minggu
		PC + LCD Monitor	2	SD		Terawat	-	25Jam/minggu
		print + scan + copy	1	SD		Terawat	-	15Jam/minggu
		standing board	2	SD		Terawat	-	10Jam/minggu
		camera digital	2	SD		Terawat	-	3 Jam/minggu
		Wireless + Mic	2	SD		Terawat	-	10Jam/minggu
		Handycam	1	SD		Terawat	-	3 Jam/minggu
		Laptop	4	SD		Terawat	-	25Jam/minggu
		Meja Sidang	3	SD		Terawat	-	30jam/minggu
		Kursi	15	SD		Terawat	-	30jam/minggu
		AC	1	SD		Terawat	-	30jam/minggu
		printer laser jet	2	SD		Terawat	-	15jam/minggu
		screen LCD projector	3	SD		Terawat	-	25Jam/minggu

Keterangan:SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

6.5 Sistem Informasi

6.5.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program magister untuk proses pembelajaran (*hardware, software, e-library, dll.*), administrasi, dan pengambilan keputusan.

Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan di Program Magister Ilmu Politik untuk pembelajaran antara lain berupa:

- a. Program Magister Ilmu Politik sudah memanfaatkan e-Learning, e-Library dan e-Book yang dapat diakses melalui portal akademik Universitas Andalas (www.portal.unand.ac.id) guna membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan. Selain itu fasilitas pembelajaran berupa ruang baca di laboratorium serta perpustakaan pusat yang dikelola oleh pihak universitas.
- b. Dalam pengelolaan administrasi, Program Magister Ilmu Politik telah menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIA). Salah satu manfaat sistem ini adalah memudahkan mahasiswa Magister Ilmu Politik mengetahui informasi yang berhubungan dengan akademik, seperti informasi tentang perkuliahan, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh fakultas dan jurusan, informasi tentang biaya kuliah, registrasi online (KRS), administrasi nilai mahasiswa (KHS, dan transkrip nilai).
- c. Dalam proses pengambilan keputusan, pengelola Program Magister Ilmu Politik menggunakan data kemahasiswaan yang tersedia didalam SIA antara lain untuk keputusan tentang status terdaftar mahasiswa, sebaran nilai, dan keputusan untuk mengaktifkan kembali status mahasiswa. SIA juga digunakan untuk penyusunan jadwal perkuliahan.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dibantu oleh keberadaan beberapa sistem informasi. Adapun sistem informasi dan fasilitas yang dimiliki oleh Program Magister Ilmu Politik tersebut yaitu seperti Portal Akademik, I-Learning, Perpustakaan, Ruang baca Program Magister Ilmu Politik dan fasilitas pendukung lainnya. Berikut contoh tentang pemanfaatan sistem informasi akademik di Program Magister Ilmu Politik :

1. PORTAL AKADEMIK

Portal akademik adalah sistem informasi yang dipergunakan oleh program studi untuk kelancaran proses pembelajaran. Ini merupakan sistem informasi yang langsung terintegrasi dengan sistem informasi Universitas Andalas. Portal Akademik Universitas Andalas adalah sistem yang memungkinkan para sivitas akademika untuk menerima informasi dengan lebih cepat melalui Internet. Sistem ini diharapkan dapat memberi kemudahan kepada setiap sivitas akademika untuk melakukan aktivitas-aktivitas akademik dan proses belajar mengajar. Beberapa kolom informasi yang ditampilkan dalam portal akademik yaitu seperti *mail box* (kotak pesan), akun informasi, pengumuman tentang akademik, kolom diskusi terbaru, kolom akademik (terdapat beberapa hal penting seperti informasi penawaran mata kuliah, bimbingan akademik, nilai dan lain lain), kolom i-learning serta status pelayanan. Untuk bisa login ke portal akademik, semua sivitas akademika memiliki password pribadi.

Gambar 1. Tampak Luar Portal Akademik



2. i-LEARNING

i-Learning adalah media belajar mengajar yang berbasis internet, intranet atau media jaringan komputer lainnya, yang di instalasi oleh ICT Unand dengan menggunakan aplikasi moodle. Penggunaan I-Learn diharapkan menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien untuk pengembangan dan peningkatan kualitas belajar mengajar, baik dari kalangan dosen, mahasiswa maupun sivitas akademik lainnya. Perkembangan e-learning saat ini istilahnya di Universitas Andalas menjadi Interaktif Learning yang disingkat menjadi I-Learn, dengan definisi yang bersamaan maksudnya dengan definisi dasar dari e-learning tersebut. Adapun tujuan I-Learn adalah pertama meningkatkan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Universitas Andalas, kedua memanfaatkan mutu lulusan yang mampu memanfaatkan TIK sebagai bekal mempresentasikan diri (*e-literacy*), tiga meningkatkan citra universitas sebagai universitas yang baik, maju dan berkualitas dan empat mendukung

pencapaian *good university governance* di Universitas Andalas. I-Learning juga merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Universitas Andalas. Dan I-Learning juga menjadi sistem informasi yang dipergunakan oleh Program Magister Ilmu Politik dalam proses pembelajaran. Sarana informasi ini dipergunakan oleh tim pengajar untuk memudahkan pembagian ilmu pengetahuan dengan mahasiswa. Disini terdapat beberapa pilihan yaitu Materi kuliah, pengumuman, Tugas Kuliah dan Jenis tugas kuliah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa I-Learning bisa diakses melalui akun portal akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika Universitas Andalas.

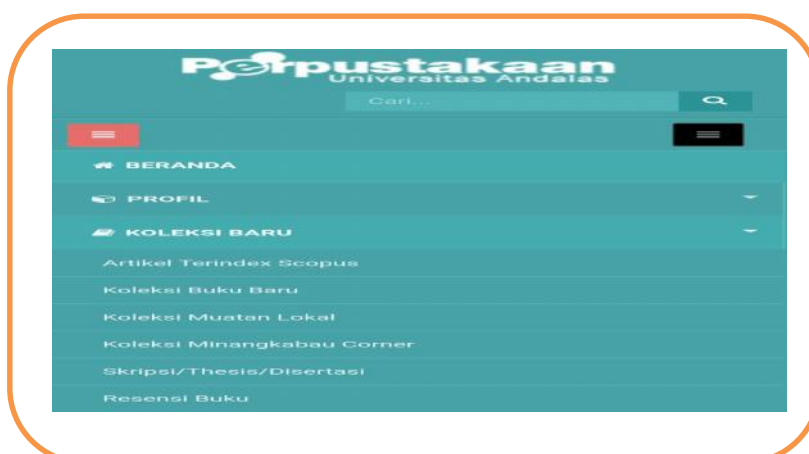
Gambar 3. i-Learning Universitas Andalas



3. PERPUSTAKAAN ONLINE

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Program Magister Ilmu Politik juga difasilitasi dengan keberadaan perpustakaan Universitas Andalas. Dan Perpustakaan ini saat sekarang sudah tersedia dalam bentuk *online*, perpustakaan *online* Universitas Andalas langsung dikelola oleh pihak perpustakaan pusat Universitas.

Gambar 4. Layanan perpustakaan Online



Dari salah satu kolom yang ditawarkan saat mengakses perpustakaan *online* Universitas Andalas, pengunjung ditawarkan dengan kolom “Koleksi Baru”. Disini terdapat beberapa pilihan yang bisa diakses pengunjung untuk proses pembelajaran yaitu artikel terindeks scopus, koleksi buku baru, koleksi muatan lokal, koleksi Minang kabau corner,

skripsi/Thesis/Disertasi dan resensi buku.

Tidak hanya perpustakaan *online*, mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand juga difasilitasi dengan ruang baca program studi yang nyaman karena dilengkapi dengan AC serta fasilitas jaringan internet (LAN dan WAN).

6.5.2 Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
		Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa				√
2	Kartu Rencana Studi (KRS)				√
3	Jadwal mata kuliah				√
4	Nilai mata kuliah				√
5	Transkrip akademik				√
6	Lulusan	-			√
7	Dosen				√
8	Pegawai				√
9	Keuangan				√
10	Inventaris				√
11	Perpustakaan				√

STANDAR 7

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

7.1 Penelitian Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya Sesuai dengan PS dalam Tiga Tahun Terakhir

7.1.1 Agenda dan judul penelitian dosen tetap dan judul tesis

1. Tuliskan agenda dan judul penelitian dosen tetap mengikuti format tabel berikut.

No.	Nama Dosen	Agenda Penelitian	Judul Penelitian	Keterlibatan dengan Jaringan Penelitian*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prof. Dr. Afrizal, M.A			
		2016	Dampak Sosial Perubahan Politik Makro Terhadap Proses Pembebasan Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.	RISTEKDIKTI
		2 tahun 2016 dan 2017	Gerakan lingkungan di Indonesia antara memperjuangkan alam dan masyarakat	UNAND
		2016	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kab. Pasaman	Lit. Bangda Kab. Pasaman
		2015	Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Pusat Layanan Pemerintah Di Sumatera Barat	BKKBN Prov. Sumatera Barat
		2013	Asesmen Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat Kota Padang Menghadapi Tsunami	Mercy Corps
2	Dr. Asrinaldi, M.Si	2013	Quasi otonomi di tingkat pemerintah terendah	Desentralisasi DIKTI
		2013	Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3	Dr. Ria Ariani, M.Si	2016	Survey Kepuasan Masyarakat akan layanan RSUD Pariaman,	Pemerintah Provinsi Sumatera

			RSUD Achmad Mochtar, RSJ HB Saanin	Barat
		2016	Survey Kepuasan Masyarakat akan layanan kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar	Pemkab.Tanah Datar
		2015-2016	Model Motivasi Bagi <i>Front-Liner</i> di RSUD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Kemenristek Dikti
		2015	Kajian Empiris Pelayanan Publik	Setda Provinsi Sumatera Barat
		2015	Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di akan Layanan di RSUD Pariaman	BLUD-RSUD Pariaman
		2015	Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat akan Pelayanan di RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	BLUD- RSAM Bukittinggi
		2014	Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman, Propinsi Sumatera Barat (ketua)	
4	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	2012	Rekrutmen & Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)
5	Dr. Aidinil Zetra M.A	2013	Pemetaan Potensi Konflik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
		2013	Model Desentralisasi, Partisipasi dan Akuntabilitas di Nagari Lasi Kabupaten Agam	Dana DIPA FISIP Unand
		2012	Kajian Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6				

*Contoh penelitian dengan jaringan internasional: penelitian bidang kehutanan dengan lembaga *Center for International Forestry Research* (CIFOR), *International Center for Research in Agroforestry* (ICRAF). Contoh penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan lembaga penelitian nasional (LIPI, BPPT, dll.)

2. Tuliskan judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir mengikuti format tabel berikut.

No. (1)	Nama Mahasiswa (2)	Judul Tesis (3)	Nama Dosen Pembimbing (4)
1	Tessa Dwi Putri (2017)	Implementasi <i>e-Government</i> di Kota Padang.	Dr. Asrinaldi
2	Tanti Endang Lestari (2017)	Non-Voters (Pemilih Golput) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kota BukitTinggi	1. Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA 2. Dr. Asrinaldi, M.Si
3	Lahmuddin (2017)	Kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.Dr. Aidinil Zetra, MA 2.Dr. Asrinaldi, M.Si
4	Harpin Syah (2017)	Strategi Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Kasus : Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Al-Haris dan Khafied Moein)	1. Dr. Asrinaldi, M.Si 2. Drs. Tamrin, M.Si
5	Lara Indah Yandri (2017)	Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman	1. Dr. Ria Ariany, M.Si 2. Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA 3.
6	Heldo Aura (2017)	Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Kurai Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	1. Dr. M. Fachri Adnan, M.Si 2. Drs. Bakaruddin Rosyidi, M.S
7	Dewi Dahlan (2016)	Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan di PT Bank BTPN TBK Cabang padang	1.Dr. Ria Ariany, SS, M.Si 2.Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA
8	Wein Arifin (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014	1. Dr. Asrinaldi, M.Si 2. Dr. Aidinil Zetra, MA
9	Sutri Destemi Elsi (2016)	Politik Kebijakan di Sektor Pertambangan : Dinamika Implementasi Kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	1. Prof. Dr. Helmi, M.Sc 2. Dr. Aidinil Zetra, MA

7.1.2 Jelaskan penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.

Untuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka dosen Ilmu Politik juga aktif mengembangkan teori-teori mutakhir yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan penelitian. Salah satunya adalah pengembangan teori neo institusionalisme yang cukup komprehensif dalam menjelaskan fenomena politik yang ada dalam masyarakat. Teori ini berangkat dari cara pandang terkait dengan institusi negara dan institusi lain di luar negara dalam berinteraksi. Penggunaan teori-teori mutakhir ini sangat relevan, terutama dalam upaya mendorong mahasiswa untuk lebih memahami fenomena globalisasi yang mempengaruhi dinamika politik di Indonesia hingga ke tingkat lokal. Selain itu, dosen Program Magister Ilmu Politik setiap tahunnya juga mendapatkan hibah penelitian dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Penelitian dari pemerintah daerah. Salah satu nilai lebih dari proposal dosen-dosen Ilmu Politik ini adalah keberanian mereka menawarkan gagasan dan pendekatan baru dalam menjawab masalah penelitian.

Misalnya penelitian Dr. Asrinaldi yang berjudul Politik Kekuasaan Penghulu Adat Dan Implikasinya Pada Kualitas Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *Grounded Theory*. Dalam penelitian ini juga melibatkan mahasiswa, sehingga ada proses transformasi pengetahuan dan pemikiran baru yang terkait dengan bidang kajian yang diteliti. Keberanian menawarkan pendekatan dan pemikiran baru ini merupakan solusi terkait dengan kejenuhan dari pendekatan dan teori/konsep yang selama ini ditawarkan oleh ilmuwan politik sebelumnya. Apalagi dengan dinamika masyarakat Sumatera Barat dengan kearifan nilai-nilai lokalnya menjadi inspirasi bagi dosen-dosen ilmu politik untuk mengembangkan pengetahuan lokal masyarakat. Bahkan dengan mengangkat nilai-nilai lokal ini menarik perhatian ilmuwan lain sehingga terdorong untuk meneliti di Sumatera Barat berkaitan dengan topik yang sama.

Beberapa penelitian terkait dengan pemikiran sesuai dengan perkembangan teori dapat dilihat dari beberapa penelitian mahasiswa berikut ini :

1. Heldo Aura : Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Kurai Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, dengan pembimbing Dr. M. Fachri Adnan, M.Si dan Drs. Bakaruddin Rosyidi, M.S
2. Wein Arifin : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dengan pembimbing Dr. Asrinaldi, M.Si dan Dr. Aidinil Zetra, MA.
3. Tanti Endang Lestari : Non-Voters (Pemilih Golput) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kota BukitTinggi dengan pembimbing Prof. Sri Zulchariyah, MA dan Dr. Asrinaldi, M.Si.

7.1.3 Jelaskan hasil penelitian dosen atau penelitian tesis mahasiswa pada butir 7.1.1. yang berdampak pada peningkatan (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.

Produktivitas

Kebijakan di tingkat fakultas dengan memberikan insentif dan bantuan untuk penerbitan karya ilmiah dosen yang berasal dari penelitian dapat mendorong produktivitas dosen di program magister. Beberapa karya dosen yang berasal dari penelitian baik yang dilaksanakan atas biaya kementerian pendidikan dan kebudayaan, universitas dan fakultas dapat diterbitkan baik dalam bentuk buku, maupun artikel di jurnal ilmiah. Setiap tahun, dosen di program magister dapat menerbitkan karya ilmiahnya sehingga berdampak pada suasana pembelajaran. Bahkan, dengan terbitan dari dosen ini dapat memotivasi mahasiswa untuk melakukan

penelitian dengan tema yang sama dan mengembangkan hasil karya ilmiah yang diterbitkan dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik.

Sebagai salah satu contoh hasil penelitian tesis dari Wein Arifin dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Tesis ini sudah dibukukan dengan judul : Perilaku Memilih dalam Pemilu (Yogyakarta : Indie Book Corner, 2017)

Kesejahteraan Masyarakat

Dampak dari hasil penelitian ini kepada kesejahteraan masyarakat adalah bersifat tidak langsung. Biasanya melalui hasil penelitian ini, para pembuat kebijakan dapat menjadikan hasil penelitian yang dipublikasikan ini kepada proses pembuatan kebijakan. Apalagi, hasil penelitian dosen-dosen Program Magister Ilmu Politik ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah karena kajiannya yang relevan dengan kewenangan dan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, keberadaan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh dosen dan mahasiswa program magister ini menjadi relevan untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Selain itu, dengan dipublikasikannya hasil penelitian ini, justru berdampak pada eksistensi dosen program magister yang semakin dikenal dan umumnya diminta menjadi tenaga ahli oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang dibuat. Misalnya ini terlihat dari penelitian Lahmuddin dengan judul Kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dibimbing oleh Dr. Aidinil Zetra, MA, dan Dr. Asrinaldi, M.Si selain itu juga ada penelitian dari lara indah yandri dengan judul penelitian : Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman yang dibimbing oleh Dr. Ria Aryani, M.Si dan Dr. Aidinil Zetra. MA.

Mutu Lingkungan

Hasil penelitian yang dipublikasinya ini juga membawa dampak kepada mutu lingkungan baik internal program magister maupun eksternal. Secara internal akan menghasilkan iklim kompetisi yang sehat dari dosen untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara secara eksternal justru berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penelitian yang bersinggungan dengan peningkatan mutu lingkungan adalah penelitian dari Sutri Destemi Elsi dengan judul : Politik Kebijakan di Sektor Pertambangan : Dinamika Implementasi Kebijakan CnC di Kabupaten Pasaman Barat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, dengan pembimbing Prof. Helmi, M.Sc dan Dr. Aidinil Zetra, MA.

7.1.4 Tuliskan jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Penelitian	Jumlah Penelitian dalamTahun Pelaksanaan			Jumlah Penelitian Selama Tiga Tahun
	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti	1	0	0	1
PT yang bersangkutan	2	2	5	9
Kemenristekdikti	1	2	4	7
Institusi dalam negeri di luar Kemenristekdikti	2	10	2	14
Institusi luar negeri	0	0	1	1
JUMLAH	6	14	12	32

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan.

7.1.5 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No .	Judul	Nama-nama Dosen	Dihasilkan/ Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Nama Lembaga Sitasi ⁽²⁾	Tingkat*		
						Lokal	Nasional	Internasi onal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	The difference in intervention of sexual abuse prevention by two variance professions on primary school children in Padang	Prof. Afrizal, MA	Indian Journal of community Health, Vol 1, No 1	2017	scopus			√
2	Agrarian Reactionaries and the land exclusion dilemma	Prof. Afrizal, MA	Jurnal Of Peasant Studies	2017	scopus			√

3	Asean Economy Community (AEC) Indonesian Politic of Trade in Contending with the Simple Market Based Production	Dr. Tengku Rika Valentina, MA	Journal of Art, Science & Commerce. Volume VII, Issue 1 (1), January 2016	2016				√
4	Peta ideologi partai politik di tiga pilkada gubernur Sumatera Barat (2005-2010 dan 2015)	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA	Jurnal CEPP Pemilu dan partai politik. Vol.1, No.1 Juni 2016	2016			√	
5	Industrial Plantations and Community Rights: Conflicts and Solutions	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Scopus	2016	Scopus			√
6	Development and Testing of Intervention Model for Child Sexual Abuse Prevention on Primary School Children in Padang City, 2014	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Indian Journal of Community Health V/27/4	2015	Scopus			√
7	Kebijakan e-Government Dalam Pengembangan Publik e-Service di Indonesia	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Analisis CSIS.Kuartal ketiga 2015, Vol.44 No.3. hal: 271-292</i>	2015			√	
8	Pemahaman dan Pembentukan Karakter Masyarakat : Realitas dan Pandangan Antropologi	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi	Jurnal Tingkap Vol. XI No. 2 Th. 2015	2015	<i>DOAJ dan Google Scholar</i>		√	
9	Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis <i>Mobile Web</i> untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan konstituen	Aidinil Zetra, SIP, MA, PhD	Jurnal Analisa Politik. Vol. 9, No.14, Hal. 36-42, 2015	2015			√	

10	Masalah Profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU) dalam partisipasi pemilih dalam pemilukada serentak 2015 di sumatera barat (kultur lokal dan pemilu berintegritas)	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA	Jurnal etika dan pemilu: Sengkarut Pemilukada 2015. Vol.2 No.1/Maret 2016	2015			√	
11	Third-Party Intervention in Terminating Oil Palm Plantation Conflicts in Indonesia: A Structural Analysis	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Artikel di jurnal Sojourn ISEAS, Vol 30, No 1, pp. 141-72	2015	scopus			√
12	Metode Penelitian Kualitatif: Mendorong Penggunaan Metode Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Bidang Ilmu	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Buku terbitan PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. ISBN: 9789797697303	2014			√	
13	Patriarchal Barriers To Women's Political Participation In South-East Asia: Lesson From the Philippines,Cambodja, Malaysia, Indonesia and Timor-Leste on Patriarchy and the Rise of Women's Participation in State Politics	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	BUKU. <i>Partners hip for Governance Reform/Kemitra an Indonesia.</i> 2014. ISBN: 978-602-1616-19-2	2014				√

14	Partisipasi Perempuan dalam pemilihan Umum: Pengalaman Partisipasi Politik Perempuan di Sumatera Barat	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	Jurnal Semai, Edisi Khusus 2014. Peluang Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014. USAID, Koalisi Perempuan Indonesia dan Kemitraan	2014			√	
15	Dominasi Partai Demokrat Liberal dalam Sistem Politik di Jepang	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	BUKU. ISBN 928-602-8821-49-0, 2014	2014			√	
16	Strengthening National Competitiveness Through Cooperation in The era of Globalization	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	Disampaikan dalam: <i>the 1st international conference for interdisciplinary studies</i> (2014 ICIS). 22-23 September. 2014 Busan, Korea	2014				√

17	Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan di Sumatera Barat	Prof. Dr. Nussyirwan Effendi	Prosiding Seminar Nasional Ke-1 FISIP UNAND-ISBN: 978-602-71540-0-1	2014			√	
18	Dilema Partai Islam dalam Pemilu di Indonesia	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Jurnal Islam & Demokrasi</i>	2014			√	
19	Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia	Dr. Asrinaldi, M.Si	BUKU. ISBN: 978-979-1262-59-0	2014			√	
20	Desentralisasi Fiskal dan Efektifitas Transfer Dana Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Jurnal Analisis Politik . Volume 2, Nomor 1 Maret Tahun 2014, Hal: 35</i>	2014			√	
21	Penguatan Hubungan DPRD dan Konstituen di Sumatera Barat	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Jurnal Analisa Politik. Vol. 9, No.13, Hal. 14-20, 2014	2014			√	
22	Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat dan Desa Ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Jurnal Sosio humaniora</i>	2013			√	
23	Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Jurnal Penelitian Politik</i>	2013			√	

24	Ancaman Terhadap Pengembangan Sistem Pertahanan Sosial Daerah Perbatasan Di Kota Batam	Dr. Asrinaldi, M.Si	<i>Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan</i>	2013			√	
25	Implementasi Demokrasi Lokal di Balik bayang-Bayang otonomi Negara.	Dr. Asrinaldi, M.Si	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol/Nomor 25(2):96-107.	2012			√	
26	Politik Masyarakat Miskin Kota	Dr. Asrinaldi, M.Si	Buku yang diterbitkan oleh Gavamedia Yogyakarta. ISBN: 978-602-8545-99-0. ix+251.	2012			√	
27	Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah di Sumatera Barat: Analisis dari Pendekatan Budaya.	Dr. Asrinaldi, M.Si	Jurnal Transformasi Pemerintahan Vol/Nomor 4(1):63-73.	2012		√		
28	Hubungan Sistem Pemerintahan Modern Dengan Sistem Sosiobudaya Masyarakat Nagari di Sumatera Barat.	Dr. Asrinaldi, M.Si	Visi Publik Vol/Nomor 8(2): 405-413	2012		√		

29	The Study of Land and Tree Tenure Rights on Agroforestry (Parak) System at Communal Land in West Sumatera, Indonesia	Prof. Dr. Nursyirwan Effendi	Journal of Agricultural Extension and Rural Development Vol. 4(19), pp. 486-494, November 2012	2012	Google Scholar			√
30	Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis terhadap Keadilan Ekologis	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, No. 1, Vol. 1	2012				√
Jumlah						2	18	10

Catatan: (1) Beri tanda “*” pada artikel yang dikutip (masuk dalam *citation index*)

(2) Contoh nama lembaga sitasi: *Thompson Reuters Web of Science, Elsevier Scopus, Google Scholar*.

(3) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

7.1.6 Tuliskan dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS).

No.	Nama Dosen	Topik Penelitian	Jumlah Mahasiswa yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Asrinaldi, M.Si	Pengembangan Model e-Government untuk mewujudkan Publik e-Service di Indonesia	Tesha Dwi Putri (1 orang)
2	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Strategi Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Kepulauan Menatawai.	Lahmuddin (1 orang)
3	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Perilaku Memilih Perempuan Buruh Migran Pada Pemilu 2014.	Wein Arifin (1 orang)
Total jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya terkait dengan penelitian dosen			A=3
Jumlah mahasiswa yang penelitian tesisnya tidak terkait dengan penelitian dosen			B=6
Total mahasiswa yang melakukan penelitian tesis pada TS			A+B=9

7.1.7 Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program magister yang telah memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir.

No.	Nama Karya*	
	Paten/HaKI	Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
(1)	(2)	(3)
1	Buku dengan judul “Pemikiran Politik Amin Rais”	Buku dengan ISBN: 978-602-8821-18-6
2	Buku dengan judul “Kerangka Sistem Politik Indonesia”	Buku dengan ISBN: 978-602-19616-3-6
3	Buku dengan judul “Politik Masyarakat Miskin Kota”	Buku dengan ISBN: 978-602-8545-99-0
4	Demokrasi Lokal di Indonesia : Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat	Buku dengan ISBN: 978-602-6222-50-3 Buku dengan nomor Hak Cipta: EC 00201801660
5	Buku dengan Judul “Kekuatan kekuatan Politik di Indonesia” (2014)	Buku dengan ISBN : 978 -979-1262-59-0 Nomor Hak Cipta : EC 00201803927

* Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.

7.2 Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Tiga Tahun Terakhir

7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Tahun Pelaksanaan			
	2014	2015	2016	Jumlah Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembiayaan sendiri oleh dosen	0	0	0	0
PT yang bersangkutan	6	4	2	12
Kemenristekdikti	0	0	0	0
Institusi dalam negeri di luar Kemenristekdikti	4	7	4	15
Institusi luar negeri	0	0	0	0
JUMLAH	10	11	6	27

Catatan: (*) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.2 Tuliskan nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

No.	Nama Dosen	Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat	Waktu Kegiatan	Hasil atau Dampak Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Partai Politik di Kota Payakumbuh	2016	Bertambahnya pengetahuan pengurus partai politik dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi kepartaian.
2		Pendidikan Politik Untuk Pengurus Ormas di Kab.Pasaman Barat	2016	Bertambahnya pengetahuan pengurus ormas dalam melaksanakan peran ormas di masyarakat.

3		Sosialisasi Politik Untuk Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab.Pasaman Barat	2016	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam aktivitas politik di Pasaman Barat.
4		Pendidikan Politik Untuk Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Sawahlunto	2016	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran politik para aktivis LSM di Sawahlunto
5	Dr. Asrinaldi, M.Si	Pendidikan Politik Bagi Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Salafiyah “Nurul Yaqin” Ambung Kapur Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.	2015	Meningkatnya pengetahuan santri sebagai pemilih pemula dalam aktivitas pemilu dalam Pilkada di Kota Pariaman.
6	Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, M.A	Pelatihan Pemilih Muda RVTI	2015	Meningkatnya pengetahuan pemilih Muda dalam aktivitas pemilu dalam Pilkada
7	Dr. Aidinil Zetra, M.A	Pendidikan Politik Untuk Pengurus Partai Politik di Kota Payakumbuh	2015	Bertambahnya pengetahuan pengurus partai politik dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi kepartaian.
8	Prof. Dr. Nusyirwan Effendi	Model Pembelajaran Problem based-instruction melalui penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah pada guru SMA di kota Padang	2014	Meningkatnya pengetahuan guru di SMA Kota Padang di dalam melakukan penelitian berdasarkan <i>based-instruction</i> .
9	Dr. Asrinaldi, M.Si	Pengabdian Masyarakat Berbasis Prodi Ilmu Politik ke Dinas Pendidikan Solok Selatan.	2014	Bertambahnya informasi terkait keberadaan program studi Ilmu politik.
10		IbM Perumusan Agenda Dalam Penyusunan Kebijakan Publik bagi Koalisi Masyarakat Sipil di Kota Padang	2014	Meningkatnya kemampuan koalisi masyarakat sipil di Kota Padang dalam menyusun agenda kebijakan publik
11		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Caleg Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu 2014	2013	Meningkatnya Kemampuan Caleg
12		Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru-guru SMUN 11	2012	Meningkatnya Kemampuan guru dalam menulis karya tulis ilmiah

		Padang		
13	Prof. Dr. Afrizal, M.A	Peningkatan Kapasitas LSM Menyelesaikan Konflik di Luar Peradilan di Provinsi Jambi	2012	Meningkatnya Peran LSM dalam menyelesaikan konflik
14	Dr. Ria Ariany, M.Si	Penilaian Unit Kerja Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat provinsi Sumbar	2012	Tersedianya nilai pelayanan prima lembaga pemerintahan
15	Dr. Ria Ariany, M.Si	Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Setda Provinsi Sumbar periode 2012-2015	2012	Terselenggaranya pengaduan masyarakat di Lembaga pemerintah provinsi

7.3 Kegiatan kerjasama dengan instansi lain dalam tiga tahun terakhir

7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program magister/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Universitas Andalas	Penyelenggaraan Pendidikan	2013	2014	Bertambahnya jaringan kerjasama dibidang pendidikan dengan IPDN
2	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Universitas Andalas	Penugasan Tenaga Dosen dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan	2013	2018	Bertambahnya jaringan kerjasama dibidang pendidikan dengan IPDN
3	Dirjen Kemendagri-CEPP Uni Link Sumbar (Dosen Ilmu Politik)	Pelatihan Pemilih Muda RVTI	2014	2014	Tersosialisasinya politik memilih kepada para pemilih muda
4	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan LPPM Unand	Survey Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu 2015 di Kota Padang	2015	2015	Lahirnya sebuah kebijakan tentang Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu
5	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Kuliah Umum oleh Dikyanmas KPK	2017	2017	Menambah pengetahuan mahasiswa tentang pendidikan integritas dan anti korupsi langsung dari KPK

6	KPU Sumbar – CEPP Uni Link Sumbar (Dosen Ilmu Politik)	Pelatihan Pemilih Muda RVTI	2015	2015	Tersosialisasinya politik memilih kepada para pemilih muda
7	KPU Kota Padang Panjang + Dosen Ilmu Politik	Penelitian Perilaku Politik Masyarakat Tahun 2015: Kesukarelaan Warga Dalam Politik di Kota Padang Panjang	2015	2015	Mengetahui perilaku politik dan kesukarelaan mereka dalam kegiatan politik di Kota Padang Panjang
8	KPU Kepulauan Mentawai + Dosen Ilmu Politik	Penelitian Fluktuasi Partisipasi Memilih Masyarakat Dalam Pemilu legislatif Dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai	2015	2015	Mengetahui faktor penyebab fluktuasi tingkat kehadiran masyarakat Mentawai dalam Pileg dan Pilpres
9	Bappeda+LPPM	KEGIATAN PENELITIAN (Identifikasi Nilai-Nilai Luhur Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	2016	2016	Hasil identifikasi berguna untuk pembelajaran dan untuk acuan pembuatan sebuah kebijakan tentang nilai luhur ABS-SBK
10	LPPM dengan Dosen Ilmu Politik	Pelaksanaan Penugasan kerjasama Penelitian	2016	2016	Banyaknya kerjasama penelitian dan pengabdian yang diperoleh oleh dosen Ilmu Politik
11	KPU Sumbar dan Jurusan Ilmu Politik	Penguatan Peran Kelompok Masyarakat Strategis Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Aktivitas Politik Electoral Di Sumatera Barat	2016	2016	Dari sisi KPU, kegiatan tersebut dapat membantu KPU melaksanakan salah satu program kerja dan dari sisi prodi Ilmu Politik yaitu terbantu dalam aspek pendanaan
12	Center for Strategic and International Studies	Kuliah Umum tentang Pemilu Serentak tahun 2019.	2017	2017	Terjalinnnya kerjasama dalam bidang riset dan dokumentasi penelitian guna meningkatkan kualitas tesis mahasiswa.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program magister/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IIEN-TIRI Jakarta dan Dosen Ilmu Politik	Konsolidasi Anggota Baru dan Sosialisasi E-integrity Learning	2013	2014	Memfasilitasi dunia pendidikan dan riset yang dapat memberikan sumbangan nyata dalam lembaga pendidikan umum dalam bidang integritas.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Fotokopi SK pendirian PS
2	-	Fotokopi SK izin operasional PS
3	4.3.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap PS.
5	4.4	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap.
6	7.1.7	Surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM MAGISTER PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	1.1.2	Dokumen mengenai strategi pencapaian sasaran program magister
2	2.1	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
3	2.3	(1) Rencana pengembangan program magister (2) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)
4	2.4	Dokumen tentang jaminan mutu.
5	2.5	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.
6	3.1	Dokumen tentang sistem rekrutmen yang mencakup: kebijakan rekrutmen, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
7	3.2.1	Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK)
8	3.2.2	Bukti prestasi/reputasi yang dicapai mahasiswa di bidang akademik

No.	Nomor Butir	Keterangan
		dan non-akademik (prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olah raga, seni dsb)
9	3.3	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna.
10	3.4	Laporan kegiatan himpunan alumni.
11	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
12	4.2	• Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. • Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
13	4.5.2	Bukti kehadiran tenaga ahli/pakar dari luar PT sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, sebagai pembicara tamu, dsb.
14	4.5.3	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan.
15	4.5.4.1	Bukti kegiatan dosen tetap sebagai pakar/konsultan/staf ahli/narasumber di luar PT.
16	4.5.4.2	Bukti keanggotaan dosen tetap dalam himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah nasional dan internasional.
17	4.5.4.3	Bukti dosen tetap sebagai <i>visiting professordi</i> PT lain tingkat nasional atau internasional.
18	4.5.5	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).Tidak termasuk ceramah, penyajian makalah, simposium, seminar.
19	4.6.1	Fotokopi ijazah dan sertifikat vokasi tenaga kependidikan.
20	5.1.1	Kurikulum pendidikan magister.
21	5.1.3	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum.
22	5.2	Dokumen tentang persyaratan mengikuti pendidikan magister, proses, pelaksanaan, dan persyaratan kelulusannya.

No.	Nomor Butir	Keterangan
23	5.3	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan..
24	5.4	Dokumen tentang sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis
25	5.5	Dokumen tentang sistem monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (masing-masing untuk proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, proses penulisan tesis, kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, ujian akhir studi magister).
26	5.6	Dokumen tentang kebijakan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif serta bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya.
27	6.1	Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana.
28	6.2.3	Kontrak penelitian.
29	6.4.1	Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya.
30	6.5.1	Daftar <i>software</i> , petunjuk pemanfaatan SIM.
31	7.1.1	• Hasil penelitian dosen tetap (rekapitulasi judul dan dokumen laporan hasil penelitian) • Bukti keterlibatan dengan jaringan penelitian nasional atau internasional. • Tesis mahasiswa.
32	7.1.4	Bukti artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap.
33	7.2	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
34	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri
35	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri